

SINERGITAS *STAKEHOLDERS* DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PROBOLINGGO

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**MEGA YANA PUSPITA
125030107111049**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2017

MOTTO

*Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan,
selama ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya.*

(Kahlil Gibran)

*Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan;
jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan;
tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.*

(Mark Twain)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Kuucapkan rasa syukur kepada Allah SWT,

Ku persembahkan karya kecil ku ini teruntuk :

Untuk Ibu & Ayahku tercinta

Sukanto dan Ninik Yulianti

*Yang tidak pernah berhenti menghaturkan doa dalam tiap hembusan nafas di tiap sujudnya,
yang selalu memberikan semangat, nasihat dan motivasi untuk terus dapat menyelesaikan
skripsiku selama ini.*

Kakakku Tercinta

Larinta Septian Adirama (Alm)

*Terima kasih atas kasih sayangmu yang kau berikan semasa hidup, yang selalu memberikan
dukungan moril kepadaku, yang selalu memotivasiku untuk dapat segera menyelesaikan
skripsi ini.*

Teman-teman ku

Teman seangkatan (Yuli, Rhisna, Dinda, Via, Rahma, dsb)

Dwi, Ika, Indah

*Terima Kasih telah banyak memberikan masukan, semangat dan arahan hingga dapat
menyelesaikan skripsi ini.*

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

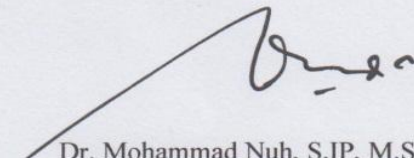
Judul : Sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo
(Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dan UPT
Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo)
Disusun oleh : Mega Yana Puspita
NIM : 125030107111049
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : -

Malang, 25 November 2016

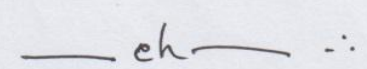
Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Mohammad Nuh, S.IP, M.Si
NIP. 197108282006041001



Mochamad Chazienul Ulum S.Sos, MPA
NIP. 197406142005011001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahanka di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Desember 2016
Jam : 11.00
Skripsi atas nama : Mega Yana Puspita
Judul : *Sinergitas Stakeholders* dalam Pengelolaan Sampah di
Kota Probolinggo

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota



Dr. Mohammad Nuh, S.IP, M.Si
NIP. 197108282006041001



M. Chazienul Ulum S.Sos, MPA
NIP. 197406142005011001

Penguji I



Dr. SISWIDIYANTO, MS
NIP 196007171986011002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 25 November 2016



Nama : Mega Yana Puspita

NIM : 125030107111049

RINGKASAN

Mega Yana Puspita, 2017. **Sinergitas *stakeholders* dalam Pengelolaan Sampah di Kota Probolinggo**. Dr. Mohammad Nuh, S.IP, M.Si, Mochamad Chazienul Ulum S.Sos, MPA. 130 Hal+ xvii.

Permasalahan sampah saat ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengelolaan sampah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri melainkan *stakeholders* lainnya. Dalam mencapai keberhasilan dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo perlu adanya sinergitas *stakeholders* yaitu hubungan secara harmoni antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo.

Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian berlokasi di Kota Probolinggo dengan situs penelitian antara lain Kantor BLH Kota Probolinggo, Kantor UPT PSL Kota Probolinggo, Bank Sampah Bunda Peduli, Bank Sampah Melati Berseri dan POKMAS Nusa Indah. Fokus dalam penelitian ini adalah : 1) Pengelolaan sampah di Kota Probolinggo; 2) Sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo; dan 3) Faktor pendukung dan penghambat sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Pengelolaan sampah di Kota Probolinggo dapat disimpulkan telah diterapkan dengan baik dan benar melalui dua cara yaitu penanganan sampah dan pengurangan sampah, meskipun terdapat beberapa masyarakat yang kurang memiliki kesadaran terhadap permasalahan sampah; 2) sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo dilihat dari indikator peran *stakeholders*, proses pencapaian sinergitas, dan jenis sinergitas dapat disimpulkan bahwa terdapat sinergitas yang terjalin cukup baik antara *stakeholders*; 3) Faktor pendukung yang dihadapi selama proses sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo antara lain a) Dukungan Pemerintah Daerah, b) Komitmen masyarakat, sedangkan faktor penghambat yang dihadapi selama proses sinergitas *stakeholders* antara lain : a) Kurangnya kesadaran masyarakat, b) Tidak adanya dukungan dana dari dunia usaha/swasta.

Saran yang diberikan peneliti antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, memperluas jangkauan sosialisasi, meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Probolinggo.

SUMMARY

Mega Yana Puspita, 2017. **Synergy of Stakeholders in Waste Management in Probolinggo City**. Dr. Mohammad Nuh, S.IP, M.Si, Mochamad Chazienul S.Sos Ulum, MPA. 130 Pages + xvii.

Current waste issues of special concern to Local Government. Therefore, in the implementation of waste management is not only done by the government itself, but other stakeholders. In reaching success in waste management in Probolinggo need for synergy of stakeholders such harmony relationship between government, private, and society. The purpose of this research to find out how the synergy of stakeholders in waste management in Probolinggo City.

This research uses descriptive research and qualitative approaches. Research took place in Probolinggo with BLH of Probolinggo city, UPT PSL of Probolinggo city, *Bank Sampah Bunda Peduli*, *Bank Sampah Melati Berseri* and *POKMAS Nusa Indah* as the research's sites. The focuses of this research are: 1) Waste management in Probolinggo City; 2) Synergy of stakeholders in waste management in Probolinggo City; and 3) supporting and inhibiting factors synergy of stakeholders in waste management in Probolinggo City.

The results of this research are: 1) Waste management in Probolinggo city can be concluded have been implemented properly in two ways are waste management and waste reduction, although there are some people who lack awareness of the problem of garbage; 2) synergy of stakeholders in waste management in Probolinggo seen from indicators of the role of stakeholders, the process of achieving synergy, and the type of synergy can be concluded that there is a fairly good synergy that exists between stakeholders; 3) The supporting factors encountered during the process synergy of stakeholders in waste management in Probolinggo city are a) Local Government Support, b) Commitment communities, while inhibiting factors encountered during the process of synergy of stakeholders are: a) Lack of public awareness, b) Lack of financial support from business / private sector.

The suggestions given by researcher including: increase the public awareness on waste management by conducting activities related to waste management, extending the reach of socialization, improve the effectiveness of waste management in Probolinggo City.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang,
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang,
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang,
4. Bapak Dr. Mohammad Nuh, S.IP, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing yang selalu memberi bimbingan, saran, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Mochamad Chazienul Ulum S.Sos, MPA selaku Anggota Komisi Pembimbing yang selalu memberi bimbingan, saran, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Sarwono M.Si selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan banyak motivasi dan saran selama masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya dosen jurusan Administrasi Publik yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staf/pegawai fakultas Ilmu Administrasi, yang telah membantu dalam kelancaran segala urusan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh staf dan pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, terutama Ibu Yayuk yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh staf dan pegawai UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo, terutama Bapak Neli selaku Kepala UPT PSL, dan Bapak Bambang selaku staf UPT PSL yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012, terutama jurusan administrasi publik yang selalu mendukung, memberi semangat, dan juga memberi masukan baik kritik maupun saran untuk skripsi ini.
12. Teman-teman semasa SMP, terutama Dwi, Ika, Indah yang selalu mendukung, memberi semangat dan juga memberi masukan baik kritikan maupun saran untuk skripsi ini.

Demi menyempurnakan skripsi ini, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Desember 2016

Penulis



DAFTAR ISI

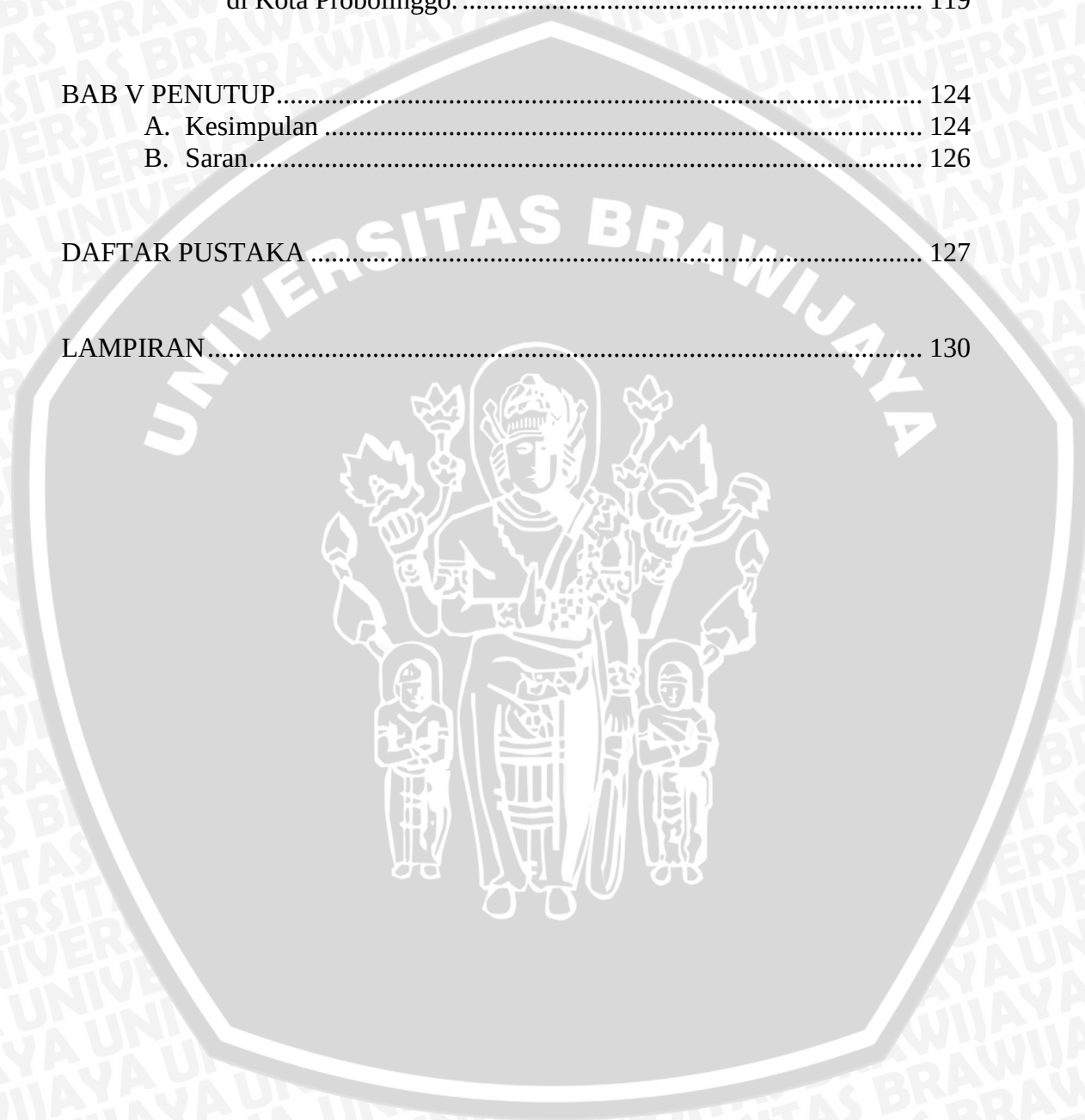
	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 13
A. Administrasi Publik	13
B. <i>Governance</i>	16
C. <i>Stakeholders</i>	19
D. Konsep Sinergitas	22
1. Pengertian Sinergi	22
2. Jenis Sinergi Kelembagaan	25
E. Pengelolaan Sampah	28
1. Pengertian Sampah	28
2. Jenis dan Sumbernya	28
3. Pengelolaan Sampah	31
4. <i>Stakeholders</i> Pengelolaan Sampah	35
 BAB III METODE PENELITIAN	 39
A. Jenis Penelitian	39
B. Fokus Penelitian	40
C. Lokasi dan Situs Penelitian	41
D. Sumber Data Penelitian	42

E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Instrumen Penelitian.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 48

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
1. Gambaran Umum Kota Probolinggo	48
a. Keadaan Georafis Kota Probolinggo	48
b. Keadaan Demografi Kota Probolinggo	50
c. Visi dan Misi Kota Probolinggo	51
2. Profil Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo	55
a. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo	55
b. Tugas Pokok dan Fungsi BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kota Probolinggo	55
c. Struktur Organisasi BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kota Probolinggo	57
3. Profil UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo	59
a. Tugas Pokok dan Fungsi UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo	59
b. Struktur Organisasi UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo	60
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	61
1. Pengelolaan Sampah di Kota Probolinggo.....	61
2. Sinergitas <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo	67
a. Peran <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Probolinggo.....	67
1) Peran Pemerintah / <i>government</i> dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo	68
2) Peran Masyarakat / <i>civil society</i> dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo	80
3) Peran swasta / <i>private sector</i> dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo	88
b. Proses Pencapaian Sinergitas	90
c. Jenis sinergi.....	96
3. Faktor-Faktor pendukung dan penghambat Sinergitas <i>Stakeholders</i> dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Probolinggo.	97
a. Faktor Pendukung	97
b. Faktor Penghambat.....	101
C. Analisis Data Fokus Penelitian	102
1. Pengelolaan sampah di Kota Probolinggo	102

2. Sinergitas <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo	106
3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Sinergitas <i>Stakeholders</i> Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Probolinggo.	119
 BAB V PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	126
 DAFTAR PUSTAKA	127
 LAMPIRAN.....	130



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Jumlah Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Anggaran Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan.....	4
2.	Kegiatan Pelatihan Daur Ulang Sampah Plastik.....	72
3.	Daftar kegiatan sosialisai UPT Pengolahan Sampah Kota Probolinggo.....	74
4.	Daftar Kunjungan Ke UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo	77
5.	Sarana dan Prasarana Operasional Pengelolaan Sampah.....	98
6.	Anggaran Pengelolaan Kebersihan / Persampahan dan TPA	99
7.	Fungsi dan Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Probolinggo	109

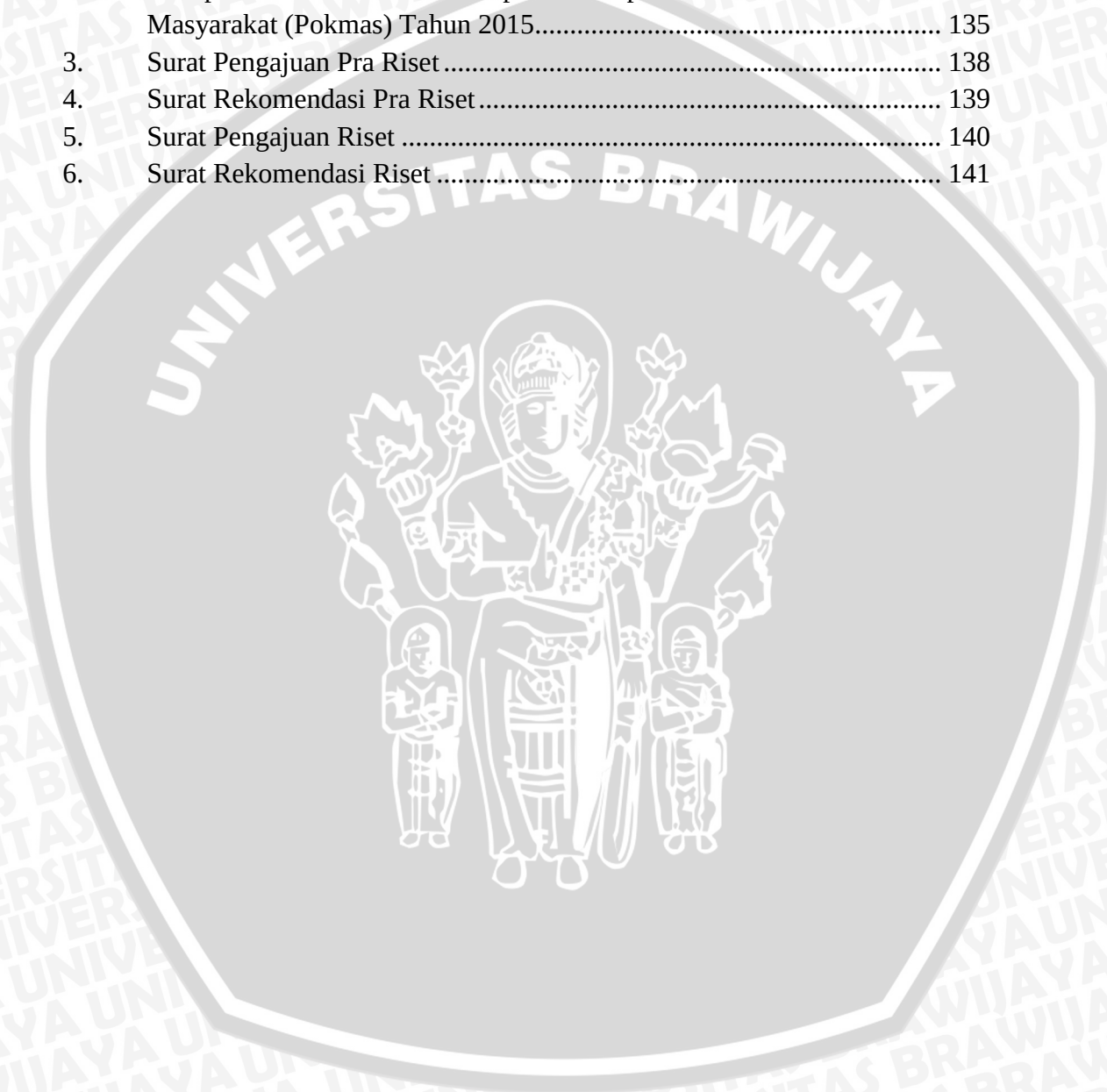


DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Keseimbangan Hubungan Tiga Komponen <i>Governance</i>	18
2.	Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif.....	47
3.	Peta Kota Probolinggo	48
4.	Struktur Organisasi BLH Kota Probolinggo	58
5.	Struktur Organisasi UPT PSL Kota Probolinggo.....	60
6.	Proses Pengelolaan Sampah di Kota Probolinggo	62
7.	Kegiatan Pelatihan Daur Ulang.....	71
8.	Hasil Daur Ulang Sampah.....	73
9.	Kegiatan Sosialisai UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo	73
10.	Kegiatan kunjungan ke UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo	77
11.	Proses Pengambilan Sampah Organik POKMAS dan BANK SAMPAH.....	80
12.	Kegiatan Sosialisasi Siswa-siswi SMPN 5 Kota Probolinggo.....	83
13.	Kegiatan Rutin Papesa tanggal 17 April 2016	93
14.	Kegiatan Rutin Papesa tanggal 22 mei 2016.....	94
15.	Kondisi Sampah di Sungai	102

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Data Bank Sampah Kota Probolinggo	130
2.	Rekapitulasi Data Pemilah Sampah Kelompok Masyarakat (Pokmas) Tahun 2015.....	135
3.	Surat Pengajuan Pra Riset.....	138
4.	Surat Rekomendasi Pra Riset.....	139
5.	Surat Pengajuan Riset	140
6.	Surat Rekomendasi Riset	141



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah menjadi permasalahan lingkungan yang sering dihadapi oleh setiap negara, khususnya negara berkembang, yang memiliki jumlah penduduk besar seperti Indonesia. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta, sehingga tidak sedikit volume sampah yang dihasilkan tiap tahunnya. Jumlah timbunan sampah di Indonesia hingga tahun 2015 telah mencapai 175.000 ton/hari atau setara 64 juta ton/tahun (<http://www.menlh.go.id>). Hal ini juga didukung oleh berita yang dimuat dalam geotimes.co.id, sebagai berikut:

Permasalahan sampah menjadi masalah yang belum terselesaikan dengan baik, khususnya di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah sampah terus meningkat di setiap tahunnya. Kesadaran pemerintah dan masyarakat akan sampah harus digali agar terlepas dari permasalahan sampah. Untuk Jakarta sendiri, sampah dihasilkan sekitar 6.000 hingga 6.500 ton per hari. Di Pulau Bali, sampah yang dihasilkan sudah menyentuh angka 10.725 ton per hari. Sedangkan di Palembang, peningkatan jumlah sampah naik tajam dari 700 ton per hari menjadi 1.200 ton per hari. Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang, Agung Nugroho mengatakan peningkatan signifikan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan kota yang pesat dari sisi jumlah penduduk hingga aktivitas ekonomi. Selain itu peningkatan sampah yang terjadi akibat adanya tambahan sampah dari kota/kabupaten lain. Sampah yang dihasilkan Indonesia secara keseluruhan mencapai 175.000 ton per hari atau 0,7 kilogram per orang. Sayangnya, pada 2014, data statistik sampah di Indonesia mencatat bahwa Indonesia menduduki negara penghasil sampah plastik kedua terbesar di dunia setelah Cina. (Sumber: geotimes.co.id)

Kompleksitas permasalahan masalah sampah perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah mengingat jika cara penanganan yang salah, maka akan mengakibatkan penumpukan sampah. Apabila tidak ditangani dengan baik akan

menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. Diperlukan peran dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat serta pihak-pihak swasta yang terlibat dalam permasalahan sampah untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia.

Pengelolaan sampah di Indonesia masih sebatas kumpul-angkut-buang atau pemusnahan dengan cara pembakaran tanpa ada pengelolaan. Sehingga menimbulkan tempat pembuangan sampah liar yang justru akan memperberat kerja Pemerintah Daerah dalam penanganan sampah. Tidak hanya itu dengan teknik pembakaran juga akan mengakibatkan pemanasan global (*global warming*). Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sampah yang memandang bahwa sampah dapat dijadikan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan (Djohan dan Halim, 2013 : 10). Upaya lain dalam pengelolaan sampah yaitu melalui program-program pengelolaan sampah yang partisipatif yaitu mengikutsertakan peran masyarakat serta melibatkan pihak swasta untuk mendukung dalam pengelolaan sampah. Beberapa daerah yang mengembangkan program pengelolaan sampah antara lain: Makassar dengan programnya “Inovasi Pengembangan Bank Sampah Sistem *On-Line*”; Program Inovasi Pengelolaan Sampah Di Kota Malang; Jakarta dengan programnya yaitu “Pengembangan Pariwisata Melalui Pengelolaan Sampah Berbudaya; di Kota Probolinggo sendiri mengembangkan pengelolaan sampah yang berbasis partisipatif yang dilakukan secara sinergi (terpadu) melibatkan beberapa elemen (Pemerintah, Masyarakat RT/RW, LSM, Pengusaha/Swasta, Sekolah dan komponen lain yang terkait).

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri melainkan melibatkan *stakeholders* lainnya. *Stakeholders* dalam pembangunan secara lengkap disebutkan sebagai politikus dan pemerintah, planner, pengusaha, penduduk/masyarakat, pers, LSM, dan informal leader (Haryanto dalam Krisnandar, 2013). Sebagaimana pada proses pembangunan lainnya maka *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan sampah adalah: Pemerintah, Masyarakat, Swasta, para ahli dan akademisi (perencana profesional) (Haryanto, 2001). Dalam mencapai keberhasilan dalam pengelolaan sampah di daerah, perlu adanya sinergitas *stakeholders* yaitu hubungan secara harmoni antara pemerintah, masyarakat, swasta, para ahli dan akademisi. Dimana masing-masing *stakeholders* akan berinteraksi satu sama lain sesuai dengan fungsi dan perannya. Seperti yang diungkapkan oleh Taufikurrahman (2015 : 22), sinergi yang dikerjakan bersama lebih baik hasilnya dari pada dikerjakan sendiri-sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan sesuatu produk yang lebih unggul. Oleh karena itu seluruh komponen masyarakat dan pemerintah diharapkan bersinergi agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Kota Probolinggo merupakan salah satu kota yang tidak lepas dari permasalahan pengelolaan lingkungan, khususnya pengelolaan persampahan yang diatur kedalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Dampak dari perkembangan pembangunan Kota Probolinggo yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, aktivitas penduduk yang semakin meningkat, dan kebiasaan buruk masyarakat yang masih membuang sampah di sembarang tempat seperti sungai, selokan, jalan raya dan

sebagainya sehingga mengakibatkan jumlah timbunan sampah meningkat, lingkungan menjadi terlihat kumuh, kotor dan jorok yang menjadi tempat berkembang *organism pathogen* yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Jumlah penduduk Kota Probolinggo yang mencapai ± 219.687 jiwa, sehingga tidak sedikit sampah yang dihasilkan. Berdasarkan hasil survei Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo tahun 2015, limbah sampah per orang mencapai rata rata 2,5 kg/hari, dan total keseluruhan limbah sampah di Kota Probolinggo dari limbah warga mencapai 30-40 ton/hari.

Dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo menganggarkan kebersihan / persampahan dan TPA yang mencapai 20% dari anggaran pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 1. Jumlah Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Anggaran Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan Kota Probolinggo 2012-2014

No	Uraian	2012	2013	2014
1	Anggaran Pemerintah Kota Bidang Lingkungan Hidup (LH)	Rp 34.775.152.241	Rp 51.334.423.909	Rp 62.714.205.962
2	Anggaran Pengelolaan Kebersihan/persampahan dan TPA	Rp 6.550.915.190	Rp 5.056.000.000	Rp 11.007.215.382

Sumber: BLH Kota Probolinggo, 2016.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk alokasi anggaran pengelolaan lingkungan hidup dari tahun ke tahun semakin meningkat. Bahkan untuk anggaran pengelolaan kebersihan/ persampahan dan TPA tahun 2014 mengalami peningkatan 2x lipat dari tahun 2013 meskipun dari tahun 2012-2013 mengalami penurunan.

Konsep pengelolaan sampah di Kota Probolinggo yaitu pengelolaan sampah yang berbasis partisipatif yang dilakukan secara sinergi (terpadu) melibatkan beberapa elemen (Pemerintah, Masyarakat RT/RW, LSM, Pengusaha/Swasta, Sekolah dan komponen lain yang terkait) dengan mengembangkan program-program pengelolaan sampah yang dikembangkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo. Adapun program-program pengelolaan sampah di Kota Probolinggo, antara lain:

- 1) Ayo Bersepeda Bersihkan Sampah (ABBS)
- 2) Kita Bersama Bersihkan Sampah (KB2S2)
- 3) Pengembangan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) Skala Kawasan
- 4) Pelatihan-pelatihan Pemanfaatan Sampah
- 5) Bank Sampah dan *Green Barter*

Program-program tersebut bertujuan supaya masyarakat dapat terlibat langsung dan aktif hingga secara bertahap masyarakat dapat mandiri dalam mengelola sampah.

BLH Kota Probolinggo juga telah memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan mulai dari proses pembentukan hingga pelaksanaan kegiatan mitra-mitra kerja peduli lingkungan dalam pengelolaan sampah. Adapun mitra-mitra yang dibentuk BLH Kota Probolinggo, antara lain:

- 1) Forum Jaringan Manajemen Sampah (FORJAMANSA)
- 2) Kelompok Masyarakat (POKMAS)
- 3) Paguyuban Peduli Sampah (PAPESA)
- 4) Paguyuban Penarik Gerobak Sampah (PGS) Ceria

- 5) Paguyuban Masyarakat Pasar Peduli Sampah
- 6) Paguyuban Pemulung Peduli Lingkungan
- 7) Paguyuban Pedagang Kali Lima (PKL) Peduli Sampah

Mitra-mitra tersebut merupakan wadah serta ruang bagi masyarakat untuk dapat turut serta dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan sekaligus juga untuk menyinergikan berbagai potensi yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan. Pemerintah Kota Probolinggo juga bekerjasama dengan Yayasan Danamon Peduli dengan meluncurkan unit pengolahan sampah pasar menjadi pupuk organik berkualitas tinggi di TPS Ungup-Ungup Probolinggo.

Sejauh ini, pengelolaan sampah di Kota Probolinggo cukup baik dimana Kota Probolinggo telah mendapatkan penghargaan berupa Piala Adipura selama kurun waktu sembilan tahun (2006-2015). Inovasi Pemkot Probolinggo di bidang lingkungan diakui secara nasional bahkan lembaga dari luar negeri termasuk dalam pengelolaan sampah dimana menurut salah saumber di bagian UPT Pengolahan Sampah dan Limbah menyebutkan bahwa baik dari daerah lain bahkan dari luar negeri banyak yang mengunjungi TPA Kota Probolinggo untuk melihat bagaimana proses pengelolaan sampah di Kota Probolinggo sehingga bisa mereka terapkan proses pengelolaan sampah di kota mereka sendiri. Setidaknya pada tahun 2014 terdapat 34 Instansi/Dinas dan pada tahun 2015 terdapat 29 Instansi/Dinas yang mengunjungi TPA Kota Probolinggo. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Probolinggo mempunyai komitmen dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup sehingga membuat Kota Probolinggo dikenal oleh banyak daerah.

TPA Kota Probolinggo yang terletak di jalan Anggrek Mayangan yang memiliki luas 4 hektar ini menggunakan sistem *sanitary landfill*, yaitu sistem penimbunan sampah secara berlapis-lapis lalu sampah ditutup tanah secara bertahap, dengan sistem ini, maka mencegah timbulnya bau tidak sedap yang ditimbulkan oleh sampah dan minimnya perkembangan vektor penyakit seperti lalat. Volume sampah yang masuk ke TPA setiap hari sekitar 42,70 ton/hari yang berasal dari perumahan, industri, pasar, toko, restoran, taman, pengairan dan rumah sakit. TPA ini juga bekerjasama dengan Paguyuban Peduli Sampah (PAPESA) melalui sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas. Sasaran komunitas ini melalui pengelolaan sampah dengan cara pemilihan dan pengelolaan.

Kelebihan dari pengelolaan sampah di Kota Probolinggo adalah sampah diolah menjadi pupuk organik dan kemudian dimanfaatkan untuk memupuk taman-taman di Kota Probolinggo sehingga terbangun sinergitas program dan kemandirian pupuk, tidak menutup kemungkinan jika dikemudian hari pengelolaan sampah menjadi pupuk organik ini bisa menjadi unit pendapatan sendiri bagi Kota Probolinggo. Pada tahun 2010, telah disosialisasikan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) yang diharapkan dapat menunjang percepatan pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. TPST ini untuk kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilihan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah di Kota Probolinggo cukup berhasil. Keberhasilan dalam pengelolaan sampah tidak lepas dari peran Pemerintah saja melainkan peran serta

masyarakat dan keterlibatan pihak swasta juga. Namun kendalanya di lingkungan sekitar Kota Probolinggo masih ditemukan permasalahan, seperti masih adanya beberapa masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai; rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri; terbatasnya sarana dan prasana untuk mengelola sampah; serta masih adanya tugas-tugas kebersihan yang terlambat untuk mengangkut sampah.

Stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo, peneliti akan membahas 3 (tiga) aktor yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, pemerintah yang dimaksud adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo yang telah menjalankan tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di lingkungan hidup dengan mengembangkan berbagai program pengelolaan lingkungan hidup termasuk persampahan dan UPT Pengolahan Sampah dan Limbah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup (BLH) di bidang Teknis Pengolahan Sampah dan Limbah.; sektor swasta yang dimaksud yaitu Yayasan Danamon Peduli, yang mempunyai peran dalam menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Probolinggo dalam pengelolaan sampah; serta masyarakat baik dari individu, LSM, sekolah, dll yang mempunyai hak dan kesempatan untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan sampah serta mempunyai peran yaitu pengawasan sosial yang berupa saran, pendapat, usul keberatan, pengaduan/penyampaian informasi serta laporan.

Dalam pengelolaan sampah dibutuhkan sinergitas antar *stakeholders* karena sinergitas antar *stakeholders* penting demi tercapainya tujuan dari program

pengelolaan sampah di Kota Probolinggo serta dapat menyelesaikan permasalahan sampah. Selain itu, sinergitas berfokus pada peran dan tujuan bersama yang ingin dicapai melalui pencapaian hasil dari masing-masing *stakeholders*. Namun kunci untuk tercapainya sinergitas adalah koordinasi dan komunikasi, sebab tanpa koordinasi dan komunikasi pasti berat sekali untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Oleh Karena itu, BLH Kota Probolinggo melakukan koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholders* lainnya yang sama-sama memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan supaya tujuan mereka dalam kebersihan lingkungan dapat tercapai dan dapat menuntaskan permasalahan sampah yang terjadi di Kota Probolinggo. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada **Sinergitas Stakeholders dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Probolinggo.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan sampah di Kota Probolinggo?
2. Bagaimana sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang diajukan di atas, tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan sampah di Kota Probolinggo
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo.
3. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas, dan dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam mengevaluasi proses pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. Serta sebagai rujukan

setiap pemerintah di Indonesia untuk dapat menyusun kebijakan serta melibatkan berbagai *stakeholders* (pemerintah, swasta dan masyarakat) dengan tujuan agar pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tetap mendapatkan legitimasi dari berbagai kalangan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu susunan keseluruhan dari suatu karya ilmiah yang disusun secara garis besar dengan tujuan untuk memudahkan pembaca mengetahui substansi yang terkandung di dalam karya ilmiah. Berdasarkan susunanya, karya ilmiah berupa proposal ini diuraikan ke dalam tiga bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan teori-teori yang relevan dijadikan sebagai dasar atau pedoman dalam penyusunan karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok pembahasan sehingga dapat mendukung dalam menganalisa dan menginterpretasikan data mengenai sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah. Teori yang digunakan dalam karya ilmiah ini antara lain:

Administrasi Publik, *Governance*, *Stakeholders*, Konsep
Sinergitas dan Pengelolaan Sampah.

BAB III : METODE PENELITIAN

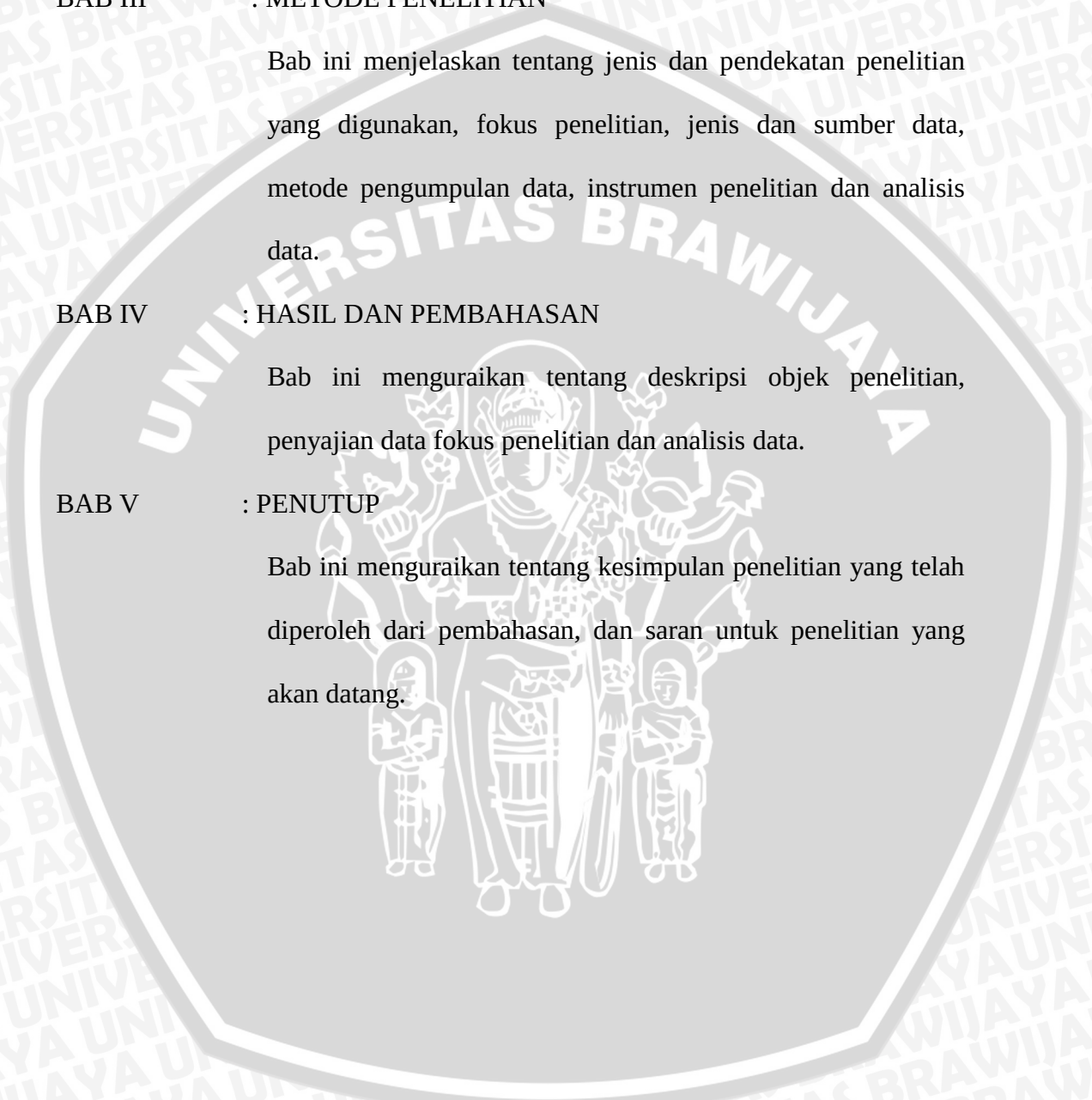
Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, fokus penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, penyajian data fokus penelitian dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penelitian yang telah diperoleh dari pembahasan, dan saran untuk penelitian yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dengan penelitian yang akan penulis kaji, maka penulis akan mengambil beberapa sumber referensi yang bisa dijadikan acuan saat melakukan penelitian.

Referensi yang bisa diambil, yaitu:

A. Administrasi Publik

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “ad” dan “ministrate” yang berarti “to serve” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi (Pasolong: 2011 : 2). Administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik (pendapat Dunsire yang dikutip ulang oleh Keban, 2008 : 2). Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafi’ie dkk dalam Pasolong, 2011 :6).

Administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam

kebijakan publik (Chandler dan Plano dalam Keban, 2008 : 4). Sedangkan Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008: 4). Dalam penyelenggaraan semua kepentingan publik (*public interest and public affairs*) dan masalah publik (*public administration*) yang ada pada suatu negara merupakan ruang lingkup kegiatan administrasi publik. Seperti yang ditegaskan oleh Caiden bahwa administrasi publik merupakan seluruh kegiatan administrasi untuk segenap urusan publik (*administration for the public affairs*) (Mindarti, 2007 : 3),.

Luasnya bidang persoalan aktifitas administrasi publik tidak hanya mencakup aktifitas lembaga eksekutif tetapi juga mencakup aktifitas yang berkenaan dengan hal-hal yang berifat kepublikan yang diselenggarakan oleh lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif (Pamuji dalam Mindarti, 2007 : 4). Oleh karena itu, dalam pengertian paling luas administrasi publik adalah suatu proses kerjasama dalam lingkungan pemerintahan yang meliputi ketiga cabang pemerintahan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Nigro dan Nigro dalam Mindarti, 2007 : 4). Secara operasional, penyelenggaraan urusan publik dan kepentingan publik umumnya lebih banyak dilakukan oleh “birokrasi pemerintah” (*public bureaucracy*) yang ada di lingkungan eksekutif. Oleh karena itu, dalam

arti sempit administrasi publik dapat didefinisikan sebagai kegiatan eksekutif dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan (Dimock dan Koenig dalam Mindarti, 2007 : 4).

Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut *governance*. *Governance* berkaitan dengan pentingnya pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang dicirikan dengan adanya empat komponen pokok, yaitu (1) legitimasi (mendapatkan persetujuan dan pengakuan dari yang diperintah/rakyat); (2) akuntabilitas (adanya mekanisme menjamin para pejabat publik dan pemimpin politik bertanggung jawab terhadap tindakan yang diambil dan dalam penggunaan sumber daya publik, terbuka, dan media massa yang bebas); (3) kompeten (mampu membuat dan melaksanakan kebijakan publik dengan tepat dan memeberikan pelayanan publik yang efisien); (4) menghargai hukum dan perlindungan terhadap HAM sebagai penopang seluruh sistem pemerintahan yang baik (Wiharso dalam Mindarti, 2007: 178). Administrasi publik dalam konteks *governance* didefinisikan sebagai proses penggunaan kekuasaan administratif, politik, dan ekonomi untuk menyelesaikan masalah-masalah publik (Dwiyanto dalam Mindarti, 2007 : 195)

Berdasarkan dari konsep diatas, administrasi publik dapat diartikan sebagai proses penyelenggaraan semua kepentingan publik (*public goods an service*) yang dilakukan pemerintah (birokrasi pemerintah) berupa keputusan-keputusan dalam kebijakan publik mulai dari diformulasikan, diimplementasikan hingga dikelola yang diperuntukkan untuk masyarakat. *Governance* berfokus pada proses penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Pengelolaan sampah di Kota

Probolinggo sebagai bentuk kebijakan publik yang diselenggarakan pemerintah dalam memberikan kepuasan / pelayanan terhadap masyarakat dalam aspek persampahan di Kota Probolinggo.

B. Governance

Dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah terdapat tiga kaki utama (*three legs*) dan tiga domain utama (*three legs*). Ketiga kaki utama yang dimaksud adalah *political governance*, *economic governance*, dan *administrative governance*. *Political governance* lebih mengacu pada proses pembuatan kebijakan. *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Sementara itu, *administrative governance* lebih mengacu pada sistem implementasi kebijakan (Mindarti, 2007 : 179)

Tiga domain utama yang dimaksud mencakup unsur negara (*state*), swasta (*private sector*) dan masyarakat sipil (*civil society*).

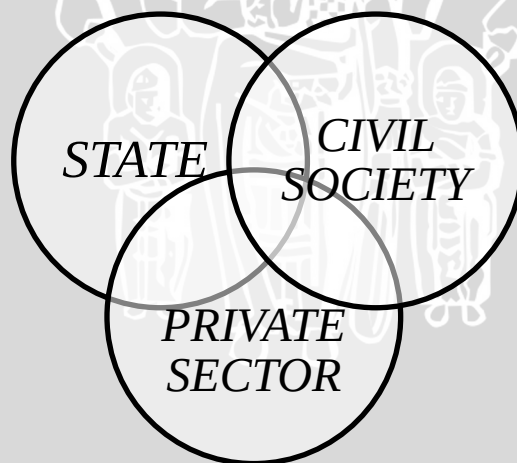
- 1) Negara (*state*), pada masa mendatang memiliki tugas penting, yakni mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan dengan mendefinisikan kembali peran pemerintahan dalam mengintegrasikan kehidupan sosial, ekonomi dan perlindungan lingkungan, melindungi masyarakat dari kerentanan, menciptakan komitmen politik, menyediakan infrastruktur, melakukan desentralisasi dan demokratisasi pemerintahan, memperkuat finansial dan kapasitas administratif pemerintah lokal, yakni kota

dan metropolitan. Institusi pemerintah juga perlu memberdayakan rakyat. Mereka dituntut untuk mampu memberikan layanan untuk semua dan menjamin kesempatan yang sama baik dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Semua kondisi ini akan tercapai apabila didukung dengan suatu lingkungan kelembagaan yang kondusif, baik yang menyangkut sistem dan proses legislasi dan yudisial yang tepat, legal, terpercaya, dan efektif.

- 2) Pasar sektor swasta (*private sector*), memiliki peran penting dalam pembangunan dengan menggunakan pendekatan pasar. Pendekatan pasar untuk pembangunan ekonomi berkaitan dengan penciptaan kondisi yang kondusif sehingga produksi barang dan jasa berjalan dengan baik. Kondisi ini membutuhkan adanya dukungan lingkungan yang mapan untuk melakukan aktivitas swasta dalam bingkai berfungsinya insentif dan *reward* ekonomi, baik bagi individu maupun organisasi yang memiliki kinerja baik.
- 3) Organisasi masyarakat sipil (*civil society*) adalah terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan tidak hanya tergantung kepada berfungsinya negara dan sektor swasta dengan baik, namun juga pada kondisi masyarakat sipil yang mampu memfasilitasi interaksi sosial politik dan mampu memobilisasi berbagai kelompok di dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktifitas sosial, ekonomi, dan politik. Organisasi masyarakat sipil tidak sekadar melakukan *check and balance* terhadap kekuatan negara dan swasta tetapi juga dapat memberikan kontribusi dan memperkuat kedua unsur utama yang lainnya tersebut. Organisasi masyarakat sipil juga dapat menyalurkan partisipasi publik dalam aktivitas sosial dan ekonomi dan mengorganisasikan

publik untuk memengaruhi proses kebijakan publik. mereka juga berperan penting untuk mengurangi dampak potensial dari ketidakstabilan ekonomi, menciptakan mekanisme alokasi manfaat sosial dan menyalurkan suara kelompok masyarakat miskin dalam pembuatan kebijakan publik dan pemerintahan (Mindarti, 2007 : 180-181).

Ketiga komponen (unsur) pemerintahan yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta harus berhubungan secara harmonis untuk mencapai adanya sinergi. Hubungan yang harmonis dan sinergi antarketiga komponen pemerintahan ini akan tercapai apabila ketiganya memiliki kesamaan derajat dan peran serta mampu melakukan saling kontrol yang efektif satu sama lain. Hubungan yang harmonis (sinergis) antar ketiga komponen *governance* tersebut dapat diilustrasikan pada bagan seperti berikut:



Gambar 1 Keseimbangan Hubungan Tiga Komponen Governance

Sumber: LAN & BPKP (dalam Mindarti, 2007 : 187).

Berdasarkan gambar diatas, mengartikan bahwa *governance* terdapat interaksi dalam ketiga aktor tersebut yang tidak saling mendominasi satu dengan yang

lainnya. Oleh karena itu pemerintah bukanlah aktor satu-satunya dalam suatu tata pemerintahan. Dengan adanya interaksi antar *stakeholders* tersebut berarti ada kesempatan yang sama dalam pemerintahan khususnya dalam pelaksanaan program-program pemerintah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *governance* merupakan proses dari penyelenggaraan pemerintahan yang elemennya mencakup pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Probolinggo mencakup pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Adanya interaksi antar *stakeholders* yang mempunyai peran dan kesempatan yang sama dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo.

C. Stakeholders

Stakeholders menurut Freeman dan Reed dalam Yuniarti (2007:16) yaitu “any identifiable group or individual who can affect the achievement of an organisation’s objectives, or is affected by the achievement of an organisation’s objectives”. *Stakeholders* yaitu sebagai individu-individu dan kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh tercapainya tujuan-tujuan organisasi dan pada gilirannya dapat mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Menurut Budimanta, dkk (2008:46), mengatakan bahwa individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai *stakeholders* jika memiliki karakteristik yaitu kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan.

Menurut Bryson (2003:60) *stakeholders* didefinisikan sebagai orang, kelompok, atau organisasi apapun yang dapat melakukan klaim atau perhatian,

sumber daya, atau hasil (output) organisasi, atau dipengaruhi oleh hasil itu. *Stakeholder* menurut Gregory (2004:144) adalah kelompok yang tertarik pada organisasi. Meskipun setiap organisasi memiliki masing-masing *stakeholdernya* tersendiri namun mereka sebenarnya terlihat sangat jelas. Contohnya adalah pemilik/pemegang saham, pelanggan, pemasok, pesaing, LSM dan kelompok penekan, pemerintah, dan komunitas tertentu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *stakeholders* merupakan suatu masyarakat, kelompok, komunitas atau individu manusia yang memiliki hubungan, tujuan, kekuasaan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Kasali dalam Wijaya (2015: 17) membagi *stakeholders* menjadi sebagai berikut:

1. *Stakeholders Internal* dan *stakeholders eksternal*.

Stakeholders internal adalah *stakeholders* yang berada di dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (*shareholder*). Sedangkan *stakeholders* eksternal adalah *stakeholders* yang berada di luar lingkungan organisasi, seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok sosial, *responsible investor*, *licensing partner* dan lain-lain.

2. *Stakeholders primer*, *sekunder* dan *marjinal*.

Tidak semua elemen dalam *stakeholders* perlu diperhatikan. Perusahaan perlu menyusun skala prioritas. *Stakeholders* yang paling penting disebut *stakeholders* primer, *stakeholders* yang kurang penting disebut *stakeholders* sekunder dan yang biasa diabaikan disebut *stakeholders marjinal*. Urutan

prioritas ini berbeda bagi setiap perusahaan meskipun produk atau jasanya sama. Urutan ini juga bisa berubah dari waktu ke waktu.

3. *Stakeholders* tradisional dan *stakeholders* masa depan.

Karyawan dan konsumen dapat disebut sebagai *stakeholders* tradisional, karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan *stakeholders* masa depan adalah *stakeholders* pada masayang akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti dan konsumen potensial.

4. *Proponents*, *opponents*, dan *uncommitted*.

Diantara *stakeholders* ada kelompok yang memihak organisasi (*proponents*), menentang organisasi (*opponents*) dan ada yang tidak peduli atau abai (*uncommitted*). Organisasi perlu mengenal *stakeholders* yang berbeda-beda ini agar dapat melihat permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proposional.

5. *Silent majority* dan *vokal minority*.

Dilihat dari aktivitas *stakeholders* dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan pertentangan atau dukungannya secara vokal (aktif) namun ada pula yang menyatakan secara silent (pasif).

Dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah di Kota Probolinggo, jelas bahwa *stakeholders* yang terlibat yaitu Pemerintah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, Sektor Swasta yang merupakan Yayaan

Peduli Danamon dan Masyarakat yang meliputi siswa-siswa sekolah, LSM, Kelompok Masyarakat, dll.

D. Konsep Sinergitas

1. Pengertian Sinergi

Dalam Kamus Besar Indonesia (1990), sinergi diartikan sebagai kerjasama antara orang atau organisasi yang hasil keseluruhannya lebih besar dari pada jumlah hasil yang dicapai jika masing-masing bekerja sendiri. Sinergi berasal dari kata *synergos* yang berarti bekerja bersama-sama. Sinergi berarti melakukan kegiatan secara bersama-sama ini tentunya memerlukan koordinasi yang baik, perasaan saling memberi, saling menguntungkan dan saling membutuhkan untuk mencapai suatu maksud tertentu yang telah disepakati bersama (Podugge, 2009:47). Menurut Pamudji (1985:12), mengatakan bahwa pada hakikatnya kerjasama (sinergi) mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi dan menjalin hubungan yang bersifat dinamis guna mencapai tujuan bersama. Dalam setiap kerjasama terdapat tiga unsur penting yaitu:

- 1) adanya dua pihak atau lebih,
- 2) adanya unsur interaksi,
- 3) adanya unsur tujuan bersama.

Menurut Lasker, Weiss dan Miller dalam Wijaya (2001: 5), sinergi adalah *The power to combine the perspectives, resources, and skills of a group of people and organization*. Konsep sinergi merupakan kekuatan untuk mengkombinasikan perspektif-perspektif, sumber daya, dan keahlian dari sekelompok orang atau

organisasi. Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa sinergi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau organisasi dengan memadukan setiap pemikiran anggota kelompok dalam rangka untuk mencapai satu tujuan bersama.

Konsep sinergi juga mempunyai kesamaan dengan konsep *governance*. Konsep *governance* oleh Endarti dalam Pratiwi (2013: 1019) menyebutkan bahwa ada proses penyalarsan, kesetaraan, persatuan dan keseimbangan peran dan kontrol yang dilakukan oleh tiga komponen, yaitu pemerintah, masyarakat dan privat. Konsep *governance* memfasilitasi sinergi dari berbagai pihak dalam mengatasi masalah. Konsep sinergi berdasarkan teori *governance* yaitu lokus dan fokus pada sinergi peran dari beberapa aktor atau organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini lokus dan fokus pada sinergi yaitu peran dari aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo.

Dalam menjalin sinergitas dari beberapa aktor yang terlibat dapat terbangun melalui 2 (dua) cara yaitu (Pratiwi, 2015:15) :

a. Komunikasi

Sofyandi dan Garniwa dalam Pratiwi (2015:15), pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu:

- 1) Pengertian komunikasi yang berorientasi pada sumber menyatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan.

- 2) Pengertian komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa komunikasi sebagai semua kegiatan di mana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

b. Koordinasi

Di samping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Hasan bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi. Silalahi dalam Pratiwi (2015:16), “Koordinasi adalah dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama”. Moekijat (1994 :39) menyebutkan ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu:

- 1) Hubungan langsung

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.

- 2) Kesempatan awal

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.

- 3) Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.

- 4) Dinamisme

Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.

- 5) Tujuan yang jelas

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.

6) Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.

7) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan.

8) Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik.

9) Kepemimpinan yang efektif

Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat.

2. Jenis Sinergi Kelembagaan

Sinergi kelembagaan, baik antar kelembagaan Negara dan/atau instansi pemerintahan maupun dengan organisasi masyarakat madani sesungguhnya telah lama menjadi pusat perhatian di negara-negara demokrasi modern. Negara-negara maju yang menerapkan sistem demokrasi modern yang tergabung dalam OCED atau *Organisation for Economic Cooperation and Development* menyatakan bahwa sinergi kelembagaan ikut menentukan suksesnya pelaksanaan pembangunan. OCED atau *Organisation for Economic Cooperation and Development* mendefinisikan beberapa jenis sinergi yaitu: (Silalahi, 2012)

1) Sinergi Horizontal

Sinergi horizontal yaitu semua bentuk sinergi, koordinasi dan sinkronisasi antar kelembagaan negara dan /atau instansi pemerintahan yang ditujukan untuk meminimalkan semua potensi dan peluang inkonsistensi penerapan kebijakan publik yang digagas oleh masing-masing instansi pada sektor tertentu. Sinergi horizontal juga ditujukan untuk mencegah semua bentuk pertentangan dari pencapaian tujuan kebijakan publik yang bersifat lintas sektoral melalui dialog yang lebih sistematis antar komunitas kebijakan publik yang berbeda. Sinergi horizontal merupakan salah satu pilar penting yang mencerminkan pemerintahan yang kokoh, kuat, tangguh dan berwibawa.

Beberapa langkah pendekatan pada pemeliharaan dan pemantapan sinergi horizontal antar kelembagaan negara dan/atau instansi pemerintahan, antara lain adalah dengan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan pembangunan telah dilibatkan pada proses penetapan kebijakan guna mengurangi risiko konflik kebijakan; perluasan dan percepatan fasilitasi komunikasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan; pengawasan kolektif pada pelaksanaan berbagai kebijakan publik; penetapan mediator dan arbiter diantara kalangan pemerintahan guna memfasilitasi penerapan kebijakan yang koheren dan efektif serta pemeliharaan hubungan kerja yang bersifat kolaboratif antar semua sektor pemerintahan.

2) Sinergi Vertikal

Yaitu semua bentuk sinergi koordinasi, dan sinkronisasi antar unit kerja di dalam sebuah kelembagaan negara dan/atau instansi pemerintahan guna

memberikan pelayanan publik yang terbaik. Sinergi vertikal ditujukan utamanya untuk mencegah semua bentuk inkonsistensi internal dalam sebuah instansi, khususnya pada lingkup pemberian layanan publik yang bersifat sektoral. Sinergi vertikal adalah pilar penting pemerintahan yang kredibel dan akuntabel dalam pemberian layanan bagi para pemangku kepentingan pembangunan.

Untuk memantapkan sinergi vertikal langkah pendekatan yang dapat ditempuh antara lain, adalah dengan menerapkan rezim manajemen kinerja dan evaluasi kebijakan, fasilitasi komunikasi kebijakan internal instansi pemerintahan dan pemeliharaan hubungan kerja yang bersifat kolaboratif antar seluruh unit kerja di instansi pemerintahan.

3) Sinergi Temporal

Yaitu semua bentuk sinergi dan koordinasi serta sinkronisasi antar kelembagaan negara dan/atau instansi pemerintahan baik yang bersifat eksternal maupun internal yang ditujukan untuk menyikapi isu dan kondisi yang bersifat insidentil dan kontijensi di tengah pelaksanaan agenda pembangunan. Sinergi temporal adalah pilar penting bagi pemerintahan yang tanggap, responsif dan antisipatif dalam menyikapi beragam dinamika pembangunan peradaban, khususnya yang bersifat gejala dan mendadak.

Pemantapan sinergi temporal dapat diupayakan dengan memperbesar kualitas sinergi vertikal dan horizontal antar instansi pemerintahan. Pemeliharaan sinergi temporal juga dapat dilakukan dengan memperbesar lingkup kerjasama kolaboratif instansi pemerintahan dengan beragam komponen masyarakat sipil.

E. Pengelolaan Sampah

1. Pengertian Sampah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut Rizal (2011 : 156), mengatakan bahwa secara umum masyarakat mengenal sampah sebagai sesuatu benda yang dihasilkan dari berbagai benda yang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi oleh manusia. Pengertian sampah dalam modul Materi Training Untuk Tingkat Staf Teknis Proyek PLP Sektor Persampahan dalam Rizal (2011 : 157) adalah “Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat, dari bahan organik dan atau anorganik, baik benda logam maupun bukan logam yang dapat terbakar dan yang tidak dapat terbakar”.

Berdasarkan rumusan pengertian dan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan limbah yang berasal dari bahan organik maupun anorganik yang berbentuk logam dan/ setengah logam yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang tidak dipergunakan kembali.

2. Jenis dan Sumbernya

Sumber-sumber sampah sebagai berikut (Kastaman, 2007:74):

- 1) Sampah buangan rumah tangga, termasuk sisa bahan makanan, sisa pembungkus makanan dan pembungkus perabotan rumah tangga sampai sisa tumbuhan kebun dan sebagainya.

- 2) Sampah buangan pasar dan tempat-tempat umum (warung, toko dan sebagainya) termasuk sisa makanan, sampah pembungkus makanan, dan pembungkus lainnya, sisa bangunan, sampah tanaman dan sebagainya.
- 3) Sampah buangan jalanan termasuk diantaranya sampah berupa debu jalan, sampah sisa tumbuhan taman, sampah pembungkus bahan makanan dan bahan lainnya, sampah sisa makanan, sampah berupa kotoran serta bangkai hewan.
- 4) Sampah industri termasuk diantaranya air limbah industri, debu industri. Sisa bahan baku dan bahan jadi dan sebagainya.

Sedangkan jenis-jenis sampah sebagai berikut (Kastaman, 2007:72):

- 1) Sampah basah (*Garbage*)

Adalah jenis sampah yang terdiri dari sisa-sisa potongan hewan atau sayur sayuran hasil dari pengolahan, pembuatan dan penyediaan makanan yang sebagian besar terdiri dari zat-zat yang mudah membusuk.

- 2) Sampah Kering (*Rubbish*)

Adalah jenis sampah yang dapat terbakar dan tidak dapat terbakar berasal dari rumah-rumah, pusat –pusat perdagangan, kantor-kantor. Sampah yang mudah terbakar umumnya terdiri dari zat-zat organik seperti kertas, karbon, kardus, plastik dan lain-lain. Sedangkan sampah yang tidak dapat atau sukar terbakar sebagian besar mengandung zat-zat inorganik seperti logam-logam, kaleng-kaleng dan sisa pembakaran.

3) Abu

Sampah jenis ini adalah sampah yang berasal dari sisa pembakaran dari zat yang mudah terbakar seperti di rumah, kantor maupun di pabrik-pabrik industri.

4) Sampah Jalanan

Sampah jenis ini berasal dari pembersihan jalan dan trotoar baik dengan tenaga manusia maupun dengan tenaga mesin yang terdiri dari kertas, daun dan lain-lain.

5) Bangkai Binatang

Sampah jenis ini berupa sampah-sampah biologis yang berasal dari bangkai binatang yang mati karena alam, penyakit atau kecelakaan.

6) Sampah Rumah Tangga

Sampah jenis ini merupakan jenis sampah campuran yang terdiri dari *rubbish*, *garbage*, *ashes* yang berasal dari daerah perumahan.

7) Bangkai kendaraan

Adalah sampah yang berasal dari bangkai mobil, truk, kereta api.

8) Sampah Industri

Merupakan sampah padat yang berasal dari industri-industri pengolahan hasil bumi/tumbuh-tumbuhan dan industri lain.

9) Sampah Perumahan

Sampah yang berasal dari sisa pembangunan gedung, perbaikan dan pembaharuan gedung-gedung, sampah dari daerah ini berasal dari batu batuan, mengandung tanah, potongan kayu, alat perekat dan lain-lain.

10) Sampah Padat

Sampah yang terdiri dari benda-benda kasar yang umumnya zat organik hasil saringan pada pintu masuk suatu pengolahan air buangan.

11) Sampah Khusus

Jenis sampah yang memerlukan penanganan khusus misalnya kaleng cat, film bekas, zat radioaktif dan lain-lain.

3. Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengelolaan sampah diartikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dengan kata lain, sampah diharapkan bukan hanya menjadi sekadar sisa buangan saja, namun dapat dijadikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis (Djohan dan Halim, 2013 : 10).

Pengelolaan sampah yang dilakukan di Indonesia hanya sebatas kumpul-angkut-buang atau pemusnahan dengan cara pembakaran, bahkan tanpa pengelolaan sama sekali (membuang sampah sembarangan). Apabila pengelolaan sampah dengan konsep kumpul-angkut-buang masih dipertahankan pada tahun-tahun mendatang, maka akan memperberat tugas pemerintah daerah karena jumlah timbulan sampah yang meningkat dan juga munculnya tempat pembuangan sampah liar yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat serta

kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan sampah yang memandang bahwa sampah dapat dijadikan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan. Seperti yang diungkapkan oleh Djohan dan Halim (2013 : 11), bahwa pengurangan sampah dapat dilakukan melalui kegiatan 3R yaitu *reduce* (pengurangan), *reuse* (pemanfaatan kembali), dan *recycle* (pendauran ulang), sedangkan dalam penanganan sampah dapat dilakukan melalui kegiatan meliputi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pengelolaan sampah juga dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan cara mengolah sampah menjadi pupuk yang memiliki nilai ekonomis.

Sampah yang dikelola di Kota Probolinggo yang telah diatur kedalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah, terdiri atas:

- 1) Sampah rumah tangga, sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
- 2) Sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya
- 3) Sampah spesifik, sampah yang meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. Puing bongkaran bangunan;

- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
- f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Sedangkan dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Walikota Kota Probolinggo Nomor 3 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan tindakan sebagai berikut:

1) Pengurangan sampah

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

Dalam pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- b. Fasilitas kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

2) Penanganan sampah

Penanganan sampah dapat dilakukan dengan cara:

a. Pemilahan

Pemilahan dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga dengan jenis sampah. Pemilahan sampah dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

b. Pengumpulan

Pengumpulan dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

c. Pengangkutan

Pengangkutan sampah dilakukan dengan menggunakan sarana pengangkutan dan peralatan berat seperti: (1) truk sampah besar (untuk mengangkut sampah dari 26 TPS mini yang ada di Kota Probolinggo); (2) dump truk (untuk mengangkut sampah dari depo dan 13 TPS Permanen); (3) *armroll truck* (untuk mengangkut 29 unit container yang tersebar di wilayah Kota Probolinggo), (4) *colt pick-up* (untuk melakukan penyisiran sampah liar, pelayanan/tindak lanjut pengaduan masyarakat, penyisiran serta untuk mobilisasi personil dalam berbagai kegiatan kerja bhakti oleh petugas kebersihan); (5) kendaraan roda tiga sebagai sarana operasional pengumpulan sampah yang ada di jalan protokol, pertokoan, pasar dan berbagai fasilitas umum serta untuk mengangkut sampah organik yang dikumpulkan oleh masyarakat melalui kelompok masyarakat (POKMAS) pengumpulan dan pemilahan sampah; (6) becak sampah (sebagai sarana mengumpulkan sampah dari bak-bak sampah yang terdapat di rumah penduduk ke TPS terdekat yang memiliki fasilitas pemisahan yaitu sampah organik, sampah anorganik dan B3).

d. Pengolahan

Pengolahan sampah yang dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

e. Pemrosesan akhir sampah

Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Dalam pengelolaan sampah perlunya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan terutama masalah sampah seperti tidak membuang sampah disembarang tempat, memilah sampah rumah tangga, mampu mengelola sampah dengan mandiri.

4. *Stakeholders* Pengelolaan Sampah

Stakeholders dalam pembangunan secara lengkap disebutkan sebagai politikus dan pemerintah, planner, pengusaha, penduduk/masyarakat, pers, LSM, dan informal leader(Haryanto, 2001:73). Sebagaimana pada proses pembangunan lainnya maka *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan sampah adalah: Pemerintah; Masyarakat; Swasta; Para ahli dan akademisi (perencana profesional). Masing-masing *stakeholders* akan berinteraksi satu sama lain sesuai dengan fungsi dan perannya. Adapun fungsi dan peran dasar dari masing-masing *stakeholders* antara lain : (Widyatmoko dan Moerdjoko, 2002 : 29)

- a) Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam merencanakan, membangun, dan mengelola infrastruktur sebagai penggerak pembangunan.
- b) Masyarakat berperan sebagai pengelola sampah, pemanfaat hasil dan proses.
- c) Swasta berperan sebagai penanam modal.
- d) Para ahli dan akademisi berperan sebagai perencana.
- e) LSM berperan sebagai pendamping dan fasilitator.

Peran dan fungsi tersebut, dalam perkembangannya dimungkinkan untuk berubah. Perubahan-perubahan ini terjadi sebagai adanya kemandirian masyarakat dalam mengelola persampahan di lingkungannya, konsekuensi dari penerapan konsep partisipatif dalam sistem pengelolaan sampah yang dirumuskan bersama. Penerapan konsep partisipatif memungkinkan masyarakat mengelola sampah rumah tangganya secara mandiri dengan dibantu oleh LSM sebagai fasilitator dan pendamping dalam kegiatan pengelolaan sampah masyarakat secara mandiri tersebut. Dengan demikian, kebijakan tidak lagi sepenuhnya di tangan pemerintah (Widyatmoko dan Moerdjoko, 2002 : 29).

Stakeholders dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo mencakup pemerintah, swasta dan masyarakat. Sedangkan para ahli dan akademisi sebagaimana yang diungkapkan oleh Widyatmoko dan Moerdjoko, peneliti beranggapan bahwa para ahli dan akademisi bisa saja termasuk dalam pemerintah itu sendiri bahkan bisa dari masyarakat maupun sektor swasta. Oleh karena itu, *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo terdiri dari

pemerintah, swasta dan masyarakat. Adapun fungsi dan peran dasar dari masing-masing *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo, antara lain:

1) Peran Pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, antara lain:

- a) Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b) Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c) Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d) Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- f) Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g) Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

2) Peran Masyarakat, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, antara lain:

- a) Pemberian laporan, usul, pertimbangan, dan/ atau saran kepada Pemerintah Daerah.
 - b) Pelaksanaan kegiatan penanganan yang dilakukan secara mandiri dan/ atau bermitra dengan Pemerintah Kota/Kabupaten.
 - c) Pemberian pendidikan, kampanye dan pelatihan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam penanganan sampah.
- 3) Peran Swasta, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, antara lain:
- a) Pemerintah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan swasta/badan usaha dalam penyelenggaraanPSP.
 - b) Kemitraan dapat dilakukan pada tahap pengangkutan, pengolahan, danpemrosesan akhir sampah pada sebagian atau seluruh wilayahpelayanan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell dalam Semiawan (2010 : 7), pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Selanjutnya menurut Moleong (2014:11), deskriptif merupakan laporan yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, catatan laporan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumentasi resmi lainnya. Penelitian deskriptif mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana kadang-kadang diberikan interpretasi atau analisis. Hasil penelitiannya difokuskan untuk memberikan gambaran keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti (Waluya, 2007: 90).

Dalam penelitian ini penulis berusaha menggambarkan bagaimana sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo melalui data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata hasil wawancara, dokumen, dan catatan-catatan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan, memaparkan, menerangkan, serta menafsirkan secara terperinci tentang sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Moleong (2014:7) adalah sebagai pusat perhatian yang dimaksud untuk membatasi suatu permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi pembiasan yang mempersepsikan dan mengkaji masalah yang diteliti. Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, fokus masalah penelitian menuntut peneliti melakukan pengkajian secara sistematis, mendalam, dan bermakna. Berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan, maka fokus penelitian ini adalah

1. Pengelolaan sampah di Kota Probolinggo
 - a. Penanganan sampah
 - b. Pengurangan sampah
2. Sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo, yang meliputi:
 - a. Peran *stakeholders*
 - b. Proses pencapaian sinergitas
 - c. Jenis sinergitas antara *Government*, *Civil Society* dan *Private Sector*
3. Faktor pendukung dan penghambat sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah, yaitu
 - a. Faktor pendukung sinergitas,
 - b. Faktor penghambat sinergitas.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi adalah tempat peneliti mengungkapkan keadaan sebenarnya obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kota Probolinggo sesuai dengan judul yang diangkat yaitu “Sinergitas *Stakeholders* dalam Pengelolaan Sampah di Kota Probolinggo”. Alasan pemilihan lokasi di Kota Probolinggo sebagai berikut:

- 1) Dalam kurun waktu 9 tahun (2006-2015) Kota Probolinggo telah menerima berbagai penghargaan dalam bidang Lingkungan Hidup sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Probolinggo.
- 2) Kota Probolinggo dijadikan contoh bagi daerah lain dalam program pengelolaan sampah dan program yang dilakukan di Kota Probolinggo ini merupakan program yang menyinergikan keterlibatan antar *stakeholders*.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh data atau informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan. Situs dari penelitian ini yaitu:

- 1) BLH Kota Probolinggo;
- 2) UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo;
- 3) Bank Sampah Bunda Peduli;
- 4) Bank Sampah Melati Berseri; dan
- 5) Kelompok Masyarakat (POKMAS) Nusa Indah.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah diperoleh dari hasil wawancara dengan *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. Adapun narasumber dalam wawancara meliputi:

- a. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo;
- b. Kepala UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah;
- c. Ketua Paguyuban Peduli Sampah;
- d. Ketua Bank Sampah Melati Berseri;
- e. Ketua Bank Sampah Bunda Peduli;
- f. Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS); dan
- g. Masyarakat yang bergabung dalam program pengelolaan sampah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan pelengkap atau penunjang sumber data primer, dikumpulkan dari data yang sesuai (Rahmawati, 2015:49). Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan, majalah, media massa cetak dan / elektronik, internet, jurnal ilmiah, dokumentasi tahun-tahun sebelumnya dan sekarang yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari:

- 1) Buku profil BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kota Probolinggo;

- 2) Dokumentasi yang diperoleh dari UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah, BANK SAMPAH, PAPESA (Paguyuban Peduli Sampah); dan
- 3) Jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan, baik langsung atau tidak langsung dengan sumber data (Pujileksono, 2015:123). Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada aparaturnya Pemerintahan Kota Probolinggo yaitu Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dan UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo, mitra kerja yaitu PAPESA (Paguyuban Peduli Sampah), POKMAS (Kelompok Masyarakat), serta beberapa masyarakat di Kota Probolinggo.

2. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada obyek penelitian (Pujileksono, 2015:12). Dalam penelitian ini jenis observasi yang digunakan yaitu observasi non-partisipan yaitu ketika seorang peneliti tidak terlibat aktif dalam kegiatan atau aktivitas grup, dan hanya sebagai pengamat pasif, melihat, mengamati, mendengarkan semua aktifitas dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut. Dalam hal ini, memungkinkan peneliti untuk mengamati sendiri kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. Peneliti akan melakukan observasi mengenai hubungan komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kota Probolinggo, masyarakat Kota Probolinggo dan mitra-mitra kerja dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo, serta melakukan observasi ke lokasi pengelola sampah di TPA Kota Probolinggo.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian

kualitatif. Dalam penelitian ini, dokumentasi berbentuk tulisan yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Sugiyono (2014: 222) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Berdasarkan pendapat diatas, maka instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri, artinya peneliti sebagai instrumen pengamat yang melakukan pengamatan, mencatat fenomena, objek yang terjadi, dengan dibekali peta, pengetahuan serta penguasaan terhadap permasalahan yang diteliti.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*) yaitu pedoman dalam melakukan wawancara dengan narasumber (sumber data primer) untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian. Wawancara akan dilakukan pada perangkat pemerintahan yaitu Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dan UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo, mitra kerja yaitu PAPESA (Paguyuban Peduli Sampah), POKMAS (Kelompok Masyarakat), serta beberapa masyarakat di Kota Probolinggo.
3. Catatan lapangan yaitu merupakan instrumen sebagai media untuk mencatat informasi yang didapat selama penelitian. Hasil catatan ini dianalisis sehingga nantinya dapat memberikan hasil tentang penelitian, terutama yang berkaitan

dengan sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh. Analisis data model Miles dan Huberman dilakukan melalui 3 tahap, yaitu (Pujileksono, 2015 : 152):

1) Reduksi Data (*Data Reduction*),

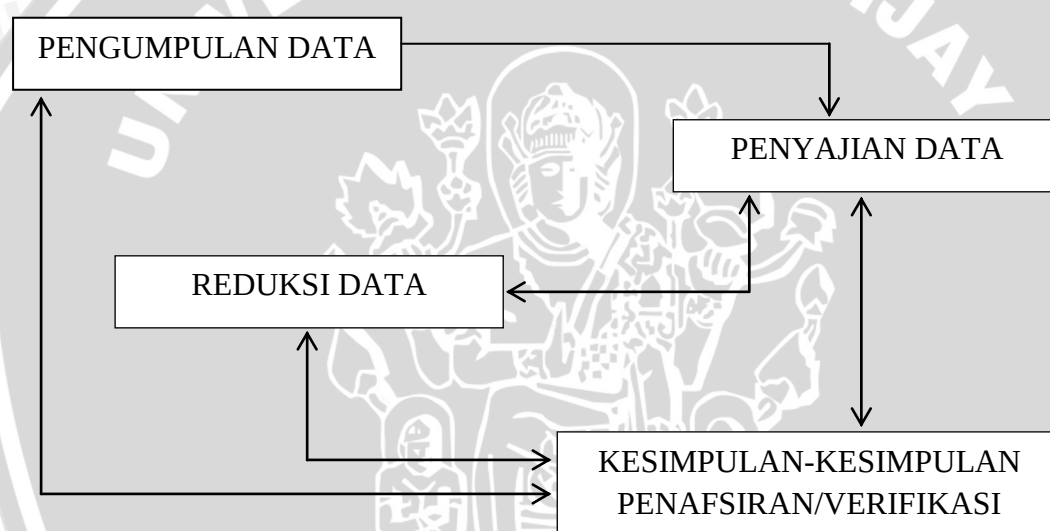
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian melalui penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2) Penyajian Data (*Data Display*),

Penyajian data berarti mendisplay/menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dsb. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing And Verification*).

Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang disajikan berupa deskripsi atau gambaran yang awalnya belum jelas menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal/interaktif dan hipotesis/teori. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah di lapangan. Berikut ini ditampilkan bagan analisis data:



Gambar 2 Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif

Sumber: Pujileksono (2015 : 153)

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa analisis data dimulai dari pengumpulan data. Hasil pengumpulan data tersebut kemudian direduksi data dengan cara memilah-milah ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu. Kemudian dilakukan penyajian data dalam bentuk tertentu seperti bentuk sketsa sinopsis, matriks atau bentuk-bentuk lain. Hal ini sangat diperlukan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan. Selain itu, yang terakhir dilakukan penarikan kesimpulan.

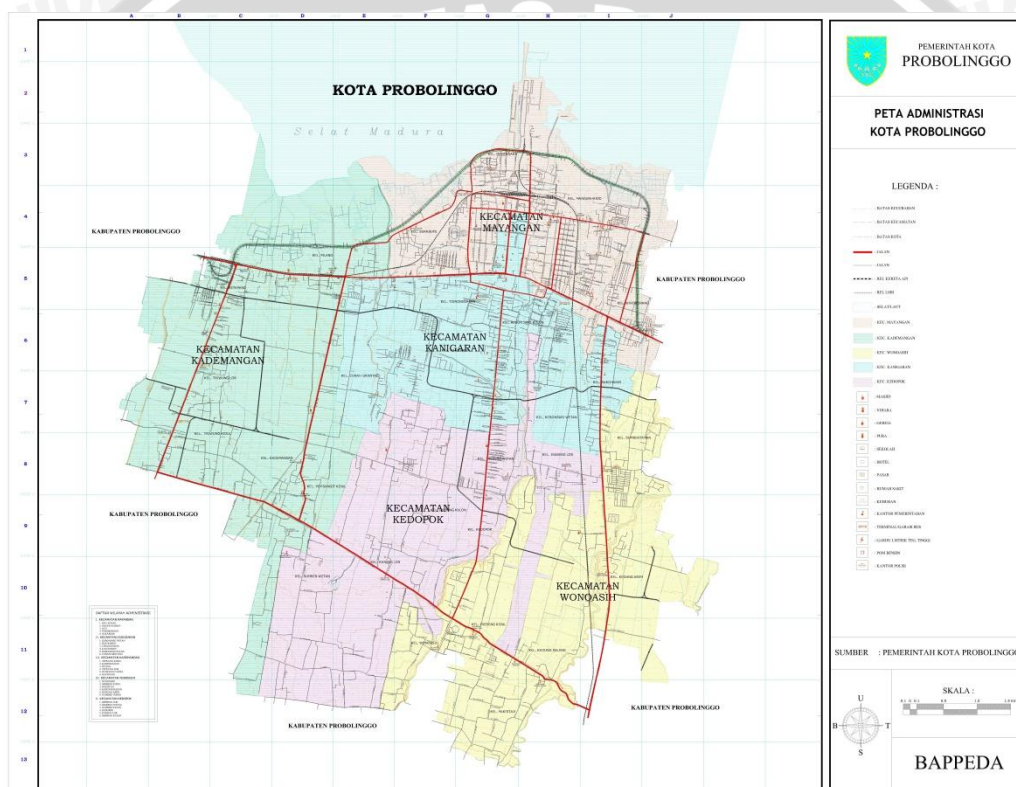
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Probolinggo

a. Keadaan Georafis Kota Probolinggo



Gambar 3 Peta Kota Probolinggo

Sumber: Probolinggokota.go.id

Kota Probolinggo adalah salah satu kota yang terletak di Propinsi Jawa Timur diantara 38 Kabupaten/Kota lainnya. Letak Kota Probolinggo berada pada $7^{\circ} 43' 41''$ sampai dengan $7^{\circ} 49' 04''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 10'$ sampai dengan $113^{\circ} 15'$ Bujur Timur dengan luas wilayah $56,667 \text{ Km}^2$. batas wilayah Kota Probolinggo, antara lain:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura,
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dringu wilayah Kabupaten Probolinggo.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Leces, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Sumberasih, yang ketiganya masuk wilayah Kabupaten Probolinggo,
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sumberasih wilayah Kabupaten Probolinggo

Luas wilayah Kota Probolinggo tercatat sebesar 56.667 Km², terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan dan 29 Kelurahan yang terdiri dari Kecamatan Mayangan terdapat 5 Kelurahan, Kecamatan Kademangan terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Kedopok terdapat 6 Kelurahan, dan Kecamatan Kanigaran terdapat 6 Kelurahan.

Menurut data dari Dinas Pertanian, luas wilayah Kota Probolinggo tercatat 5.666 Ha, pada tahun 2014 terdiri dari Lahan Sawah sebesar 1.832 Ha (32,33%), dan lahan bukan sawah untuk pertanian 929 Ha (16,39%) serta lahan bukan pertanian 2.906 Ha (51,28%). Wilayah Kota Probolinggo dialiri oleh 6 (enam) sungai, yaitu Kali Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah dan Pancur. Dengan rata-rata panjang aliran 3,80 Km, yang terpanjang adalah Sungai Legundi dengan panjang aliran 5,439 Km dan yang terpendek adalah Sungai Kasbah dengan panjang aliran hanya 2,037 Km. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun, mengalir dari arah selatan ke utara sesuai dengan kelerengannya wilayah.

b. Keadaan Demografi Kota Probolinggo

Kota Probolinggo terdiri dari masyarakat Jawa dan Madura dan beberapa etnis minoritas, diantaranya Tionghoa, Arab, dan penduduk pendatang dari daerah lainnya, dengan jumlah penduduk sebesar 220.038 jiwa dengan Sex Ratio 98,77. Kehidupan beragama di Kota Probolinggo sangat beragam dan toleran, dengan prosentasi mayoritas Islam sebanyak 96,84%, Kristen Katolik 1,19%, Protestan 1,45%, Buddha 0,46%, dan Hindu 0.04%. Jumlah penduduk Kota Probolinggo berdasarkan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana pada tahun 2008 adalah sebesar 216.833 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 107.569 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 109.264 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dan tingkat kepadatan penduduk Kota Probolinggo mencapai 3.813 jiwa setiap 1 km². Kondisi tenaga kerja di Kota Probolinggo tahun 2008 meliputi Angkatan Kerja sebanyak 13.195 orang. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo, pencari kerja terdaftar 13.195 orang, berhasil ditempatkan 912 orang, pencari kerja yang tidak melapor 538 orang, sehingga jumlah pencari kerja yang masih terdaftar hingga akhir tahun 2008 sebesar 11.745 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, 11.059 orang atau 83,81% pencari kerja yang terdaftar berpendidikan minimal SLTA.

c. Visi dan Misi Kota Probolinggo

Visi Kota Probolinggo :

“Probolinggo Kota jasa Berwawasan Lingkungan yang Maju, Sejahter dan Berkeadilan”

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Maju : Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal, ditopang oleh ketahanan ekonomi dan sosial. Dengan demikian kondisi masyarakat yang maju akan bermakna kondisi masyarakat Kota Probolinggo yang semakin berkualitas yang didukung dengan penerapan nilai-nilai 4 (empat) pilar kebangsaan. Kondisi masyarakat yang maju dengan rumusan demikian itu sangat diperlukan untuk mampu mendukung upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo sebagaimana arah visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Sejahtera : Adalah sikap dan kondisi masyarakat kota Probolinggo yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman, tentram dan makmur salam menjalani kehidupan. Masyarakat kota Probolinggo yang terwujud kesejahteraannya karena keberhasilannya upaya pemantapan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Sikap dan kondisi masyarakat demikian tadi selaras dengan tuntutan Kota Probolinggo yang terus berusaha untuk mewujudkan peningkatan derajat kesejahteraannya. Sejahtera menggambarkan derajat

kehidupan warga Kota Probolinggo yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.

Berkeadilan : Adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Kota Probolinggo. Pembangunan berkeadilan adalah pembangunan untuk semua, dengan orientasi pada pemerataan distribusi hasil pembangunan, yang ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Berkeadilan berarti tercipta kondisi yang adil di segala bidang kehidupan yang pasti didambakan oleh seluruh masyarakat warga kota Probolinggo. Berkeadilan berarti dapat diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajibannya, berarti juga terwujudnya kesetaraan posisi semua warga masyarakat dalam bidang hukum dan pemerintahan. Pembangunan yang berkeadilan juga bermakna pembangunan yang tidak hanya dinikmati hasilnya pada masa sekarang saja tetapi juga dapat terus terjaga keberlanjutannya sehingga dapat bermanfaat pula bagi masyarakat di masa mendatang. Pembangunan yang demikian mensyaratkan adanya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana arah visi Kepala Daerah terpilih.

Kota Jasa yang Berwawasan Lingkungan : Adalah konsep untuk mewujudkan Probolinggo sebagai kota yang akselerasi pertumbuhan arus perdagangan barang dan jasa dalam skala regional maupun internasional serta memadukan wilayah pengembangan kota dalam suatu sistem tata ruang yang terintegrasi didukung

infrastruktur, sistem transportasi dan sistem teknologi informasi yang memadai. Kota jasa (sebagaimana arah dari visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih) mengandung arti bahwa Kota Probolinggo mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi sesuai dengan karakteristik kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang memadai tulang punggung pembangunan (dengan tidak meninggalkan potensi lainnya) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Dalam konteks ini secara khusus yang menjadi arah visi adalah kota jasa yang berwawasan lingkungan, artinya aspek kelestarian lingkungan hidup menjadi dan sekaligus pengdali dalam operasionalisasi kegiatan perdagangan, jasa dan investasi

Misi Kota Probolinggo :

Misi Pertama : Membangun Masyarakat Kota Probolinggo Yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing. Misi ini adalah untuk menciptakan sosok masyarakat Kota Probolinggo tahun 2019 yang berkualitas dan berdaya saing, yakni masyarakat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit membangun dan siap untuk berkompetisi dan memiliki kesiapan untuk menghadapi era globalisasi bidang politik-keamanan, ekonomi dan sosial budaya (*Asean Community*).

Misi Kedua : Membangun Perekonomian Kota Probolinggo Yang Kompetitif, Kokoh dan Berkeadilan. Misi ini adalah untuk menciptakan sosok perekonomian Kota Probolinggo tahun 2019 yang kokoh dan berkeadilan, yakni sosok perekonomian kota yang kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan

komparatifnya, kokoh dan kuat dalam menghadapi berbagai turbulensi perekonomian namun tetap berorientasi pada perekonomian yang berkeadilan.

Misi Ketiga : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo Didukung Akuntabilitas, Profesionalitas dan Perluasan Partisipasi Publik. Misi ini adalah untuk menciptakan sosok Pemerintahan Kota Probolinggo Tahun 2019, yakni sosok pemerintahan yang berkinerja tinggi, profesional, amanah dan bertanggung jawab dalam bingkai tatakelola pemerintahan yang baik guna melaksanakan fungsi pelayanan, pengaturan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, amanah dan demokratis.

Misi Keempat : Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan. Misi ini untuk menciptakan sosok Kota Probolinggo Tahun 2019 yang telah terpenuhi infrastruktur kota yang mampu dan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Misi Kelima : Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kota Probolinggo Dalam Bingkai Kearifan Lokal. Misi ini untuk menciptakan sosok kehidupan sosial kemasyarakatan Kota Probolinggo Tahun 2019 yang harmonis melalui peningkatan peran generasi muda, pembinaan olah raga, pengembangan seni dan budaya serta pengembangan rasa kesetiakawanan sosial terutama bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

2. Profil Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo

a. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kota Probolinggo saat ini, terutama dalam aspek pemanfaatan potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan, serta untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Walikota Probolinggo selama 5 (lima) tahun kedepan (2015-2019), maka visi Badan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo Tahun 2015-2019 adalah:

“Menuju Probolinggo Kota Ramah Lingkungan”

Dalam upaya mewujudkan visinya, ditetapkan 4 (empat) misi Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Pengelolaan Kebersihan Kota Yang Berwawasan Lingkungan.
- b) Meningkatkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- c) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Melalui Pelestarian, Pencegahan & Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.
- d) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Tugas Pokok dan Fungsi BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kota Probolinggo

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo serta Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2012 tentang

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas Badan Lingkungan Hidup adalah:

“Membantu Kepala Daerah Dalam Merumuskan Kebijakan dan Koordinasi
Pengelolaan Lingkungan Hidup”

Sedangkan dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo mempunyai fungsi yaitu:

- a) Perumusan perencanaan kebijakan pembinaan, pemberian bimbingan dan pengendalian perijinan di bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, analisis dan evaluasi, pemantauan dan pemulihan kualitas air;
- c) Pelaksanaan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- d) Perumusan kebijakan dan kegiatan di bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan;
- e) Pelaksanaan kegiatan monitoring, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan kota, pencegahan pencemaran lingkungan;
- f) Pengelolaan ketatausahaan;
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Daerah.

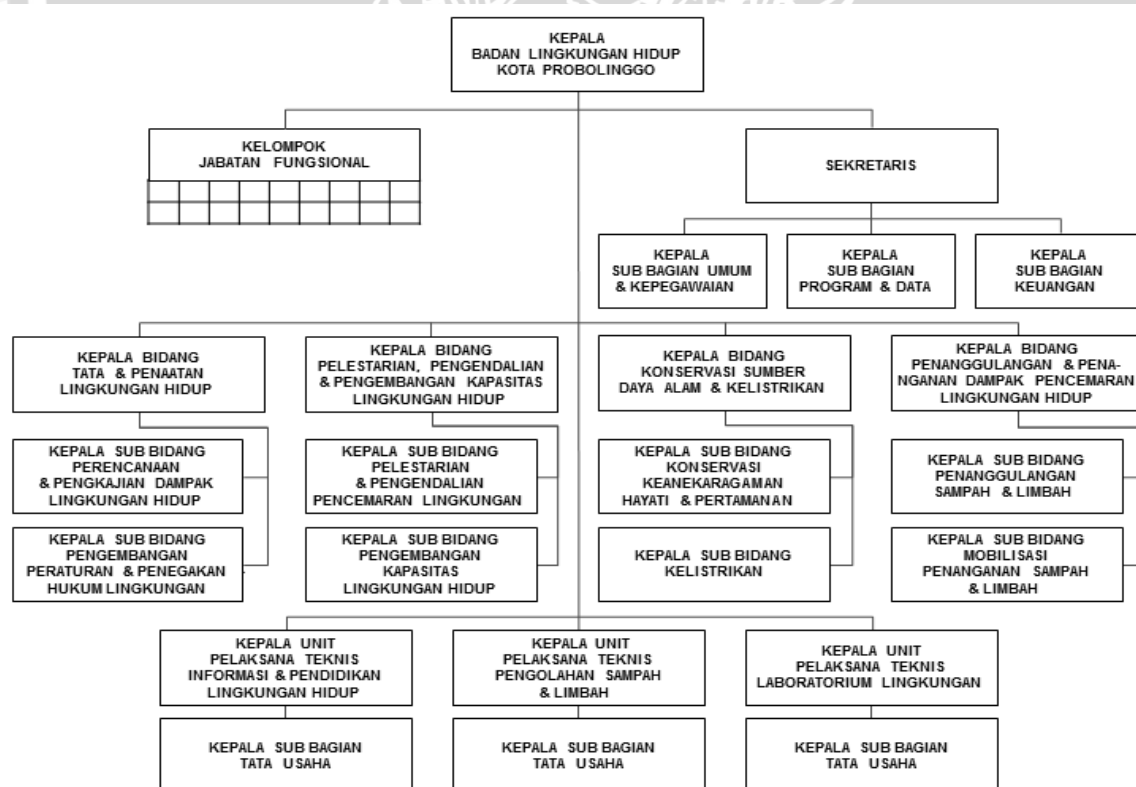
c. Struktur Organisasi BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kota Probolinggo

Struktur Badan Lingkungan Hidup (BLH) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo serta Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tentang Tugas Pokok & Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Badan
- 2) Bagian Sekretariat (TU), terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Program dan Data
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c) Sub Bagian Keuangan
- 3) Bidang Pelestarian, Pengendalian Dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup (P3KLH), terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Pelestarian dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - b) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
- 4) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Kelistrikan (KSDA), terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati & Pertamanan
 - b) Sub Bidang Kelistrikan
- 5) Bidang Penanggulangan Dan Penanganan Dampak Pencemaran Lingkungan (P2DPL), terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Penanggulangan Sampah dan Limbah

- b) Sub Bidang Mobilisasi Penanganan Sampah & Limbah
- 6) Bidang Tata Dan Pnaatan Lingkungan Hidup (TAPEN), terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup
 - b) Sub Bidang Pengembangan Peraturan dan Penegakan Hukum Lingkungan
- 7) UPT. Informasi Dan Pendidikan Lingkungan Hidup (UPT. IPLH)
- 8) UPT. Pengolahan Sampah Dan Limbah (UPT. PSL)
- 9) UPT. Laboratorium Lingkungan (UPT. LAB)

Berikut merupakan bagan dari struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo:



Gambar 4 Struktur Organisasi BLH Kota Probolinggo

Sumber: blh.probolinggokota.go.id

3. Profil UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo

a. Tugas Pokok dan Fungsi UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo, Tugas Pokok dan Fungsi UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo tertuang pada pasal 36, sebagai berikut:

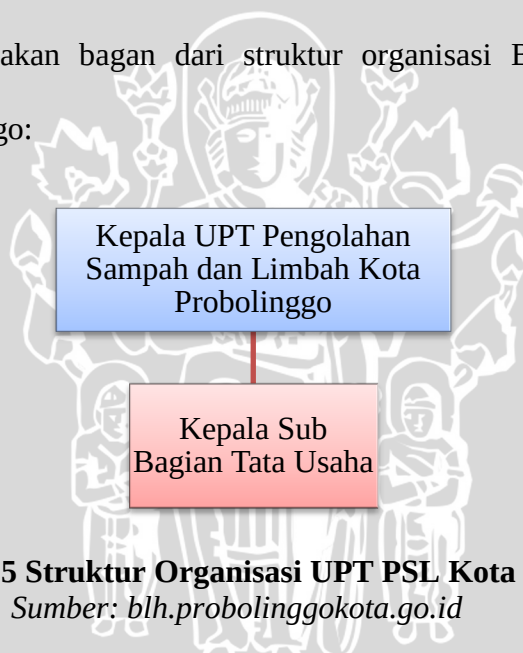
- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Sampah dan Limbah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang Teknis Pengolahan Sampah Dan Limbah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Sampah dan Limbah mempunyai fungsi:
 - a. Penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan pengolahan sampah dan limbah
 - b. Penyusunan rencana program dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - c. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional pengelolaan sampah dan limbah;
 - d. Pelaksanaan distribusi hasil produksi pengolahan sampah dan limbah
 - e. Pelaksanaan sosialisasi pengolahan sampah dan limbah;
 - f. Pelaksanaan pengembangan riset dan teknologi pemanfaatan sampah dan limbah yang berwawasan lingkungan

- g. Pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan pada UPT Pengolahan Sampah dan Limbah
- i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota

Probolinggo

Berikut merupakan bagan dari struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo:



Gambar 5 Struktur Organisasi UPT PSL Kota Probolinggo

Sumber: blh.probolinggokota.go.id

UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo merupakan salah satu bidang dari Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Dalam struktur UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo hanya terdiri dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

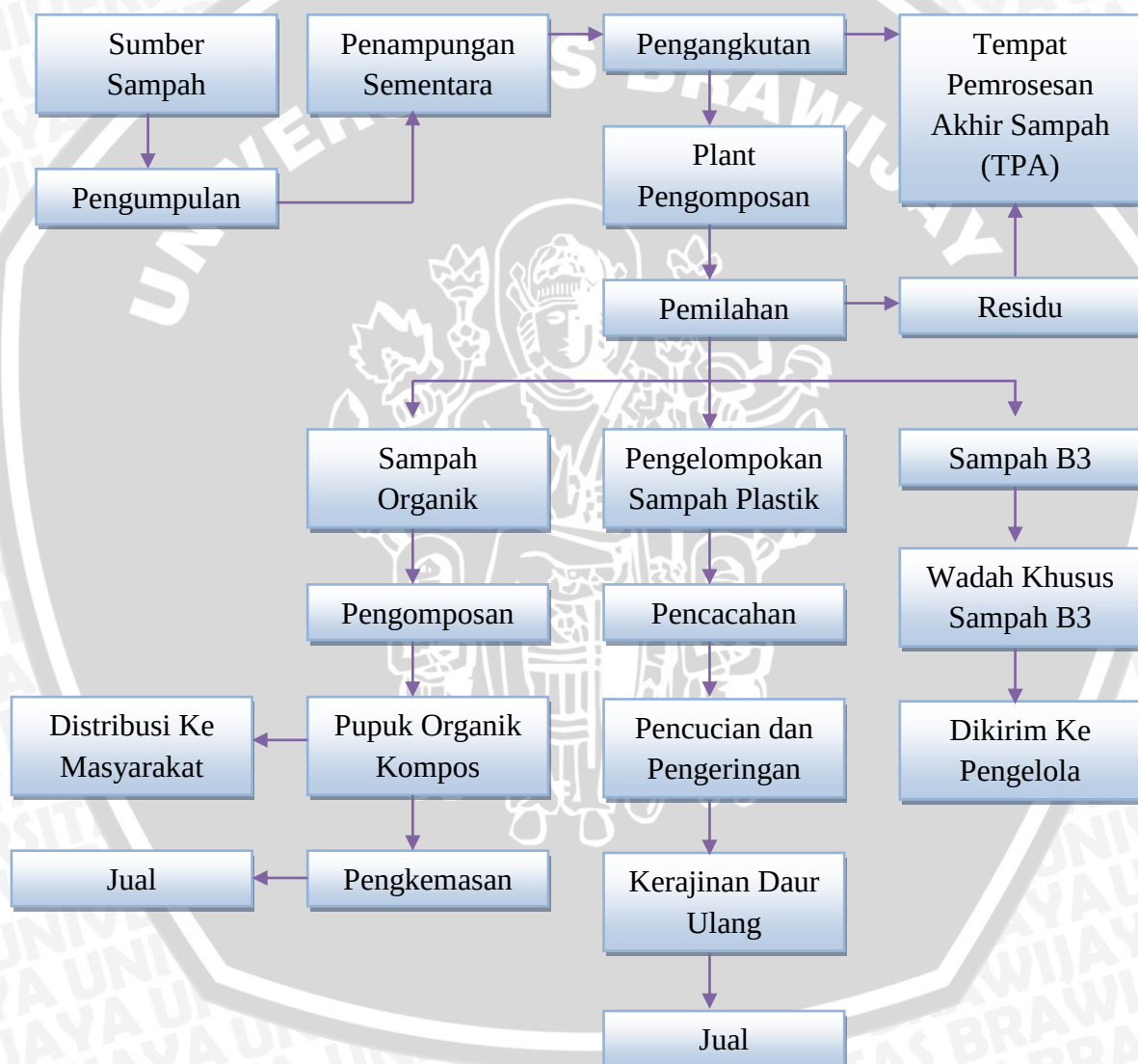
1. Pengelolaan Sampah di Kota Probolinggo

Proses pengelolaan sampah di Kota Probolinggo dilakukan dengan cara penanganan sampah dan pengurangan sampah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak B selaku staf UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo mengatakan bahwa:

“Jadi mbak di Kota Probolinggo dalam proses pengelolaan sampahnya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu kalau sampah plastik akan kita daur ulang, sampah organik kita jadikan pupuk kompos dan sampah B3”. (Wawancara tanggal 26 Mei 2016).

Proses penanganan sampah, dimulai daripemilahan dari sumber sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir di TPA. Sampah hasil sapuan jalan, taman, pasar, pemukiman dan sumber lainnya dikumpulkan dan kemudian ditampung ditempat penampungan sementara. Selanjutnya dari penampungan sementara sampah diangkut dan jika tidak dilakukan pengolahan, maka dibuang langsung ke TPA. Jika akan dilakukan pengolahan, maka sampah dibawa ke plant pengomposan. Sampah akan dipilah berdasarkan sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Sampah yang telah dipilah akan diproses lebih lanjut, dimana sampah organik dijadikan kompos, sampah plastik diproses lebih lanjut, sampah B3 ditepatkan pada wadah khusus untuk dikirim ke pengelola limbah B3 dan residu dibuang ke TPA. Hasil pengolahan sampah dari sampah organik yang berupa kompos selanjutnya akan dijual atau dikembalikan lagi kepada masyarakat. Hasil pengolahan sampah dari sampah anorganik yang berupa cacahan dijadikan kerajinan daur ulang yang dapat dijual. Sedangkan sampah B3 ditempatkan di wadah khusus yang selanjutnya

dikirim ke pengelola. Hasil dari pengolahan sampah organik dan anorganik menjadi bagian dari proses pengurangan sampah dengan memanfaatkan sampah untuk mengurangi timbunan sampah di TPA. Gambar proses pengelolaan sampah di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:



Gambar 6 Proses Pengelolaan Sampah di Kota Probolinggo

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo

Dalam pengurangan sampah di Kota Probolinggo dapat juga dilakukan melalui program-program pengelolaan sampah yang berbasis partisipatif dimana

semua lapisan masyarakat Kota Probolinggo dapat terlibat aktif dalam pengolahan sampah. Sehingga BLH Kota Probolinggo mengembangkan program pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengelolaan persampahan dengan program kegiatan sebagai berikut:

1) Ayo Bersepeda Bersihkan Sampah (ABBS)

Kegiatan ABBS merupakan kegiatan olah raga bersepeda dibarengi dengan aksi bersih-bersih lingkungan yang bertujuan untuk menggugah kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan Kota Probolinggo.

2) Kita Bersama Bersihkan Sampah Saluran (KB2S2)

Kegiatan KB2S2 merupakan kegiatan kerja bhakti pembersihan sampah dan gulma pada saluran-saluran terbuka.

3) Pengembangan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) Skala Kawasan

3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) skala kawasan adalah fasilitasi sistem pengolahan sampah organik maupun anorganik yang ditempatkan pada kawasan-kawasan perkotaan seperti kompleks perumahan, lembaga pendidikan, perkantoran ataupun pertanian, dimana pengelolaannya dapat dilakukan oleh pemerintah maupun dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Diharapkan penerapan sistem tersebut dapat memberikan manfaat lebih baik terhadap masyarakat, lingkungan serta dapat mengurangi beban pengelolaan sampah pada TPA. Pelaksanaan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) skala kawasan di Kota Probolinggo adalah dengan secara aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan terhadap penerapan dan

pelaksanaan 3R(*Reuse, Reduce, Recycle*) Skala Kawasan pada kawasan-kawasan percontohan, memberikan fasilitas/stimulasi pengolahan sampah untuk Skala Kawasan Kecil dalam bentuk rumah kompos dan mesin pencacah sampah serta memberikan fasilitas/stimulasi pengolahan sampah untuk Skala Kawasan Sekolah berupa komposter aerob dan keranjang takakura. Lokasi 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) Skala Kawasan terbagi dalam 4 kategori kawasan yaitu :

- a) Skala Kawasan Menengah: UPT. Pengolahan Sampah dan Limbah (PSL) Kota Probolinggo dan Unit Pengolahan Sampah Pasar Terpadu.
 - b) Skala Kawasan Kecil: Perumahan Asabri, Perumahan Bromo, Perumahan Kopian Barat, Perumahan Sumber Taman Indah, UPT. IPLH, TPST Sumber Taman, TPST Prasaja Mulya, TPST Jrebeng Lor, TPST Kedungasem, TPST Kedung Galeng, TPST Wonoasih.
 - c) Skala Kawasan Sekolah: SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, SMK Negeri 1, SMK Negeri 2, SMK Negeri 3, SMP Negeri 4, SMP Negeri 10, SD Negeri Ketapang 3, SD Negeri Mangunharjo 6 dan SD Negeri Sumber Wetan 2 Kota Probolinggo.
 - d) Skala Kawasan Kelompok Tani: Kelompok Tani Bangau Jaya, Kelompok Tani Pohsangit Kidul dan Kelompok Tani Makmur II.
- 4) Pelatihan-pelatihan Pemanfaatan Sampah

Pelatihan pemanfaatan sampah merupakan kegiatan pelatihan dalam mendayafungsikan atau memanfaatkan limbah terbuang menjadi barang yang memiliki manfaat serta nilai ekonomis. Manfaat pelatihan selain untuk

membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan beragam potensi sampah juga sebagai upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan, mengurangi penggunaan bahan baku baru, mengurangi penggunaan energi/sumber daya alam, mengurangi polusi, mengurangi kerusakan lahan serta untuk mendapatkan nilai ekonomis karena produk yang dihasilkan memiliki nilai jual. Kegiatan pelatihan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2010 hingga sekarang dengan peserta pelatihan antara lain pedagang kaki lima (PKL), Kader Lingkungan, Pemulung, Ibu-Ibu PKK Kelurahan, Kelompok Petani Tembakau, Masyarakat Pemilah Sampah, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dll.

5) Bank Sampah

Bank Sampah merupakan sistem pengelolaan sampah berbasis kelompok masyarakat dengan cara mengumpulkan dan menyetorkan berbagai jenis sampah yang masih memiliki nilai ekonomis. Hasil dari penyetoran tersebut ditabung dan dapat diambil dalam bentuk uang. Proyek perintisan Bank Sampah di Kota Probolinggo dimulai sejak tahun 2010 dan secara resmi dilaunching/beroperasi pada awal bulan Januari 2012, dimana Pemerintah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Yayasan Danamon Peduli memfasilitasi pendirian Bank Sampah untuk kemudian dikelola secara mandiri oleh para pedagang yang terhimpun dalam Paguyuban Pedagang Pasar Baru Kota Probolinggo. Embrio Bank Sampah di Kota Probolinggo terdapat di beberapa wilayah, dimana UPT Pengolahan Sampah dan Limbah secara berkala melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap embrio-embrio

Bank Sampah tersebut. Beberapa embrio Bank sampah yang ada di Kota Probolinggo diantaranya adalah: Bank Sampah Bunda Peduli, Melati Berseri, Indah, Spanex Mandiri, Makmur Sejahtera, SMPN II, SMPN X, SMKN III, SMAN II, SMKN I, SD Mangunharjo VI, SD Sukabumi VI, Pasar Baru, Kenanga, Melati, Brantas, Pakistaji, SMPN III, Anugerah, Insan Peduli, Abadi Mulia, Pakistaji 1, Zakinah. Sedangkan perkembangan Bank Sampah di Kota Probolinggo hingga Triwulan I Tahun 2013 telah berkembang hingga mencapai 30 unit Bank Sampah.

6) *Green Barter*

Green Barter adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi sampah yang selama ini hanya dibiarkan terbuang begitu saja atau bahkan dibakar, maka melalui kegiatan *Green Barter* ini sampah tersebut bisa ditukar dengan kompos ataupun bibit tanaman untuk penghijauan. Tujuan kegiatan ini adalah:

- a) Memberikan menukarkan kesempatan bagi masyarakat untuk sampah anorganik dengan kompos organik atau dengan bibit tanaman.
- b) Mendorong agar masyarakat dapat lebih peduli terhadap pentingnya pemanfaatan sampah dan penghijauan kota.
- c) Mengajak seluruh masyarakat dan *stakeholder* serta pelaku industri untuk memilah sampah mulai dari sumbernya.

2. Sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo

a. Peran *stakeholders* yang terlibat dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Probolinggo.

Permasalahan pengelolaan sampah dapat terselesaikan dengan mudah jika *stakeholders* yang terlibat dapat menjalankan tugas dan perannya masing-masing. Dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo, *stakeholders* yang terlibat yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dimana *stakeholders* ini mempunyai tugas dan peran masing-masing. Sesuai dengan pernyataan YY selaku Kabid Penanggulangan dan Penanganan Dampak Pencemaran Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, yaitu:

“Dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo, BLH Kota Probolinggo berusaha melibatkan beberapa pihak terutama masyarakat Kota Probolinggo sendiri, bahkan kita juga mempunyai program kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah yang bisa diikuti oleh masyarakat, dan juga BLH Kota Probolinggo membentuk mitra yang kita sebut sebagai Mitra Kerja BLH (sambil menunjukkan Buku Profil BLH yang berisi program kegiatan pengelolaan sampah dan mitra kerja BLH) dimana mitra ini sering kita libatkan dalam kegiatan kita dalam mensosialisasikan pengelolaan sampah kepada masyarakat, kita juga bekerjasama dengan GIZ dari Jerman, CDIA (*City Development Initiative of Asia*)”. (wawancara tanggal 14 Maret 2016).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo, *stakeholders* yang terlibat yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. Ketiga komponen ini memiliki peran masing-masing yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Peran Pemerintah / *government* dalam pengelolaan sampah di Kota

Probolinggo

Government atau pemerintah adalah suatu lembaga beserta aparaturnya yang bertanggung jawab untuk melayani dan melaksanakan mandat dari rakyat di wilayahnya. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan *government* adalah pihak pemerintah yang berperan dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo yaitu Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo melalui bidang UPT Pengolahan Sampah dan Limbah. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo mempunyai tugas penuh dalam pengelolaan lingkungan di Kota Probolinggo. Sedangkan dalam teknis pengolahan sampah dan limbah sendiri menjadi tugas bidang UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.

Dalam permasalahan sampah di Kota Probolinggo, Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo mempunyai peran penting dalam pengelolaan lingkungan terutama dalam pengelolaan persampahan di kota Probolinggo. Konsep pengelolaan sampah di Kota Probolinggo yaitu berbasis partisipatif yang dilakukan secara sinergi (terpadu) melibatkan beberapa elemen (Pemerintah, masyarakat RT/RW, Pengusaha/Swasta). Sehingga, Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo berupaya mengembangkan program-program pengelolaan lingkungan terutama pengelolaan persampahan. Seperti yang ditegaskan oleh pernyataan Kasubag Program Bapak AR.

“jadi dalam rangka untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo, kami (Badan Lingkungan Hidup Kota

Probolinggo)mengembangkan berbagai program yang berkaitan dengan dengan pengelolaan persampahan. Di kegiatan ini seluruh lapisan masyarakat bisa dan diperbolehkan ikut serta sehingga kesadaran masyarakat terhadap sampah itu tinggi jadi masyarakat itu tidak lagimembuang sampah sembarangan dan bisa mengolah sampah secara mandiri” (wawancara tanggal 13 April 2016).

Adapun program-program pengelolaan sampah yang dikembangkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, antara lain:

1. Ayo Bersepeda Bersihkan Sampah (ABBS)
2. Kita Bersama Bersihkan Sampah (KB2S2)
3. Pengembangan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) skala kawasan
4. Pelatihan-Pelatihan Pemanfaatan Sampah
5. Bank Sampah dan *Green Barter*

Dengan adanya program-program pengelolaan sampah tersebut Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggoberharap agar masyarakat dapat terlibat langsung dan aktif hingga secara bertahap dapat mandiri dalam mengelola sampah sehingga dapat mengurangi sampah yang masuk di TPA Kota Probolinggo.

Mengingat kepedulian terhadap lingkungan adalah milik semua lapisan masyarakat di semua strata pendidikan dan status sosial, termasuk organisasi kemasyarakatan, sosial dan keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan unsur-unsur masyarakat lainnya.Maka sebagai upaya untuk memberikan wadah serta ruang bagi masyarakat untuk dapat turut serta dalam upaya pengelolaan sampah dan sekaligus juga untuk mensinergikan berbagai potensi yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan, BLH Kota Probolinggo membentuk Mitra Kerja BLH. Adapun mitra kerja BLH Kota Probolinggo antara lain:

- 1) Forum Jaringan Manajemen Sampah (FORJAMANSA)

- 2) Kelompok Masyarakat (POKMAS)
- 3) Paguyuban Peduli Sampah (PAPESA)
- 4) Paguyuban Penarik Gerobak Sampah (PGS) Ceria
- 5) Paguyuban Masyarakat Pasar Peduli Sampah
- 6) Paguyuban Pemulung Peduli Lingkungan
- 7) Paguyuban Pedagang Kali Lima (PKL) Peduli Sampah

Dimana Badan Lingkungan Hidup telah melakukanfasilitasi,pendampingan dan pembinaan mulai dari proses pembentukan hingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan mitra kerja BLH tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh pernyataan Ibu YY selaku Kabid Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup (PKLH)Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo:

“..iya memang betul mbak disini kita mendampingi mitra kami mulai dari awal hingga mereka mandiri dalam megolah sampah. Seperti Pokmas (kelompok masyarakat), Pokmas kita bentuk dengan kesadaran masyarakat yang benar-benar berminat untuk mengolah sampah menjadi kompos di lingkungan masing-masing.Nanti Pasca magang Pokmas UPT PSL yangmendampingi mengolah sampah dari sumbernya, kita juga beri sarana pengolahan sampah organik menjadi kompos dan kita fasilitasi mereka dalam proses pengomposan hingga Pokmas tersebut dapat mandiri”. (Wawancara pada tanggal 29 Februari 2016)

Pemerintah Kota Probolinggo melalui Badan Lingkungan Hidup terus berupaya menjalankan komitmennya dalam mengurangi sampah plastik serta menjalankan peran dan tugas dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo.Antara lain dengan mengadakan kegiatan pelatihan daur ulang sampahmaupun sosialisasi kepada sekolah, perusahaan maupun kelompok masyarakat maupun kunjungan langsung ke UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Seperti

yang diungkapkan oleh staf UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Bapak B, yaitu:

“....memang benar mbak kita disini membuka pintu kita selebarnya-lebarnya untuk masyarakat yang ingin datang langsung untuk belajar mengolah sampah yang benar, nanti kita ajarkan kepada masyarakat bagaimana cara mengolah sampah organik maupun anorganik (sambil menunjukkan alat-alat mesin pengolah sampah). Kita juga sering melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah di sekolah-sekolah, perusahaan-perusahaan maupun ke kelompok masyarakat.”(Wawancara pada tanggal 2 Mei 2016).

Seperti yang terlihat pada gambar 7 memperlihatkan suasana kegiatan pelatihan daur ulang yang langsung di bimbing oleh staf UPT Pengolahan Sampah dan Limbah. Bahkan kadangkala dibantu oleh salah satu anggota Bank Sampah sebagai narasumber maupun instruktur. Bentuk sampah yang didaur ulang berupa sampah anorganik seperti plastik, kertas, karung goni, dll. Kegiatan pelatihan daur ulang sampah ini diberikan diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat baik siswa-siswi sekolah, guru, karyawan swasta, maupun kelompok masyarakat. Melalui pelatihan daur ulang sampah plastik ini, diharapkan dapat mengupayakan pembuangan plastik seminimal mungkin. Karena dengan berkurangnya sampah plastik yang masuk ke TPA maka dampak buruk terhadap lingkungan pun dapat diminimalisir.



Gambar 7 Kegiatan Pelatihan Daur Ulang

Sumber: Arsip UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo, 2016.

Adapun data kegiatan pelatihan daur ulang sampah yang pernah diadakan oleh UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo, antara lain:

Tabel 2 Kegiatan Pelatihan Daur Ulang Sampah Plastik

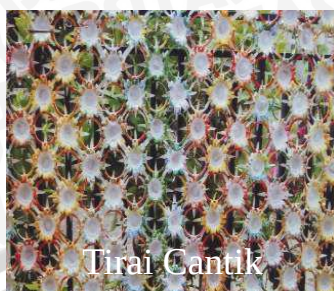
No	Tanggal	Keterangan
1	24 Februari 2016	Pelatihan daur ulang sampah plastik digelar di halaman kantor UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Peserta kegiatan terdiri dari 30 unsur sekolah Adiwiyata di Kota Probolinggo. Turut pula hadir Katarina Suwenda dan Kristantina dari Bank Sampah “Srikandi”, yang bertindak sebagai narasumber dan instruktur.
2	31 Mei 2016	Pelatihan daur ulang sampah untuk pengembangan Bank Sampah bertempat di Bank Sampah Al Mar’atush Sholihah Jalan Ikan Belanak Gang Kavlingan No 26 Kota Probolinggo. Maksud dan Tujuan dari Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Daur Ulang Sampah untuk Pengembangan Bank Sampah adalah : 1. Memberikan wawasan pengetahuan dan ketrampilan kepada masyarakat tentang kegunaan dan manfaat dari daur ulang sampah. 2. Pengembangan Bank Sampah yang sudah terbentuk. 3. Memberikan nilai tambah dan ekonomis. 4. Menciptakan lapangan kerja.

Sumber: UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo, 2016.

Dari kegiatan pelatihan daur ulang sampah menghasilkan barang-barang daur ulang sampah plastik seperti tas, bros, keranjang sampah yang memiliki nilai ekonomis. Barang-barang tersebut antara lain:



Tas



Tirai Cantik



Tempat Pakainan/
Sampah



Baju Limbah Plastik



Tempat Minuman



Sandal Rumah



Sepatu Flats



Tas Semen



Topi Santai

Gambar 8 Hasil Daur Ulang Sampah

Sumber: Arsip UPT Pengolahan Sampah Kota Probolinggo, 2016.



Bank Sampah



Perusahaan



Sekolah



Pasar

Gambar 9 Kegiatan Sosialisai UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo

Sumber: Arsip UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo, 2016.

UPT Pengolahan Sampah Kota Probolinggo juga mengadakan sosialisasi baik kepada sekolah, perusahaan swasta, maupun kelompok masyarakat. Sosialisai yang diberikan berupa sosialisasi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Seperti yang terlihat pada gambar 9 diatas memperlihatkan suasana sosialisasi yang diberikan oleh UPT Pengolahan Sampah Kota Probolinggo kepada para peserta. Adapun data kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang pernah diadakan oleh UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo, antara lain:

Tabel 3 Daftar kegiatan sosialisai UPT Pengolahan Sampah Kota Probolinggo

No	Tanggal	Keterangan
1	8 Mei 2016	Sosialisasi diadakan dengan memberikan penyuluhan / penjelasan mengenai pengolahan/pemilahan dan pemanfaatan sampah yang diadakan di PT. Eratex Djaja di Kota Probolinggo. UPT PSL memberikan Sosialisasi bertema “Peningkatan Peran Pihak Swasta dalam Pengelolaan Persampahan” didalamnya memprioritaskan menyampaikan tentang : Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan: KEWAJIBAN : Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. LARANGAN : 1. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan 2. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir 3. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah Upaya Pemerintah bersama pihak swasta dalam pengelolaan sampah dan limbah , Sinergitas bersama :

		1. Dukungan dan Komitmen bersama antara Pemerintah dan Pihak Swasta 2. Pengelolaan sampah masing – masing perusahaan dijadikan sebagai program prioritas 3. Pembentukan bank sampah skala besar dapat menjadi pondasi skala komunitas yang ada 4. Keberadaan bank sampah dapat menjadi pondasi skala kecil untuk penanganan sampah 5. Perwujudan kesejahteraan kawasan perusahaan
2	23 Agustus 2016	Sosialisasi Penguatan Peran Serta Pedagang Pasar dalam Pengolahan Sampah Pasar Tradisional yang bertempat di Pasar Ketapang, Kelurahan Ketapang Kota Probolinggo. Maksud dan tujuan sebagai berikut : 1. Memberikan pemahaman penting pengelolaan sampah pasar kepada pedagang pasar 2. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sampah anorganik melalui keterampilan daur ulang 3. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi pedagang, pengunjung dan pengelola pasar Dalam sosialisasi tersebut, UPT PSL sekaligus menyampaikan bahwa pentingnya pengolahan sampah pasar melalui pemanfaatan daur ulang sampah kepada pedagang pasar dan meningkatkan perilaku bersih dan sehat. Kegiatan Sosialisasi Penguatan Peran Serta Pedagang Pasar dalam Pengolaan Sampah ini di hadiri ± 50 orang pedagang pasar, Narasumber dari PAPESA (Paguyuban Peduli Sampah) ibu LILIK SUHARINI dengan tema “ Pedagang pasar berperan aktif dalam pemilahan sampah untuk mendukung pasar dan bersih “ sekaligus pelatihan daur ulang sampah di pandu langsung oleh karyawati UPT.PSL
3	30 Agustus 2016	Sosialisasi Bank Sampah yang berlangsung dua kali dalam sehari bertempat di Jl. Kapten Pattimura No 17 Rumah ibu ERNI pukul 08.00 WIB s/d selesai dan Jl. KH Mansyur Balai RW 10 Kelurahan Mangunharjo Kota Probolinggo pukul 15.00 WIB s/d selesai. Maksud dan tujuan Kegiatan Sosialisasi sebagai berikut : 1. Pengenalan Bank Sampah pada masyarakat 2. Pentingnya Pemilahan dan Pengelolaan sampah 3. Memberikan wawasan dan pelatihan keterampilan kepada masyarakat berupa produk daur ulang sampah Acara di buka langsung oleh Kepala UPT. PSL yang sekaligus memotivasi masyarakat dalam pembentukan Bank Sampah kelompok & manfaat sampah untuk produk daur ulang. Dengan adanya pembentukan Bank

		sampah individu atau kelompok akan mengurangi sampah yg kita hasilkan sehari – hari. Kegiatan Sosialisasi Bank Sampah ini di hadiri ± 50 orang setiap satu tempat, sekaligus pelatihan daur ulang sampah di pandu langsung oleh karyawan UPT. PSL.
4	17 September 2016	Sosialisasi di Lingkungan Sekolah dengan materi Komposting dan Pemanfaatan Barang Bekas di SDN Kanigaran 3 guna menunjang kegiatan Penilaian Adwiyata tingkat Kota Probolinggo Tahun 2016. Kegiatan sosialisasi komposting dan pemanfaatan barang bekas mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut: 1. Pemanfaatan dan penggunaan Komposter Aerob 2. Pemilahan sampah dan 3R (<i>Reduce, Reuse</i> dan <i>Recycle</i>) 3. Memperkenalkan Bank Sampah dan Produk Daur Ulang Acara dibuka langsung oleh Kepala UPT. PSL dan didampingi SDN Kanigaran 3 Kota Probolinggo yang sekaligus memotivasi siswa SDN Kanigaran 3 mengenai pentingnya komposting, pemilahan sampah dan penggunaan komposter aerob guna penilaian adiwiyata tingkat kota. Kegiatan sosialisasi komposting dan pemanfaatan barang bekas ini di hadiri ± 70 siwa dan guru pendamping, sekaligus dipandu langsung oleh staf UPT. PSL.

Sumber: UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo, 2016.

Tidak hanya itu, UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo juga menerima kunjungan langsung/ lapangan dari sekolah, perusahaan maupun kelompok masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Seperti yang terlihat pada gambar 10, memperlihatkan suasana kunjungan lapangan dari berbagai lapisan masyarakat maupun perusahaan.



Gambar 10 Kegiatan kunjungan ke UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo

Sumber: Arsip UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo, 2016.

Adapun daftar kunjungan berbagai lapisan masyarakat ke UPT Pengolahan Sampah dan Limbah, sebagai berikut:

Tabel 4 Daftar Kunjungan Ke UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo

No	Tanggal	Keterangan
1	28 April 2016	Kunjungan lapangan SMPN 5 Kota Probolinggo ke UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo. Diikuti oleh sekitar 169 siswa beserta 5 guru pendamping, maksud dan tujuan dari kunjungan lapangan tersebut adalah untuk mengenal lebih dekat UPT. Pengolahan Sampah dan Limbah serta untuk memperoleh pelatihan pembuatan kompos.
2	6 September 2016	Kunjungan Studi Banding PT. SASA INTI Gending, Probolinggo ke UPT.PSL BLH Kota Probolinggo dalam rangka menciptakan lingkungan bersih dan pengelolaan sampah yang baik di lingkungan Perusahaan.Peserta terdiri dari 15 orang Karyawan PT SASA INTI bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai pembuatan kompos dan bank sampah yang sudah berjalan dengan baik di Badan Lingkungan Hidup Kota

		Probolinggo.
3	23 September 2016	Kunjungan Lapangan SMP Negeri 9 ke UPT. Pengolahan Sampah dan Limbah Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan adiwiyata yaitu tentang pengelolaan sampah Organik dan An-Organik. Peserta terdiri $\pm$ 80 siswa dan guru pendamping, maksud dan tujuan dari kunjungan lapangan tersebut adalah untuk mengetahui pengolahan sampah Organik dan An-Organik di UPT. Pengolahan Sampah dan Limbah serta di dampingi Staf untuk memberikan penjelasan pengelolaan sampah Organik dan An-Organik yang ada UPT . PSL BLH Kota Probolinggo.

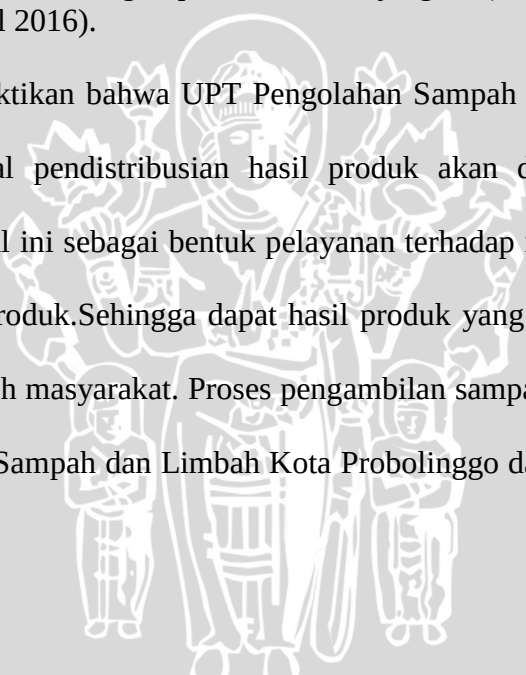
Sumber: UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo, 2016.

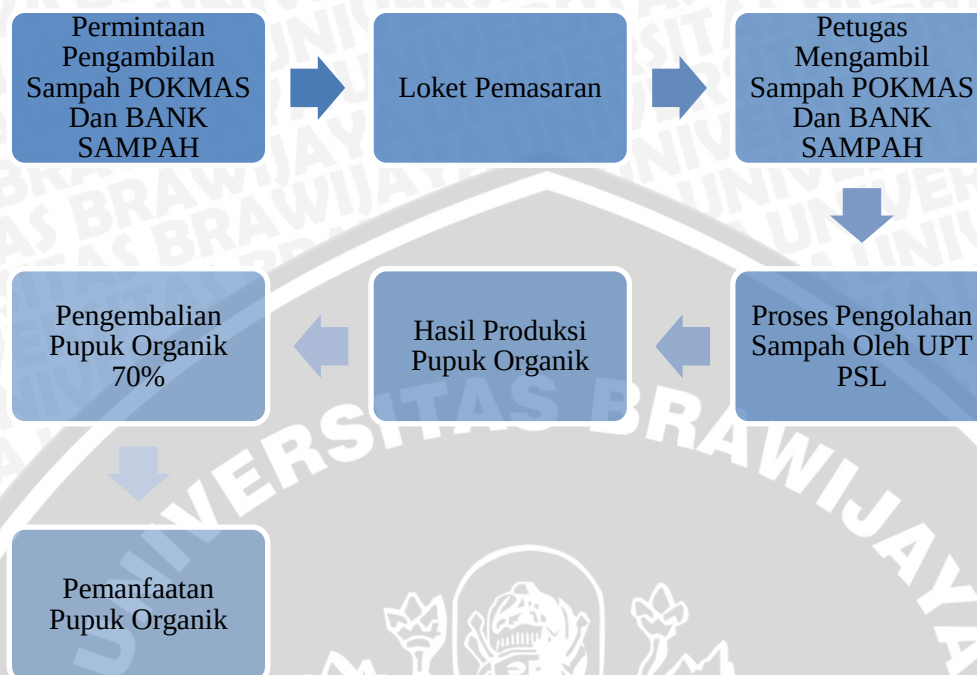
UPT Pengolahan Sampah dan Limbah juga melakukan pendistribusian hasil produksi pengolahan sampah organik dan anorganik yang sudah dikumpulkan oleh BANK SAMPAH dan Pokmas. Dimana masyarakat mengumpulkan sampah melalui BANK SAMPAH dan POKMAS di masing-masing wilayah baik sampah organik maupun anorganik. Dalam pengangkutan sampah UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo memberikan layanan jemput sampah melalui *hotline* 426563. Janji pelayanannya berbunyi, “Bila sudah lima sak sampah organik terkumpul, hubungi segera UPT PSL, pelayanan diberikan begitu Anda menutup gagang telepon.” Melalui layanan tersebut, UPT Pengolahan Sampah dan Limbah membeli sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat. Sampah yang terkumpul akan diolah di UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo kemudian hasil dari sampah tersebut yang berupa kompos, 70% kompos yang dihasilkan akan dikirim kepada anggota BANK SAMPAH atau POKMAS. Sedangkan sisanya 30 persen kompos tetap di UPT Pengolahan Sampah dan Limbah BLH Kota Probolinggo, yang

diproduksi UPT PSL sudah dikemas dan diberi merek Biokompos Banyuwangga Lestari. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan Kepala Bidang UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Bapak N.

“Sampah-sampah organik maupun organik terlebih dahulu dikumpulkan melalui BANK SAMPAH yang tersebar di Kota Probolinggo, biasanya kami akan mengambil sampah-sampah tersebut 2 kali dalam satu bulan atau sesuai panggilan dari BANK SAMPAH yang bersangkutan. Kita juga memberikan batas minimal sampah yang dapat diangkut min 5 sak. Ada juga masyarakat individu yang langsung membawa sampah organik dan anorganik kesini untuk kita selanjutnya olah menjadi kompos kalau sampah anorganik kita beli dan kita daur ulang (sambil menunjukkan barang-barang daur ulang seperti tas, keranjang, dll)”.(Wawancara pada tanggal 20 April 2016).

Hal ini membuktikan bahwa UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo dalam hal pendistribusian hasil produk akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Hal ini sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam pendistribusian hasil produk. Sehingga dapat hasil produk yang berupa pupuk ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Proses pengambilan sampah yang dilakukan oleh UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo dapat diilustrasikan sebagai berikut:





Gambar 11 Proses Pengambilan Sampah Organik POKMAS dan BANK SAMPAH

Sumber: UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, 2016.

BLH Kota Probolinggo telah menjalankan perannya dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo dengan mengeluarkan keputusan ataupun kebijakan yang berupa program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Serta UPT Pengolahan Sampah dan Limbah yang telah melakukan perannya dalam membantu sebagian tugas dari Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam teknis persampahan.

2) Peran Masyarakat / *civil society* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo

Dalam membangun sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo, Pemerintah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup tidak akan

bisa menyelesaikan permasalahan pengolahan sampah tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat / *Civil Society*. Sampah dihasilkan dari kegiatan manusia, oleh karena itu peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan sampah sehingga secara bertahap akan mengurangi penimbunan sampah di TPA Kota Probolinggo. BLH Kota Probolinggo sendiri telah mengembangkan berbagai program pengelolaan sampah berupa kegiatan yang dapat diikuti oleh masyarakat Kota Probolinggo. Adapun kegiatan tersebut, antara lain:

a. Ayo Bersepeda Bersihkan Sampah (ABBS)

Kegiatan ABBS adalah kegiatan olah raga bersepeda dibarengi dengan aksi bersih-bersih lingkungan yang bertujuan untuk menggugah kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan Kota Probolinggo. Kegiatan yang digelar bekerjasama dengan Danamon Simpan Pinjam dan sponsor lainnya ini diikuti oleh sekitar 1.500 orang peserta yang terdiri dari karyawan-karyawati SKPD Pemerintahan Kota Probolinggo, pelajar Kota Probolinggo, masyarakat umum, komunitas bersepeda Zhoek Mblozhoek dan komunitas bersepeda kosela. Dimana peserta bersama-sama bersepeda melewati rute menuju tempat finish sembari berhenti untuk melaksanakan kegiatan pembersihan pada lokasi-lokasi kerja bhakti yang telah ditentukan. Pelaksanaan ABBS yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2010 mulai pukul 05.30 wib s/d selesai, dengan tempat start dan finish berlokasi di Aloon – Aloon Kota Probolinggo.

b. Kita Bersama Bersihkan Sampah (KB2S2)

Kegiatan KB2S2 (Kita Bersama Bersihkan Sampah Saluran) yang merupakan kegiatan kerja bhakti pembersihan sampah dan gulma pada saluran-saluran terbuka. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2013 ini diikuti oleh karyawan/karyaati SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, Batalyon Zipur, Kodim 0820, Polres Probolinggo Kota, Staf Kelurahan Ketapang, Staf Kelurahan Triwung Lor, serta anggota komunitas sepeda Zoek Mbloezook. Dengan adanya kegiatan ini seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat langsung serta membuka kesadaran masyarakat Kota Probolinggo terhadap pentingnya mengelola lingkungan termasuk dalam permasalahan sampah. Dalam setiap program kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, masyarakat Kota Probolinggo sangat antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut.

c. Pelatihan-Pelatihan Pemanfaatan Sampah

Sosialisasi pelatihan pemanfaatan sampah pernah dilakukan UPT Pengolahan Sampah dan Limbah kepada siswa-siswi kelas VII SMPN 5 Kota Probolinggo pada tanggal 28 April 2016 yang diikuti oleh sekitar 169 siswa beserta 5 guru pendamping. Terlihat pada gambar 12, siswa-siswi SMPN 5 Kota Probolinggo sangat antusias mendengarkan penyampaian tentang pelatihan pembuatan kompos yang diutarakan oleh salah satu staf UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo.



Gambar 12 Kegiatan Sosialisasi Siswa-siswi SMPN 5 Kota Probolinggo

Sumber: Arsip UPT PSL Kota Probolinggo, 2016.

d. Bank Sampah

Bank Sampah sendiri merupakan sistem pengelolaan sampah berbasis kelompok masyarakat dengan cara mengumpulkan dan menyetorkan berbagai jenis sampah yang masih memiliki nilai ekonomis. Hasil dari penyetoran tersebut ditabung dan dapat diambil dalam bentuk uang. Bank Sampah di Kota Probolinggo dimulai sejak tahun 2010 dan secara resmi dilaunching/beroperasi pada awal bulan Januari 2012. Atas himbauan dari Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo yang menyarankan untuk membentuk Bank Sampah di setiap Kelurahan yang ada di Kota Probolinggo. Sehingga beberapa masyarakat yang peduli terhadap lingkungan termasuk dalam permasalahan sampah, tidak sedikit sekelompok warga Kota Probolinggo mulai membentuk kelompok Bank Sampah di sekitar tempat tinggal mereka. Pada awal pembentukan Bank Sampah telah terdapat 11 unit Bank Sampah di Kota Probolinggo. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, masyarakat Kota Probolinggo telah mulai memiliki kesadaran atas lingkungan terutama dalam permasalahan

sampah sehingga pembentukan Bank Sampah diperluas menjadi setiap RT di Kelurahan di Kota Probolinggo, perkembangan Bank Sampah di Kota Probolinggo meningkat hingga tahun 2014 telah mencapai 54 unit Bank Sampah dan pada tahun 2015 telah mencapai 63 unit Bank Sampah di Kota Probolinggo. Hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat tinggi. Di Kota Probolinggo sendiri terdapat 63 kelompok BANK SAMPAH dan 75 (individu) BANK SAMPAH yang tersebar di Kota Probolinggo.

Hasil survei di lapangan yaitu di BANK SAMPAH Melati Berseri memiliki anggota sebanyak 40 orang, menurut penuturan Ibu Lilik Suharini selaku pengurus BANK SAMPAH Melati Berseri mengatakan bahwa dalam pembentukan BANK SAMPAH Melati Berseri anggota yang tergabung hanya sebatas beberapa tetangga sebelah beliau selanjutnya dengan berkembangnya waktu Ibu Lilik Suharini memperluas jangkauan masyarakat dalam 1 RT di tempat tinggal beliau di Jl. Kinibalu 1 No 26 RW 03 Kelurahan Ketapang Kota Probolinggo. Akan tetapi dalam beberapa bulan ini warga di tempat beliau tinggal mulai mengurangi intensitas menabung ataupun mengumpulkan sampah melalui BANK SAMPAH Melati Berseri. Warga lebih memilih menjualkan barang-barang sampah ini kepada pemulung atau urup-urup dikarenakan warga telah mengetahui rincian penjualan sampah anorganik seperti botol bekas, tas plastik, kaleng, dll. Sama halnya yang terjadi di BANK SAMPAH Bunda Peduli, Ibu Armianti Sudartono selaku pengurus juga mengatakan hal yang

sama bahwa warga di Perum Asabri Blok D 129 mulai mengurangi intensitas mereka dalam menabung ataupun mengumpulkan sampah anorganik.

BLH Kota Probolinggo juga membentuk mitra kerja BLH dengan tujuan untuk memberikan wadah serta ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pengelolaan lingkungan termasuk pengelolaan sampah. Adapun mitra kerja BLH dalam Pengelolaan Persampahan antara lain:

a) Forum Jaringan Manajemen Sampah (FORJAMSA)

Merupakan wadah bagi aktifis lingkungan khususnya pemerhati masalah persampahan untuk memberikan masukan dan gagasan dalam tataran kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Peran FORJAMSA (Forum Jaringan Manajemen Sampah) yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait materi-materi peraturan daerah maupun peraturan yang bersifat nasional tentang persampahan. Kegiatan yang dilakukan oleh FORJAMSA antara lain melaksanakan sosialisasi program-program pengelolaan persampahan kepada masyarakat Kota Probolinggo melalui berbagai media (cetak, elektronik dan penyuluhan langsung), memberikan pembinaan kepada kelurahan percontohan mengenai teknis pengelolaan persampahan, melaksanakan kegiatan pelatihan dan pemberdayaan pengurus Forjamsa di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan serta melaksanakan kegiatan studi banding dalam upaya menambah informasi mengenai sistem dan teknis pengelolaan persampahan di daerah lain.

b) Paguyuban Kader Lingkungan (PAKERLING)

Merupakan wadah bagi para Kader Lingkungan serta elemen-elemen/ pelaku pendidikan di Kota Probolinggo untuk turut menunjukkan kiprah serta kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan hidup. Paguyuban Kader Lingkungan (Pakerling) membuat suatu gerakan penyadaran terhadap masyarakat melalui gerakan siswa-siswi sekolah se-Kota Probolinggo yang turun langsung ke pasar-pasar maupun terminal untuk melakukan pembersihan sampah.

c) Paguyuban Penarik Gerobak Sampah (PGS) Ceria

Merupakan komunitas penarik gerobak sampah yang bertujuan untuk mewujudkan manajemen pengangkutan sampah skala RT/RW tiap-tiap kelurahan secara optimal. Paguyuban ini beranggotakan sebanyak 29 orang penarik gerobak sampah yang berperan dalam pengangkutan sampah skala RT/RW di setiap kelurahan di Kota Probolinggo.

d) Paguyuban Peduli Sampah (PAPESA)

Papesa dibentuk pada tanggal 12 Juni 2006 oleh kelompok-kelompok masyarakat (POKMAS) yang mengorganisasikan diri dalam satu paguyuban dengan tugas dan fungsinya antara lain adalah untuk mensosialisasikan program/kegiatan yang telah dijalankan oleh Pokmas-Pokmas kepada masyarakat yang lain. Tujuan utama dibentuknya paguyuban yang memiliki slogan “Olah Sampah Jadi Berkah” ini adalah untuk memberikan pemahaman dan berbagai kiat-kiat (*best practice*) kepada masyarakat dalam pemanfaatan beragam potensi persampahan

rumah tangga, menumbuhkan kepedulian serta menciptakan wadah kegiatan bagi masyarakat untuk turut berperan serta dalam proses pengelolaan sampah rumah tangga. Program kegiatan yang telah dilakukan oleh Papesa untuk memanfaatkan potensi lokal pengolahan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis antara lain melalui pemilahan dan pengumpulan sampah organik untuk diolah menjadi kompos serta fasilitasi pengolahan sampah anorganik menjadi berbagai barang kerajinan yang memberikan nilai ekonomis.

e) Kelompok Masyarakat (POKMAS)

Kelompok Masyarakat (POKMAS) merupakan sebuah wadah berdasarkan syarat/ kesepakatan Pemerintah dengan warga masyarakat dalam memberikan pelayanan pengolahan sampah dimana dalam tugasnya melakukan pemilihan serta pengumpulan sampah di masing-masing rumah tangga. Pokmas terdiri dari 10 s/d 15 KK (Kepala Keluarga) yang dengan sukarela memilah sampah sejak dari sumber sampah (Rumah Tangga), setelah terkumpul dan terpilah sampah plastik maupun sampah organik sebanyak 5 (lima) sak, maka okmas dapat menghubungi petugas pelayanan pengambilan sampah UPT Pengolahan Sampah dan Limbah.

Dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah belum sepenuhnya terjangkau masih terdapat masyarakat Kota Probolinggo yang belum sadar akan pentingnya pengolahan sampah yang benar. Masih banyak masyarakat yang tergabung dalam komunitas Bank Sampah perlahan-lahan mulai mengurangi intensitas mereka dalam pengumpulan sampah

di Bank Sampah. Masyarakat lebih memilih langsung menjual sampah anorganik mereka kepada pemulung tanpa harus memilah terlebih dahulu seperti pada pengumpulan sampah melalui Bank Sampah yang harus dipilah secara mandiri.

Akan tetapi dengan adanya mitra Kerja BLH ini sebagai bentuk wadah serta ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. Juga dapat digunakan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan ide, gagasan bahkan saran dan kritik kepada Pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. Banyak juga masyarakat yang tergabung dalam mitra kerja BLH dengan melihat jumlah anggota dari mitra kerja BLH. Hal ini membuktikan bahwa terdapat masyarakat yang masih peduli terhadap permasalahan persampahan di Kota Probolinggo.

3) Peran swasta / *private sector* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo

Peran swasta atau *private sector* juga merupakan pelengkap dalam sinergi *stakeholders* karena peran swasta atau *private sector* dapat membantu dan meringankan pekerjaan BLH Kota Probolinggo dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. Dalam program pengelolaan sampah di Kota Probolinggo yaitu melalui BANK SAMPAH, Pemerintah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Yayasan Danamon Peduli dengan melaunching Bank Sampah Sejahtera yang berlokasi di Pasar Baru Kota Probolinggo. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak N selaku Kepala UPT PSL bahwa:

“Jadi mbak dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo ini Pemerintah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Yayasan Danamon

Peduli dengan memfasilitasi pendirian Bank Sampah untuk kemudian dikelola secara mandiri oleh para pedagang yang terhimpun dalam Paguyuban Pedagang Pasar Baru Kota Probolinggo. Sejak tahun 2009 kita telah bekerjasama dengan Yayasan Danamon Peduli”. (Wawancara pada tanggal 19 Mei 2015)

Program Bank Sampah ini merupakan sebuah sistem pengelolaan sampah berbasis pasar, dengan memberikan ganjaran yang berupa uang tunai kepada mereka yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah sampah.

Yayasan Danamon Peduli dan Pemerintah Kota Probolinggo juga meluncurkan unit pengolahan sampah pasar menjadi pupuk organik berkualitas tinggi di TPS Ungup-Ungup Probolinggo. Program kompos ini merupakan bagian dari program utama yang dijalankan oleh Yayasan Danamon Peduli yaitu “Pasarku Bersih Sehat Sejahtera” yang bertujuan merevitalisasi pasar tradisional. Program ini selain dapat meningkatkan kondisi kebersihan dan kesehatan di lingkungan pasar tradisional secara sistematis, juga dapat membantu masyarakat membangun ketahanan pangan nasional berbasis pertanian organik. Sumber sampah yang diolah unit pengolahan kompos TPS Ungup-Ungup adalah sampah Pasar Baru Kota Probolinggo, dimana sebesar 70 % dari total sampah merupakan sampah organik. Sehingga, bahan baku yang dipergunakan untuk memproduksi kompos merupakan bahan baku yang berkualitas. Unit pengolahan kompos di Kota Probolinggo, telah mampu mengkonversi 600 kg - 1½ ton sampah menjadi 180 - 450 kg pupuk organik. Selain itu saat ini produk kompos telah didiversifikasi menjadi 3 jenis yaitu tabur, granul dan pelet sehingga memudahkan petani dalam pemanfaatannya. Proses program ini dapat berjalan lancar berkat komitmen yang tinggi dan kerjasama yang baik dari pihak pemerintah Kota

Probolinggo. Total donasi yang diberikan oleh Yayasan Danamon Peduli kepada Pemerintah Kota Probolinggo untuk program ini mencapai Rp.104.400.700,00,-. Bentuk donasi mencakup pembangunan rumah kompos, penyediaan mesin kompos, pelatihan, serta biaya operasional selama satu bulan pertama.

Dengan demikian, kerjasama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Yayasan Danamon Peduli dalam memfasilitasi pengolahan pupuk organik di Probolinggo ini tentu dapat membantu pemerintah Kota Probolinggo mengembangkan pertanian organik di Kota Probolinggo dan sekitarnya. Serta dengan adanya kerjasama dengan Yayasan Danamon Peduli ini dapat mempercepat dan meningkatkan hasil pengelolaan sampah menjadi pupuk organik.

b. Proses Pencapaian Sinergitas

Dalam proses pencapaian sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo membutuhkan komunikasi dan koordinasi diantara aktor yang terlibat. Komunikasi memiliki peran dominan dalam kehidupan manusia yang memiliki beberapa fungsi dalam rangka memenuhi tujuan peran yang ingin dicapai. Oleh karena itu, komunikasi yang terjalin antar *stakeholders* sangat diperlukan demi kelancaran dan terciptanya suatu tujuan bersama dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo.

Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo bertujuan untuk menyampaikan ide dan gagasan tentang program pengelolaan sampah di Kota Probolinggo sehingga masyarakat dapat mengetahuinya yaitu

salah satunya melalui sosialisasi sebagaimana yang dikatakan oleh YY selaku Kabid penanggulangan dan Penanganan Dampak Pencemaran Lingkungan bahwa, Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Probolinggo melalui berbagai media seperti spanduk, radio, koran, maupun website Badan Lingkungan Hidup” (wawancara pada tanggal 29 Februari 2016). Sama hal nya yang diungkapkan oleh Bapak B selaku Staf UPT Pengolahan Sampah dan Limbah mengatakan bahwa, “Kami melakukan sosialisai penanganan Lingkungan terutama masalah sampah, biasanya masyarakat itu banyak yang datang langsung kesini minta belajar bagaimana cara pengolahan sampah ada yang via telpon dan ada juga yang mendengar atau mendapat informasi bahwa Kota Probolinggo dalam pengelolaan lingkungan baik”. (Wawancara pada tanggal 2 Mei 2016). Sosialisasi yang dilakukan baik oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo maupun UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo efektif dan sangat diterima oleh masyarakat Kota Probolinggo dimana banyak masyarakat yang berbondong-bondong ikut serta dalam program maupun kegiatan pengelolaan sampah yang digagas oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo maupun UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo.

Komunikasi antara Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dengan pihak swasta yaitu mitra kerja BLH terjalin sangat baik dimana dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo selalu mengikutsertakan Papesa (Paguyuban Peduli Sampah) yang merupakan mitra kerja BLH seperti dalam kegiatan penyampaian sosialisai kepada masyarakat. Seperti

yang diutarakan oleh Ibu LS selaku anggota Paguyuban Peduli Sampah yang mengatakan bahwa, “komunikasi kita dengan Badan Lingkungan Hidup sangat baik dimana kita selalu dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup”. (wawancara pada tanggal 22 Mei 2016). Tidak hanya itu Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo juga sering mengadakan pertemuan rutin dengan mitra kerja yaitu Papesa (Paguyuban Peduli Sampah). Berikut pertemuan yang dilakukan antara UPT Pengolahan Sampah dan Limbah dengan Papesa, antara lain:

- 1) Pertemuan Papesa pada tanggal 20 februari 2016 bertempat di rumah Ibu Dayat tepatnya di Rusunawa Brantas. Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh anggota Papesa dan perwakilan dari UPT Pengolahan Sampah dan Limbah. Dari UPT. Pengolahan Sampah sendiri dihariri oleh Kepala UPT. PSL Neli, S.Sos, Kasubag UPT. PSI Eva Wahyu Kurniawati, S.TP serta Staf UPT. PSL Luqfi Amaliah. Dalam pertemuan Papesa tersebut membahas beberapa persolan diantaranya :
 - a. Kegiatan hari peduli sampah, Untuk kegiatan hari peduli sampah yang digelar pada tanggal 21 februari 2015 Papesa akan mengeluarkan produk-produk andalan buatan anggota Papesa sendiri. Selain itu Papesa juga akan mengadakan kampanye sosialisasi pengolahan sampah di pendopo alun-alun.
 - b. Plastik berbayar
 - c. Mengenai trading topik plastik berbayar diharapkan Papesa bisa menjadi contoh bagi masyarakat lain agar pada saat berbelanja tidak lagi

menggunakan tas kresek namun menggunakan tas daur ulang yang dibawa sendiri dari rumah.

- d. Penggunaan Produk daur ulang bagi pegawai
- e. Untuk lebih meningkatkan kembali penggunaan produk daur ulang sampah BLH telah membuat nota dinas kepada Ibu Walikota Probolinggo yang isinya berupa himbauan kepada seluruh pegawai Pemkot untuk menggunakan Produk daur ulang di hari tertentu.

- 2) Pertemuan rutin PAPESA (Paguyuban Peduli Sampah) yang diadakan pada tanggal 17 April 2016, di rumah Ibu Fauzan Jl. Semanggaka RT 3/ RW 2 Kedunggaleng.



Gambar 13 Kegiatan Rutin Papesa tanggal 17 April 2016

Sumber: Arsip UPT PSL Kota Probolinggo, 2016.

Maksud dan tujuan untuk silaturahmi antar anggota bank sampah yang ada di kota probolinggo dengan masukan kendala, kekurangan dan masukan pada masing-masing Bank Sampah unit yg ada di Kota Probolinggo. Dihadiri $\pm$ 50 orang dan hadir juga Kepala UPT PSL BLH Kota Probolinggo yang memberikan arahan pada pertemuan tersebut yaitu “Anggota Papesa harus jadi

orang terdepan di masyarakat untuk melakukan perubahan dalam mengolah lingkungan yang bersih”.

- 3) Pertemuan rutin PAPESA (Paguyuban Peduli Sampah) pada minggu ke empat tanggal 22 Mei 2016. Maksud dan tujuan Kegiatan rutin PAPESA ini adalah untuk silaturahmi antar anggota bank sampah yang ada di Kota Probolinggo sekaligus sarana tukar informasi, kendala yang dihadapi, dan masukan saran pada masing – masing bank sampah unit.



Gambar 14 Kegiatan Rutin Papesa tanggal 22 mei 2016

Sumber: Arsip UPT PSL Kota Probolinggo, 2016.

Kegiatan PAPESA (Paguyuban Peduli Sampah) ini dilaksanakan di rumah Bapak Syaifudin Jl Bengawan Solo Gang Kenari 1/5 Jrebeng Wetan, terdiri dari $\pm$ 50 orang pada pertemuan tersebut kepala UPT. PSL Bapak Neli, S.Sos yang selalu hadir dan setia mendampingi Kegiatan Pertemuan rutin PAPESA (Paguyuban Peduli Sampah). Beliau dalam arahannya mengatakan “bahwa kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama (Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/swasta) oleh karena itu anggota Papesa sebagai kader lingkungan harus menjadi Inisiator, Mediator, Fasilitator dan

Dinamisor di masyarakat untuk melakukan perubahan dalam mengolah lingkungan yang bersih”

Disamping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Hasan bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi. Menurut Silalahi dalam Pratiwi (2015:16), Koordinasi adalah dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama. Moekijat (1994 :39) menyebutkan ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu:

- 1) Hubungan langsung
Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.
- 2) Kesempatan awal
Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
- 3) Kontinuitas
Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.
- 4) Dinamisme
Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.
- 5) Tujuan yang jelas
Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.
- 6) Organisasi yang sederhana
Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.
- 7) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas
Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan.
- 8) Komunikasi yang efektif
Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik.
- 9) Kepemimpinan yang efektif
Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat.

Syarat-syarat yang dikemukakan diatas merupakan perwujudan dalam mewujudkan koordinasi yang efektif. Koordinasi dapat tercipta dengan baik apabila terdapat komunikasi yang efektif antar *stakeholders* yang terlibat. Dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo, komunikasi yang terjalin antar *stakeholders* terjalin dengan baik. Dengan adanya komunikasi ini para *stakeholders* langsung bergerak dengan menjalankan tugas dan peran masing-masing. Dalam hal ini terdapat koordinasi yang efektif antar *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo.

c. Jenis sinergi

Sinergi antar *stakeholders* dapat ikut mensukseskan pelaksanaan pembangunan. Menurut Silalahi (2012), OCED atau *Organisation for Economic Cooperation and Development* mendefinisikan beberapa jenis sinergi yaitu:

- 1) Sinergi Horizontal
Sinergi Horizontal yaitu semua bentuk sinergi, koordinasi dan sinkronisasi antar kelembagaan negara dan /atau instansi pemerintahan yang ditujukan untuk meminimalkan semua potensi dan peluang inkonsistensi penerapan kebijakan publik yang digagas oleh masing-masing instansi pada sektor tertentu
- 2) Sinergi Vertikal
Yaitu semua bentuk sinergi koordinasi, dan sinkronisasi antar unit kerja di dalam sebuah kelembagaan negara dan/atau instansi pemerintahan guna memberikan pelayanan publik yang terbaik.
- 3) Sinergi Temporal
Yaitu semua bentuk sinergi dan koordinasi serta sinkronisasi antar kelembagaan negara dan/atau instansi pemerintahan baik yang bersifat eksternal maupun internal yang ditujukan untuk menyikapi isu dan kondisi yang bersifat insidental dan kontijensi di tengah pelaksanaan agenda pembangunan.

Dalam menyikapi isu dan kondisi permasalahan sampah di Kota Probolinggo, Pemerintah dalam hal ini Badan Lingkungan hidup Kota Probolinggo yang mempunyai tugas dalam menangani permasalahan lingkungan

hidup. Permasalahan sampah termasuk kedalam permasalahan lingkungan hidup yang perlu ditangani dengan baik. Dalam menangani permasalahan sampah Badan Lingkungan Hidup melalui bidang UPT Pengolahan Sampah dan Limbah berupaya untuk melibatkan berbagai aktor lain yaitu masyarakat dan pihak swasta. Dimana para *stakeholders* ini memiliki tugas dan peran masing-masing dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo berupaya merangkul masyarakat Kota Probolinggo untuk terlibat langsung dan aktif dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. Serta badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo berupaya untuk membentuk sebuah mitra yang disebut mitra kerja BLH (Badan Lingkungan Hidup) untuk mensukseskan program lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.

3. Faktor-Faktor pendukung dan penghambat Sinergitas *Stakeholders* dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Probolinggo.

a. Faktor Pendukung

- 1) Dukungan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo.

Banyak faktor yang menjadikan sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo dapat berjalan dengan baik hingga sekarang. Semua tidak terlepas dari dukungan pemerintah dalam menangani permasalahan pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. Pemerintah yang merupakan suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam melayani dan melaksanakan mandat dari rakyat, sehingga dalam pengelolaan sampah di

Kota Probolinggo, pemerintah dalam hal ini yaitu Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo mempunyai tanggung jawab dalam permasalahan lingkungan termasuk dalam persampahan. Badan Lingkungan Hidup kota Probolinggo menyediakan sarana dan prasarana guna memaksimalkan kinerja para petugas dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. Adapun sarana dan prasarana yang disediakan antara lain:

Tabel 5 Sarana Dan Prasarana Operasional Pengelolaan Sampah

No	Jenis	Jumlah (Unit)
1	Armroll Truck	7
2	Dump Truck	6
3	Truk Sampah Besar	3
4	Colt Pick	2
5	Sepeda Motor Gerobak	10
6	Gerobak Sampah	40
7	Truk Penyedot Tinja	2
8	Buldozer	1
9	Wheel Loader	1
10	TPS Kontainer	28
11	TPS Terbuka	18
12	Transfer Depo	4
13	TPS Tertutup	59
14	Plant Pengomposan	2
15	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	1
16	Instalasi Pengolah Air Limbah	1
17	Pick Up	4

Sumber: BLH Kota Probolinggo, 2015.

Melalui bidang UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo juga telah memberikan dukungan dengan menjalankan tugas dan perannya dalam bidang teknis persampahan.

Dukungan pemerintah Kota Probolinggo dalam mensukseskan pengelolaan sampah di Kota Probolinggo dapat dilihat dari anggaran persampahan sebanyak 20% dari pengelolaan lingkungan hidup. Berikut anggaran pengelolaan kebersihan / Persampahan dan TPA:

Tabel 6 Anggaran Pengelolaan Kebersihan / Persampahan dan TPA

No	Tahun	Jumlah Anggaran
1	2012	Rp 6.550.915.190
2	2013	Rp 5.056.000.000
3	2014	Rp 11.007.215.382

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, 2016

Dapat dilihat di tabel 8 yang menunjukkan anggaran untuk pengelolaan kebersihan / persampahan dan TPA dari tahun ke tahun meningkat. Mengingat pengelolaan kebersihan / persampahan menjadi tugas penting untuk diselesaikan di setiap kota.

2) Komitmen masyarakat Kota Probolinggo dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo

Komitmen masyarakat dalam masalah lingkungan hidup termasuk dalam permasalahan terlihat dari masyarakat Kota Probolinggo yang tergabung dalam POKMAS (Kelompok Masyarakat), PAPESA (Paguyuban Peduli Sampah) maupun kelompok masyarakat lain. Dimana dalam kelompok ini yang beranggotakan masyarakat Kota Probolinggo yang memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap permasalahan sampah di Kota Probolinggo. Mereka dengan sukarela ikut berperan serta dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu S selaku ketua Papesa.

“Kita disini memang sukarela mbak. Berawal dari orang-orang yang peduli terhadap lingkungan termasuk dalam masalah sampah selanjutnya dibentuklah PAPESA (Paguyuban Peduli Sampah). Kita bekerjasama dengan UPT Pengolahan sampah dan Limbah Kota Probolinggo. Dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo maupun UPT Pengolahan Sampah dan Limbah, kita selalu mengikutinya”. (Wawancara pada tanggal 29 April 2016).

Dari hasil wawancara diatas, membuktikan bahwa masih ada beberapa masyarakat Kota Probolinggo yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan termasuk dalam permasalahan sampah. Sehingga membuat mereka berkomitmen untuk membentuk sebuah paguyuban yang dimana paguyuban ini dibentuk oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Bersama-sama mereka melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah baik dalam kegiatan sosialisasi maupun kegiatan lainnya seperti kegiatan pemanfaatan sampah, dan lain sebagainya.

3) Dukungan sektor swasta dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo

Sejak tahun 2009 Pemerintah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Yayasan Danamon Peduli dengan meluncurkan unit pengolahan sampah pasar menjadi pupuk organik berkualitas tinggi di TPS Ungup-Ungup, Probolinggo. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak N selaku Kepala UPT PSL mengatakan bahwa:

“kerjasama ini Yayasan Danamon Peduli mendonasikan untuk program pengelolaan sampah pasar mencapai mencapai Rp.104.400.700,00,-. Bentuk donasi mencakup pembangunan rumah kompos, penyediaan mesin kompos, pelatihan, serta biaya operasional selama satu bulan pertama”. (Wawancara pada tanggal 19 Mei 2015).

Sehingga dengan adanya bantuan ini dapat membantu Pemerintah Kota Probolinggo dalam pengelolaan sampah. Serta dapat mempercepat dan meningkatkan hasil produksi pupuk organik.

b. Faktor Penghambat

1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo

Kesadaran masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. Sampah ditimbulkan dari kegiatan manusia yang menghasilkan sampah. Oleh karena itu diperlukan kesadaran masyarakat untuk bisa mengelola sampah secara mandiri. Akan tetapi, pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan termasuk dalam masalah sampah, seperti:

- i. Potensi masyarakat dalam mengelola 3 R (*Recycle, Reuse, Reduce*) belum dikembangkan secara sistematis,
- ii. Kurangnya partisipasi warga masyarakat dalam pengelolaan persampahan (masih ada yang di bakar dan dibuang di drainase),
- iii. Masih adanya pandangan di masyarakat, bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah

Hasil pengamatan di lapangan, peneliti menemukan masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, bahkan masih ada masyarakat yang membakar sampahnya. Seperti yang terlihat pada hasil gambar peneliti di bawah ini:



Gambar 15 Kondisi Sampah di Sungai

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016.

Terlihat pada gambar 15 diatas, nampak aliran sungai dikawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Maramis, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, terlihat dipenuhi sampah. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak masyarakat Kota Probolinggo dalam membuang sampah sembarangan bahkan membuang sampah ke sungai.

C. Analisis Data Fokus Penelitian

1. Pengelolaan sampah di Kota Probolinggo

Pengelolaan sampah di Kota Probolinggo diatur kedalam Peraturan Walikota Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Pengurangan sampah

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo telah melakukan pembatasan timbulan sampah yang akan masuk ke TPA (Tempat Pembuangan Sampah) dengan cara mendaur ulang maupun memanfaatkan kembali sampah. Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo mengembangkan sebuah program kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Salah satu program tersebut adalah pelatihan-pelatihan pemanfaatan sampah. Melalui bidang UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo melakukan pelatihan-pelatihan pemanfaatan sampah kepada masyarakat.

Pelatihan pemanfaatan sampah ini bertujuan untuk mendayafungsikan atau memanfaatkan limbah terbuang menjadi barang yang memiliki manfaat serta nilai ekonomis. Seperti yang diungkapkan oleh Djohan dan Halim (2013:10) sampah diharapkan bukan hanya menjadi sekadar sisa buangan saja, namun dapat dijadikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. Pelatihan pemanfaatan sampah di Kota Probolinggo dilakukan dengan cara mendaur ulang sampah menjadi kerajinan contohnya seperti tas, sepatu, tempat minuman, tirai, dll.

Djohan dan Halim (2013:10) juga mengatakan bahwa pengurangan sampah dapat dilakukan melalui kegiatan 3R yaitu *reduce* (pengurangan), *reuse* (pemanfaatan kembali), dan *recycle* (pendauran ulang). Dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo juga menerapkan 3R (*reduce*,

reuse, recyle) yang dinamakan dengan pengembangan 3R (*reuse, reduce, recycle*) skala kawasan. Pelaksanaan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) skala kawasan di Kota Probolinggo dengan secara aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan terhadap penerapan dan pelaksanaan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) Skala Kawasan pada kawasan-kawasan percontohan, memberikan fasilitas/stimulasi pengolahan sampah untuk Skala Kawasan Kecil dalam bentuk rumah kompos dan mesin pencacah sampah serta memberikan fasilitas/stimulasi pengolahan sampah untuk Skala Kawasan Sekolah berupa komposter aerob dan keranjang takakura.

2) Penanganan sampah

Penanganan sampah di Kota probolinggo dilakukan dengan cara:

a) Pemilahan

Pemilahan dilakukan dengan cara memilah sampah rumah tangga dengan jenis sampah. Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan fasilitas umum, social dan fasilitas lainnya. Sampah dipilah terlebih dahulu di sumber sampah dan di plant composting. Dalam proses pemilahan sampah di plant composting dilakukan secara manual terhadap sampah yang berasal dari pasar karena masih banyak mengandung sampah anorganik. Proses pemilahan dilakukan di area *waste unloading* (penurunan sampah) dan ruang

pencacahan. Sampah yang berasal dari sapuan jalan langsung dikomposkan, tidak dipilah lagi, karena komposisinya telah didominasi oleh sampah organik. Selanjutnya sampah organik yang terkumpul, sebelum difermentasi, dicacah terlebih dahulu dengan mesin pencacah.

b) Pengumpulan

Sampah hasil sapuan jalan, taman, pasar, pemukiman dan sumber lainnya dikumpulkan oleh petugas kebersihan dan kemudian ditampung di tempat penampungan sementara.

c) Pengangkutan

Sampah yang terpilah di sumbernyadan yang ditampung di tempat penampungan sementara diangkut dengan baklor oleh petugas untuk dibawa ke tempat produksi pupuk organik. Jika sampah tidak dilakukan pengolahan maka akan dibuang langsung ke TPA (Tempat Pembuangan akhir).

d) Pengolahan

Sampah yang berada di plant pengomposan akan melalui proses pengolahan. Dimana sampah organik akan dilakukan pengomposan, sampah anorganik akan dilakukan pencacahan, dan sampah B3 ditempatkan di wadah khusus B3.

e) Pemrosesan akhir sampah

Setelah melalui proses pengolahan, pemrosesan akhir sampah organik berupa pupuk organik kompos yang dikemas untuk

sebagian di jual dan dikembalikan kepada masyarakat. Sampah anorganik berupa kerajinan daur ulang seperti tas, keranjang, dll. Sedangkan sampah B3 akan dikirim ke pengelola.

2. Sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo

Sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo bermula dari permasalahan sampah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Permasalahan sampah yang dimaksud yaitu masyarakat Kota Probolinggo dalam pengelolaan sampah yang hanya sebatas kumpul-angkut-buang atau pemusnahan dengan cara pembakaran, sehingga jumlah timbulan sampah di Kota Probolinggo meningkat dan menimbulkan tempat pembuangan sampah liar. Dibutuhkan pengelolaan sampah yang memandang bahwa sampah dapat dijadikan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan. Seperti yang diungkapkan oleh Djohan dan Halim (2013 : 11), bahwa pengurangan sampah dapat dilakukan melalui kegiatan 3R yaitu *reduce* (pengurangan), *reuse* (pemanfaatan kembali), dan *recycle* (pendauran ulang), sedangkan dalam penanganan sampah dapat dilakukan melalui kegiatan meliputi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pengelolaan sampah di Kota Probolinggo menerapkan cara pengurangan dan penanganan sampah yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, maupun oleh petugas kebersihan badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Pengelolaan sampah di Kota Probolinggo

sendiri telah diatur dalam Peraturan Walikota Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan sampah.

Permasalahan sampah di Kota Probolinggo menjadi masalah Pemerintah Kota Probolinggo, dalam hal ini yaitu Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Bahkan permasalahan ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana perannya dalam pemerintahan suatu wilayah. Permasalahan pengelolaan sampah merupakan penyelenggaraan kepentingan publik yang termasuk kedalam ruang lingkup kegiatan administrasi publik. Seperti yang diungkapkan oleh Keban (2008:4), bahwa Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah. Maka, permasalahan pengelolaan sampah di Kota Probolinggo merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kepuasan / pelayanan terhadap masyarakat dalam aspek persampahan di Kota Probolinggo.

Pengelolaan sampah di Kota Probolinggo bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja akan tetapi masyarakat juga harus bertanggung jawab, bahkan dengan adanya pihak swasta akan dapat membantu permasalahan pengelolaan sampah. Seperti yang diungkapkan oleh Mindarti (2007:179), bahwa dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah terdapat tiga unsur pemerintahan yang mencakup unsur pemerintah (*government*), swasta (*private sector*) dan

masyarakat sipil (*civil society*). Dimana ketiga unsur ini berhubungan secara harmonis untuk mencapai adanya sinergi. Hubungan yang harmonis dan sinergi antartiga komponen pemerintahan ini akan tercapai apabila ketiganya memiliki kesamaan derajat dan peran serta mampu melakukan saling kontrol yang efektif satu sama lain. Budiman (2008:46) mengungkapkan bahwa individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai *stakeholders* jika memiliki kekuasaan, legitimasi dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Seperti yang diungkapkan oleh Haryanto (2007:73) bahwa *stakeholders* dalam pembangunan secara lengkap disebutkan sebagai politikus dan pemerintah, planner, pengusaha, penduduk/ masyarakat, pers, LSM dan informal leader. Dengan kata lain, bahwa dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo mencakup pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, dimana *stakeholders* ini mempunyai peran dan kesempatan yang sama dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo.

Pamudji (1985:12), mengatakan bahwa pada hakikatnya kerjasama (sinergi) mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi dan menjalin hubungan yang bersifat dinamis guna mencapai tujuan bersama. Dalam setiap kerjasama terdapat tiga unsur penting yaitu:

- 1) adanya dua pihak atau lebih,
- 2) adanya unsur interaksi,
- 3) adanya unsur tujuan bersama.

Maka, dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo terjadi kerjasama (sinergi) antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta yang berinteraksi dan menjalin

hubungan untuk mencapai tujuan bersama dalam permasalahan pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. Menurut Endarti dalam Pratiwi (2013:119) konsep sinergi berdasarkan teori *governance* yaitu lokus dan fokus pada sinergi peran dari beberapa aktor atau organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo terlihat pada peran dari pemerintah yaitu Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo melalui bidang UPT Pengolahan Sampah dan Limbah, masyarakat dan pihak swasta.

Adapun fungsi dan peran dari masing-masing *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo dari hasil temuan di lapangan, antara lain:

Tabel 7 Fungsi dan Peran *Stakeholders* Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Probolinggo

No	Peran Pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah	Hasil Temuan di Lapangan
1	Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah	Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo mengembangkan program-program yang berkaitan dengan persampahan antara lain: ayo bersepeda bersihkan sampah (ABBS), kita bersihkan sampah saluran (KB2S2), pelatihan-pelatihan pemanfaatan sampah, Bank Sampah, dan <i>Green Barter</i> . Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo berharap masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengelolaan sampah. Dalam beberapa kegiatan terlihat masyarakat sangat antusias untuk berpartisipasi.
2	Melakukan penelitian,	Dalam melakukan pengembangan

	pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah	teknologi pengurangan dan penanganan sampah, UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo mengembangkan 3R (<i>Reuse, Reduce, Recycle</i>) skala Kawasan. 3R skala kawasan merupakan fasilitasi sistem pengolahan sampah organik maupun anorganik yang ditempatkan pada kawasan-kawasan perkotaan seperti komplek perumahan, lembaga pendidikan, perkantoran ataupun pertanian, dimana pengelolaannya dapat dilakukan oleh pemerintah maupun dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Dengan sistem ini memberikan manfaat lebih baik terhadap masyarakat serta dapat mengurangi beban pengelolaan sampah pada TPA.
3	Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah	Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo membentuk Mitra Kerja BLH yaitu: Forum Jaringan Manajemen Sampah (FORJAMSA), Kelompok Masyarakat (POKMAS), Paguyuban Peduli Sampah (PAPESA), Paguyuban Penarik Gerobak Sampah (PGS) Ceria, Paguyuban Masyarakat Peduli Sampah, Paguyuban Pemulung Peduli Lingkungan dan Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Peduli Sampah. Dimana Mitra Kerja BLH ini difasilitasi dengan memberikan pendampingan, pembinaan mulai dari proses pembentukan hingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan mitra kerja BLH tersebut. Kegiatan-kegiatan mitra kerja BLH ini berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Probolinggo dalam upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah.
4	Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan saranapengelolaan sampah	UPT Pengolahan sampah melaksanakan pengelolaan sampah seperti pada gambar 4. UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo mengangkut sampah yang berasal dari sapuan jalan, taman, pasar, pemukiman dan kemudian ditampung ditempat penampungan sementara. Selanjutnya dari penampungan sementara sampah diangkut dan jika tidak

		dilakukan pengolahan, maka dibuang langsung ke TPA. Jika akan dilakukan pengolahan, maka sampah dibawa ke plant pengomposan. Sampah dipilah, dimana sampah organik dijadikan kompos, sampah anorganik diproses lebih lanjut, sampah B3 ditepatkan pada wadah khusus untuk dikirim ke pengelola limbah B3 dan residu dibuang ke TPA. UPT Pengolahan menyediakan prasarana dan saran dalam pengelolaan sampah berupa: <i>amroll truck</i>, <i>dump truck</i>, truk sampah besar, <i>colt pick</i>, sepeda motor gerobak, gerobak sampah, truk penyedot tinja, <i>bulldozer</i>, <i>wheel loader</i>,. TPS container, TPS terbuka, transfer depo, TPS tertutup, plant pengomposan, tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, <i>pick up</i>.
5	Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah	UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo memberikan pelatihan daur ulang sampah anorganik kepada masyarakat maupun kelompok masyarakat seperti Bank Sampah, terlihat pada gambar 7 kegiatan peatihan daur ulang. Dengan kegiatan ini dapat memanfaatkan hasil pengelolaan sampah anorganik menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis, terlihat pada gambar 8 yang memperlihatkan hasil dari daur ulang sampah anorganik berupa tas, tempat pakaian/ sampah, dll. UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo mendorong Bank Sampah dan Pokmas untuk mengumpulkan sampah organik untuk kemudian diolah menjadi pupuk kompos di UPT PSL. Pupuk yang telah terolah 70% akan dikembalikan kembali kepada Bank Sampah dan Pokmas tersebut, 30% tetap berada di UPT PSL Kota Probolinggo.
6	Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah	Di UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo terdapat mesin pengolah sampah organik berupa mesin cacah, mesin pencacah, mesin pengayak, mesin jahit karung serta mesin press plastik. Dalam penerapan dan pelaksanaan 3R

		(Reuse, Reduce, Recycle) skala kawasan pada kawasan-kawasan percontohan, Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo memberikan fasilitasi/stimulasi pengolahan sampah untuk skala kawasan kecil dalam bentuk rumah kompos dan mesin pencacah sampah serta memberikan fasilitasi/stimulasi pengolahan sampah untuk skala kawasan sekolah berupa komposter aerob dan keranjang takakura
7	Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah	UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo sering melakukan pertemuan rutin baik dengan Papesa (Paguyuban Peduli Sampah) maupun dengan Bank Sampah tertentu. Kegiatan tersebut bertujuan untuk silaturahmi sekaligus sarana tukar informasi, kendala yang dihadapi, serta masukan saran dari masing-masing anggota Papesa maupun Bank Sampah.
No	Peran Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Hasil Temuan di Lapangan
1	Pemberian laporan, usul, pertimbangan, dan/ atau saran kepada Pemerintah Daerah	Melalui pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo, masyarakat maupun kelompok masyarakat dapat memberikan laporan usul atau saran yang berkaitan dengan permasalahan sampah. Dalam pertemuan tersebut mereka dapat menyampaikan keluhan-keluhan yang mereka hadapi dalam pengelolaan sampah
2	Pelaksanaan kegiatan penanganan yang dilakukan	Melalui program pengelolaan sampah yaitu Bank Sampah yang merupakan sistem

	secara mandiri dan/ atau bermitra dengan Pemerintah Kota/Kabupaten	pengelolaan sampah berbasis kelompok masyarakat dengan cara mengumpulkan dan menyetorkan berbagai jenis sampah yang masih memiliki nilai ekonomis. Dalam proses pengumpulan sampah dilakukan secara mandiri oleh anggota Bank Sampah dengan memilah sampah antara sampah anorganik dan organik. Kemudian sampah dikumpulkan di Bank Sampah masing-masing dan kepala Bank Sampah akan menghubungi UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo untuk kemudian diangkut.
3	Pemberian pendidikan, kampanye dan pelatihan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam penanganan sampah	Pada kegiatan sosialisai yang diadakan oleh UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo menghadirkan narasumber dari PAPESA (Paguyuban Peduli Sampah) yaitu Ibu Lilik. Dalam kegiatan tersebut memberikan pemahaman tentang pengelolaan sampah pasar kepada pedagang pasar, memberikan informasi tentang pemanfaatan sampah anorganik melalui keterampilan daur ulang.
No	Peran Swasta berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Hasil Temuan di Lapangan
1	Pemerintah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan swasta/badan usaha dalam penyelenggaraan PSP	Dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan mengandalkan dari anggaran pemerintah Kota Probolinggo. Akan tetapi dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Yayasan Danamon Peduli. Kerjasama ini berupa peluncuran unit pengolahan sampah pasar menjadi pupuk organik berkualitas tinggi di TPS Ungup-Ungup Kota Probolinggo.

2	Kemitraan dapat dilakukan pada tahap pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah pada sebagian atau seluruh wilayah pelayanan	Kerjasama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Yayasan Danamon Peduli berupa pembangunan fasilitas unit kompos mencakup pembangunan rumah kompos, penyediaan mesin kompos, pelatihan, serta biaya operasional selama satu bulan pertama.
---	---	---

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo terjadi kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta yang saling berinteraksi dan menjalin hubungan baik untuk mencapai tujuan bersama. Peran dari masing-masing *stakeholders* menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah bukanlah aktor satu-satunya dalam suatu tata pemerintahan.

Dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo juga harus terjadi sinergi diantara *stakeholders*. Sinergi yang terjadi dalam suatu program menjadi terpenting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan hasil yang lebih besar. Sinergi dalam pelaksanaan suatu program merupakan bagian terpenting dalam mensukseskan program itu. Dalam menjalin sinergitas dari beberapa aktor yang terlibat dapat terbangun melalui dua acara yaitu: (Pratiwi, 2015:15)

a. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran dominan dalam kehidupan manusia yang memiliki beberapa fungsi dalam rangka memenuhi tujuan peran yang ingin dicapai. Oleh karena itu, komunikasi yang terjalin antar *stakeholders* sangat diperlukan demi kelancaran dan terciptanya suatu tujuan bersama dalam program pemerintah daerah. Dalam sinergitas harus dibangun dan diciptakan melalui komunikasi yang efektif. Komunikasi yang terjadi dalam pengelolaan sampah di

Kota Probolinggo berupa penyampaian ide dan gagasan tentang program pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. Penyampaian ide dan gagasan ini dilakukan melalui sosialisasi melalui berbagai media seperti spanduk, radio, koran maupun website resmi Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dan UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo juga melakukan komunikasi kepada Mitra Kerja BLH sebagai sarana tukar informasi, kendala yang dihadapi, serta masukan saran dari mitra kerja BLH.

b. Koordinasi

Sinergitas yang dibangun selain komunikasi juga perlu adanya koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Hasan bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi. Koordinasi merupakan kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama. Dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo koodinasi diperlukan antar *stakeholders* untuk mencapai keberhasilan bersama dala pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. Moekijat (1994 :39) menyebutkan ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu:

1) Hubungan langsung

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung. Dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo terlihat adanya hubungan langsung antara pemerintah dengan masyarakat dan swasta. Tidak adanya dominasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta, sehingga antara

pemerintah, masyarakat dan swasta sama-sama mempunyai kesempatan untuk adanya hubungan langsung.

2) Kesempatan awal

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.

3) Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan. Dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo, Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo membentuk Mitra Kerja BLH sebagai bentuk upaya untuk memberikan wadah serta ruang bagi masyarakat. Dimana Mitra Kerja BLH ini diberikan fasilitasi, pendampingan dan pembinaan mulai dari proses pembentukan hingga pelaksanaan kegiatan Mitra Kerja BLH.

4) Dinamisme

Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern

5) Tujuan yang jelas

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif. Dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo, pemerintah, masyarakat dan swasta memiliki tujuan yang jelas dengan memiliki kesadaran yang kuat untuk mengelola lingkungan sekitar termasuk dalam masalah persampahan menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat dan swasta

bersinergi untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo.

6) Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.

7) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan. Masing-masing mitra kerja BLH mempunyai perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

8) Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik. Komunikasi yang terjalin antara Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dan UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo dengan masyarakat serta Mitra Kerja BLH terjalin sangat baik. Dalam setiap kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo maupun UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo selalu mengikutsertakan Mitra Kerja BLH. Ketiga aktor membangun dan menjalin komunikasi satu sama lain.

9) Kepemimpinan yang efektif

Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan.

Dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo terjalin sebuah sinergi diantara *stakeholders* yang terlibat. Sinergi kelembagaan ikut menentukan suksesnya pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam sinergi antar

stakeholders dapat ikut mensukseskan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. Silalahi (2012), OCED atau *Organisation for Economic Cooperation and Development* mendefinisikan beberapa jenis sinergi yaitu:

1) Sinergi Horizontal

Sinergi Horizontal yaitu semua bentuk sinergi, koordinasi dan sinkronisasi antar kelembagaan negara dan /atau instansi pemerintahan yang ditujukan untuk meminimalkan semua potensi dan peluang inkonsistensi penerapan kebijakan publik yang digagas oleh masing-masing instansi pada sektor tertentu

2) Sinergi Vertikal

Sinergi vertikal yaitu semua bentuk sinergi koordinasi, dan sinkronisasi antar unit kerja di dalam sebuah kelembagaan negara dan/atau instansi pemerintahan guna memberikan pelayanan publik yang terbaik.

3) Sinergi Temporal

Sinergi temporal yaitu semua bentuk sinergi dan koordinasi serta sinkronisasi antar kelembagaan negara dan/atau instansi pemerintahan baik yang bersifat eksternal maupun internal yang ditujukan untuk menyikapi isu dan kondisi yang bersifat insidental dan kontijensi di tengah pelaksanaan agenda pembangunan.

Dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo terjalin sinergi temporal. Isu dan kondisi yang dihadapi Kota Probolinggo yaitu permasalahan sampah yang tak kunjung mendapatkan penyelesaian. Sehingga pemerintah melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo merencanakan, merumuskan dan melaksanakan suatu kebijakan pengelolaan sampah yang telah diatur kedalam

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo melalui UPT Pengolahan Sampah dan Limbah menjalankan tugasnya dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo juga melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo juga memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan mulai dari proses pembentukan hingga pelaksanaan kegiatan mitra-mitra kerja peduli lingkungan dalam pengelolaan sampah. Baik Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo melalui bidang UPT Pengolahan Sampah dan Limbah, masyarakat dan mitra kerja BLH mempunyai peran dan tugas masing-masing dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo.

3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Sinergitas Stakeholders Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Probolinggo.

Keberhasilan yang diraih akibat sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo tidak terlepas dari berbagai macam faktor-faktor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo, ada faktor pendukung sinergitas dan ada faktor penghambat sinergitas, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini.

a. Faktor Pendukung Sinergitas.

- 1) Dukungan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo

Dukungan pemerintah Kota Probolinggo dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo dilihat dari penyediaan anggaran untuk persampahan dan Badan Lingkungan hidup Kota Probolinggo dalam penyediaan sarana dan prasarana. Seperti yang diungkapkan oleh Dimock dan Koenig dalam (Mindarti, 2007 : 4) bahwa secara operasional, penyelenggaraan urusan publik dan kepentingan publik umumnya lebih banyak dilakukan oleh “birokrasi pemerintah” (*public bureaucracy*) yang ada di lingkungan eksekutif. Oleh karena itu, dalam penyediaan sarana dan prasarana serta dana anggaran menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Probolinggo serta Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Dukungan dari bidang UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo yang menjalankan tugasnya dalam teknis persampahan. Sebagaimana tugas dan peran UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo yang tertuang dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo, Tugas Pokok dan Fungsi UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo tertuang pada pasal 36, sebagai berikut:

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Sampah dan Limbah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang Teknis Pengolahan Sampah Dan Limbah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Sampah dan Limbah mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan pengolahan sampah dan limbah;
- b. Penyusunan rencana program dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional pengelolaan sampah dan limbah;
- d. Pelaksanaan distribusi hasil produksi pengolahan sampah dan limbah;
- e. Pelaksanaan sosialisasi pengolahan sampah dan limbah;
- f. Pelaksanaan pengembangan riset dan teknologi pemanfaatan sampah dan limbah yang berwawasan lingkungan;
- g. Pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan pada UPT Pengolahan Sampah dan Limbah;
- i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Komitmen masyarakat Kota Probolinggo dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo

Komitmen masyarakat dalam masalah lingkungan hidup termasuk dalam permasalahan terlihat dari masyarakat Kota Probolinggo yang

tergabung dalam POKMAS (Kelompok Masyarakat), PAPESA (Paguyuban Peduli Sampah) maupun kelompok masyarakat lain. Dimana dalam kelompok ini yang beranggotakan masyarakat Kota Probolinggo yang memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap permasalahan sampah di Kota Probolinggo. Mereka dengan sukarela ikut berperan serta dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo dan secara mandiri mereka pengelola sampah. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Widyatmoko dan Moerdjoko (2002 : 29), kemandirian masyarakat dalam mengelola persampahan di lingkungannya konsekuensi dari penerapan konsep partisipatif dalam sistem pengelolaan sampah yang dirumuskan bersama. Penerapan konsep partisipatif memungkinkan masyarakat mengelola sampah rumah tangganya secara mandiri dengan dibantu oleh LSM sebagai fasilitator dan pendamping dalam kegiatan pengelolaan sampah masyarakat secara mandiri tersebut

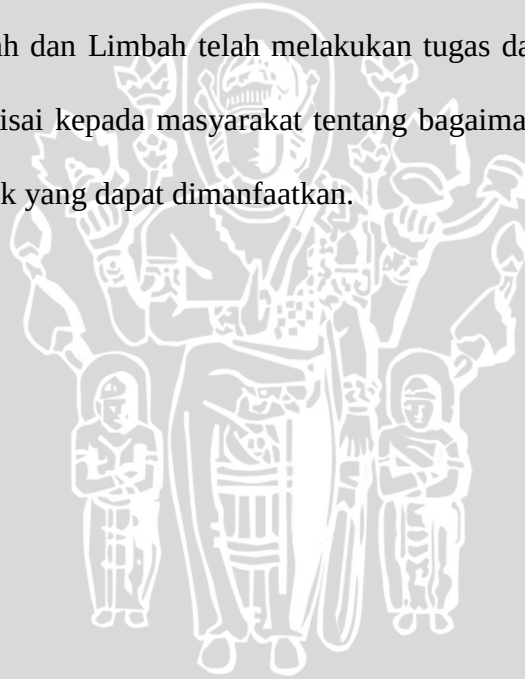
3) Dukungan sektor swasta dalam Pengelolaan Sampah di Kota Probolinggo

Dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Yayasan Danamon Peduli dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. Dengan adanya donasi yang diberikan berupa uang maupun alat yang dapat mempercepat proses pengelolaan sampah. Seperti yang diungkapkan Wiidyatmoko dan Moerdjoko (2002:29) yaitu swasta berperan sebagai penanam modal. Sehingga dengan adanya penanam modal dari Yayasan Danamon Peduli kepada Pemerintah Kota Probolinggo dapat mengoptimalkan pengelolaan sampah di Kota Probolinggo.

b. Faktor Penghambat Sinergitas.

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo

Peran masyarakat menurut Widyatmoko dan Moerdjoko (2002 : 29), yaitu masyarakat berperan sebagai pengelola sampah, pemanfaat hasil dan proses. Akan tetapi sebagian masyarakat Kota Probolinggo kurang memiliki kesadaran dalam mengelola sampah secara mandiri. Meskipun UPT Pengolahan Sampah dan Limbah telah melakukan tugas dan perannya dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara mengelola sampah dengan baik yang dapat dimanfaatkan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka beberapa hal yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah di Kota Probolinggo dilakukan dengan dua cara yaitu penanganan sampah dan pengurangan sampah. Dalam penanganan sampah di Kota Probolinggo sebagian besar diterapkan dengan baik melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah sehingga memiliki manfaat dan nilai ekonomis yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Kota Probolinggo. Sedangkan dalam pengurangan sampah di Kota Probolinggo telah melakukan mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dengan benar dan tepat.
2. Sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo.

Sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo dapat disimpulkan telah terjalin dengan baik.

a. Peran *stakeholders*

Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo yaitu telah melaksanakan tugas dan perannya dengan baik. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo yaitu telah melakukan pengelolaan sampah dengan memanfaatkan sampah maupun memilah sampah akan tetapi masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah

dan belum menyadari pentingnya pengelolaan sampah yang benar. Sedangkan peran swasta dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo sebagai penanam modal telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Probolinggo.

b. Proses pencapaian sinergitas

Pencapaian sinergitas dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo terwujud melalui dua acara, yakni komunikasi dan koordinasi. Komunikasi terjalin ditandai dengan adanya kerjasama dan kepercayaan antar *stakeholders*. Sedangkan koordinasi terjalin ditandai dengan adanya hubungan langsung, kontinuitas, tujuan yang jelas, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang efektif antara masing-masing *stakeholders*. Dapat disimpulkan bahwa terdapat sinergitas yang terjalin cukup baik antara *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo.

c. Jenis sinergitas antara *government*, *civil society* dan *private sector*.

Sinergitas yang terjalin antar *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo termasuk dalam sinergitas temporal. Dimana pemerintah melibatkan masyarakat sipil dan swasta dalam menyikapi isu dan kondisi yang dihadapi Kota Probolinggo dalam menyelesaikan permasalahan persampahan.

3. Faktor pendukung yang dihadapi selama proses sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo, antara lain 1) Dukungan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo, 2) Komitmen

masyarakat Kota Probolinggo dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo, (3) Dukungan sektor swasta dalam Pengelolaan Sampah di Kota Probolinggo. Sedangkan, hambatan-hambatan yang dihadapi selama proses sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo, antara lain: 1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo,

B. SARAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan sebagai wujud sumbangsih pemikiran terhadap sinergitas *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo, antara lain:

1. Sebaiknya pemerintah menjadikan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah menjadi program kegiatan tahunan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. Misalnya pada kegiatan seperti Ayo Bersepeda Bersihkan Sampah (ABBS) dan Kita Bersama Bersihkan Sampah (KB2S2).
2. Baik pemerintah maupun kelompok masyarakat lebih memperluas jangkauan dalam memberikan sosialisasi pengelolaan sampah di Kota Probolinggo kepada masyarakat misalnya melalui media televisi dan radio.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, 2015. Profil BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kota Probolinggo.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Probolinggo, 2015. *Profil Kota Probolinggo 2015*. (online). <http://probolinggokota.go.id/>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2016.
- Badan Pusat Statistik, 2015. Kota Probolinggo dalam Angka 2015 Probolinggo *City in Figure*.
- Bryson, J.M., 2003. *Strategic Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Edisi ke-1, M. Miftahuddin, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budimanta, Arif. Dkk. 2008. *Corporate social Responsibility Alternatif bagi Pembangunan Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta : ICSD.
- Djohan dan Halim. 2013. *Pengelolaan Limbah Rumah Sakit*. Jakarta: Salemba Medika.
- Geotimes, 2015. 2019, *Produksi Sampah di Indonesia 67,1 Juta Ton sampah Per Tahun*. (online). <http://geotimes.co.id/2019-produksi-sampah-di-indonesia-671-juta-ton-sampah-per-tahun/html> diakses pada tanggal 14 Februari 2016.
- Gregory, Anne. 2004. *Public Relation dalam Praktek*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hardjanto, Imam. 2013. *Teori Manajemen Publik*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Hartini, Sri. 2012. Peran Inovasi; Pengembangan Kualitas Produk dan Kinerja Bisnis. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 14, No. 1 82-88.
- Kastaman, Roni. 2007. *Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu*. Bandung: HUMANIORA.
- Keban, T, Y. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lasker., Weiss., and Miller. 2001. Jurnal : “*Partnership Synergy : A Practical Framework for Studying and Strengthening the Collaborative Advantage*”. New York Academy of Medicine. Published by Blacwell Publishers.
USA. <https://scholar.google.co.id/scholar?q=Partnership+Synergy+:+A+Pr>

actical+Framework+for+Studying+and+Strengthening+the+Collaborative
+Advantage diunduh pada tanggal 17 Mei 2016.

Mindarti, L, I. 2007. *Revolusi Administrasi Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Moekijat.(1994). *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung: Mandar Maju.

Moleong, L.J. 2014.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Pasolong, H. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKIS.

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Walikota Kota Probolinggo Nomor 3 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah.

Peraturan Walikota No. 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo.

Podugge, Robiyati. 2009. *Sinergi DPRD dan Walikota dalam Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya.

Pratiwi, Diyah R. 2015. “Sinergitas antar Stakeholders dalam Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS)”.Universitas Sebelas Maret, Surakarta: Skripsi.

Pujileksono, Sugeng. 2015. *Metode Penelitian Komunikasi kualitatif*.Malang: Intrans Publishing.

Rahmawati, Triana. 2015. *Sinergitas Stakeholders dalam Inovasi Daerah*. Skripsi, Malang: UB.

Rizal, Mohammad. 2011. Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi Kasus Pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala).*Jurnal SMARTek*, Vol. 9 No. 2. 155 – 172.

Sejati, Kuncoro. 2009. *Pengelolaan Sampah Terpadu dengan Sistem Node, Subpoint, Center Point*.Yogyakarta: KANISIUS.

- Semiawan, Cony R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Silalahi, Sudi. 2012. Memantapkan Sinergi Kelembagaan Guna Mendukung Suksesnya Pembangunan. *Jurnal Sekretariat RI*, No. 25.
- Sudarwan Danim dan Darwis. 2003. *Metode Penelitian Kebidanan: Prosedur, Kebijakan dan Etik*.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-20. Bandung: Alfabeta.
- Taufikurrahman, 2015. "Model Sinergitas Stakeholder Dalam Pengembangan Posyandu Plus Di Wilayah Tambang". Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor: *Skripsi*.
- Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Widi, Restu K. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widyatmoko dan Moerdjoko. 2002. *Menghindari, Mengelola dan Menyingkirkan Sampah*. Jakarta: Abadi Tandur.
- Wijaya, Riska. 2015. *Sinergitas stakeholders dalam Pemasaran Oariwisata di Kabupaten Bantul*. Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Yuniarti, Eti. 2007. Analisis Pengungkapan Informasi Tanggung Jawab Sosial pada Sektor Perbankan di Indonesi. Tesis, Semarang: UNDIP.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Bank Sampah Kota Probolinggo

N O	Nama Bank Sampah	Alamat	OmzetSampaiSaa tIni	TanggalTerben tuk	Anggo ta
KELURAHAN JREBENG LOR					
1	Spanex Mandiri (SMP 4)	Jl. Sunan Ampel 253	Rp 42.000	20 Juli 2009	656 Orang
KELURAHAN KARENG LOR					
2	Makmur Sejahtera	Perum Prasaja Mulya EE 12	Rp 83.000	Tahun 2012	31 Orang
3	Wijaya Kusuma	Jl. Prof Hamka RT 1 RW 3	Rp 100.000	13 Desember 2013	30 Orang
KELURAHAN JREBENG KULON					
4	Rukun Budaya	Jl. Serayu RT 3 RW 1	Rp 2.500.000	12 Juni 2013	30 Orang
KELURAHAN JREBENG WETAN					
5	KYOMOGU LL (SMKN 1)	Jl Mastrip	Rp 50.000	Tahun 2013	17 Orang
6	Kenari Indah	Jl. Bengawan Solo Gang Kenari 1/5	Rp 150.000	6 Juni 2014	47 Orang
KELURAHAN JREBENG KIDUL					
7	Sakina	Jl. Ky Wira'I RT 01 RW 02	Rp 2500	10 Februari 2013	6 Orang
KELURAHAN KANIGARAN					
8	BundaPeduli	Perum Asabri Blok D 129	Rp 75.000	11 Januari 2011	24 Orang
9	SMKN 2 Kota Probolinggo	Jl. Mastrip 153	Rp 40.000	Tahun 2011	Semua siswa
10	SMP 7	Jl. Walikota Gatot 181	Rp 25.000	7 Jnuari 2012	9 Orang
11	Iksiwaldi	Jl. Walikota Gatot Gang 17	Rp 70.000	14 Juni 2013	20 Orang

12	SMPN 10 Kota Probolinggo	Jl. Soekarno Hatta 263	Rp 30.000	11 September 2014	5 Orang
13	Arteji (SDN Tisnonegara n 1)	Jl. Suroyo No 2	Rp 60.000	25 September 2014	224 Orang
14	SDN Kanigaran 1	Jl. HOS Cokroaminoto 49	Rp 30.000	24 Januari 2015	Semua Siswa
15	SDN Tisnonegara n 2	Jl. Suroyo 2	Rp 100.000	27 Juli 2015	9 Orang
16	Maju Jaya (SDN Kanigaran 5)	Jl. Cokroaminoto No 49	Rp 20.000	1 Agustus 2014	9 Orang
KELURAHAN KEBONSARI WETAN					
17	Kenanga	Jl. KH Hasan Genggong Gang Bayusari 8/116	Rp 200.000	13 November 2012	24 Orang
KELURAHAN KEBONSARI KULON					
18	Pasar Baru	Jl. Cut Nyak Dien	Rp 150.000	11 Januari 2012	119 Orang
19	Jitu	Jl. Priksan Gang Jalak No 2	Rp 150.000	14 Februari 2014	48 Orang
20	Mas Bro	Jl. KH ABD Hamid Gang Pandean 1/30	Rp 125.000	25 November 2014	16 Orang
KELURAHAN TISNONEGARAN					
21	Lansia Mandiri	Jl. Ir Juanda No 52	Rp 991.725	15 Maret 2013	10 Orang
22	Teratai Bersemi (SDN Tisnonegara n 3)	Jl. Letjen Sutoyo No 3	Rp 250.000	12 Juli 2012	202 Orang
23	SMPN 2 Kota Probolinggo	Jl. Dr. Moh Saleh No 7	Rp 150.000	9 Desember 2013	Semua Siswa

24	SMP Katolik Mater Dei	Jl. Raya Panglima Sudirman 22	Rp 34.450	1 Agustus 2015	16 Orang
KELURAHAN SUKOHARJO					
25	Damai Sejahtera	Jl. KH Hasan Gang Damai No 321	Rp 80.000	3 Mei 2013	30 Orang
26	MEJ (Makmur Enggal Jaya)	Jl. KH Hasan Gang Melati No 121	Rp 55.000	7 Juni 2013	40 Orang
27	SDN Sukoharjo 1	Jl. KH Hasan Genggong No 117	Rp 50.000	16 April 2014	207 Siswa
KELURAHAN SUMBER TAMAN					
28	Pokmas Indah	Perum STI Jl Taman Tirta 2 RE XI No 5	Rp 20.000	1 November 2011	25 KK
29	Edelwese	Jl. Taman Kenanga 13	Rp 250.000	15 Desember 2013	25 Orang
KELURAHAN PAKISTAJI					
30	Harapan Sejahtera	Jl. Ir Sutami RT 1 RW 3	Rp 9.500	15 Maret 2013	36 Orang
31	Dawis Melati 1	Perum Pakistaji Asri Blok A/ 15 RT 4 RW 7	Rp 41.666	16 Januari 2012	17 Orang
32	Sumber Rejeki	Perum Pakistaji Asri RT 2	Rp 150.000	10 November 2014	30 Orang
33	Sumber Barokah	Perum Pakistaji RT 1 RW 2	Rp 6.500	11 November 2011	6 Orang
KELURAHAN KEDUNG ASEM					
34	Berlian (SDN Kedung Asem)	Jl. Lumajang Km 6	Rp 25.000	1 Agustus 2015	Semua Warga Sekolah

KELURAHAN KETAPANG					
35	Melati Berseri	Jl. Kinibalu 1 No 26 RW 03	Rp 90.000	2 Januari 2012	40 Orang
36	Kelud Jaya	Jl. Kelud No 32	Rp 200.000	4 November 2015	10 Orang
37	Srikandi	Perum Kopian barat Blok E 23	Rp 50.000	1 Maret 2014	15 Orang
KELURAHAN KADEMANGAN					
38	Brantas	Jl. Brantas 490	Rp 17.500	15 Desember 2012	10 Orang
KELURAHAN TRIWUNG LOR					
39	Gemelina	Jl. Merapi No 12 B RT 8 RW 2	Rp 500.000	5 Oktober 2013	60 Orang
40	Himalaya	Jl. Himalaya F No 9 Gang 8	Rp 100.00	21 September 2013	15 Orang
41	Kampung Barokah	Jl. Raya Bromo gang Merbabu 3	Rp 200.000	5 Maret 2014	50 Orang
KELURAHAN PILANG					
42	Bayuangga Makmur (Rusunawa)	Jl. Brantas Rusunawa Bayuangga Pilang	Rp 200.000	9 Januari 2013	30 Orang
43	Berkah Sejahtera	Perum Pilang Permai	Rp 222.000	2 Desember 2014	23 Orang
44	Terkesima	Jl. Kerinci	Rp 182.150	21 Januari 2015	15 Orang
45	Flamboyan Berkah	Jl. Flamboyan Gang 1 RT 5 RW 3	Rp 50.000	22 Januari 2015	16 Orang
KELURAHAN JATI					
46	SMP 3	Jl. Hayam Wuruk	Rp 45.000	9 Juli 2012	Semua Siswa
KELURAHAN SUKABUMI					
47	Flamboyan	Jl. Imam Bonjol 34	Rp 347.275	20 Februari 2014	15 Orang

48	SDN Sukabumi 6	Jl. Mayjend Panjaitan 11	Rp 130.000	8 Oktober 2011	Semua Siswa
49	Anggrek Mustika	Jl. Panjaitan 37	Rp 300.000	5 Mei 2013	22 Orang
50	DWP BLH	Jl. Anggrek	Rp 21.300	10 April 2015	5 Orang
KELURAHAN MANGUNHARJO					
51	Al Maratus Sholihah	Jl. Ikan Belanak 1 Kav	Rp 35.000	19 Agustus 2015	32 Orang
52	Mangun Sari	Jl. Ahmad Yani 138	Rp 500.500	22 Mei 2013	25 orang
53	SDN Mangunharjo 12	Jl. Basuki Rahmad 27	Rp 132.700	10 Juli 2010	3 Orang
54	BASAMAN (Bank Sampah Mangunharjo 6 Maju)	Jl. Basuki Rahmad 22	Rp 25.000	17 Juli 2013	210 Orang
KELURAHAN MAYANGAN					
55	Benteng Asri	Jl. Lumba-Lumba No 19	Rp 150.000	25 September 2014	40 KK
KELURAHAN SUMBER WETAN					
56	Mandiri	Jl. Merpati	Rp 100.000	25 Agustus 2015	15 Orang

Sumber: UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo, 2016.

Lampiran 2 Rekapitulasi Data Pemilah Sampah Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun 2015

No	Kecamatan	Nama Pokmas	Alamat	Sampah Organik (Sak)		Sampah Organik (Kg)		Hasil Kompos (Kg)	Kompos yang akan dikembalikan (Bks)	Kompos yang dikembalikan dari pengirim sebelumnya (Bks)
				Daun-daunan	Kotoran Ternak	Daun-daunan	Kotoran Ternak			
1	Mayangan	Abadi	Jl. Panjaitan 56	78	0	188	0	93	14	17
2		Benteng Asri	Kel Mayangan	144	0	769	0	383	66	233
3		Imam Bonjol	Jl. Imam Bonjol	65	0	225	0	112	18	31
4		Kartini I	Jl. Kartini	113	0	402	0	201	34	40
5		Kartini II	Jl. Kartini	49	0	170	0	84	14	9
6		Keles	Kampung Keles	76	0	268	0	134	21	29
7		Nusa Indah	Perum Nusa Indah	311	0	841	0	420	71	86
8		Mawar II	Jl. Mawar No. 16	59	0	219	0	110	19	25
9		Mawar Barat	Jl. Mawar No 52	140	0	418	0	209	35	41
10		Mayangan I	Jl. Ikan Hiugg 1	71	0	230	0	116	20	22
11		Mayangan II	Jl. Ikan Hiu	37	0	124	0	62	10	10
12		Panjaitan	Jl. Panjaitan 56	53	0	204	0	102	17	20

13		Seruni	Jl. Seruni No 39	66	0	181	0	90	17	25
14		Wahidin II	Jl. Wahidin	51	0	174	0	85	168	52
15		SMAK	Jl. Panjaitan	20	0	110	0	55	9	0
16		Stadion I	Jl. Nusa Indah	188	0	463	0	232	38	41
17		Stadion II	Jl. Nusa Indah	0	26	0	105	51	8	8
18		Suprpto	Jl. LetjenSuprpto	316	0	975	0	484	80	88
19		Tongkol	Jl. IkanTongkol	6	0	21	0	10	2	4
20		Wijaya II	Jl. Wijayakusuma	71	0	229	0	114	17	18
21	Kademangan	Brantas	Jl. Brantas	23	0	98	0	49	8	6
22		Gaden II	Jl. Brantas	37	0	120	0	60	10	15
23		Gemini	KelTriwungLor	16	0	66	0	33	5	4
24		Ketapang II	KelKetapang	203	0	725	0	360	59	78
25		Pepaya	KelKademangan	0	316	0	5.37 2	2.687	640	0
26	Kanigaran	Kalijogo	Jl. SunanKalijogoGg 1	79	0	221	0	110	19	24
27		Bima	KelCurahGrinting	16	0	43	0	22	4	4

28		Cokro	Jl. Mawar II No 46	100	0	391	0	191	116	156
29		KRPL Pahlawan	KelKebonsari	104	0	310	0	156	26	24
30		WalikotaGatot I	Jl. WalikotaGatot	400	0	1.976	0	988	172	180
31		Zipur	Jl. Sukarno Hatta	34	0	221	0	111	19	29
32	Wonoasih	Anggrek I	Jl. Raya Wonoasih	53	14	212	60	137	20	15
33		Anggrek STI	Perum STI	20	0	63	0	31	5	4
34		Mawar STI	Perum STI Blok O/12	34	0	143	0	71	11	11
35		Pakistaji	PerumPakistaji	23	0	77	0	39	7	8
Total				3.056	356	10.877	5.537	8.192	1.799	1.357
Total Keseluruhan (Kg)				3.412		16.414		8.192	7.195	5.428
Total Keseluruhan (Ton)				3,41		16,41		8,19	7,20	5,43

Sumber : UPT PengolahanSampahdanLimbah Kota Probolinggo, 201

Lampiran 3 SURAT PENGAJUAN PRA RISET



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 1014 /UN.10.3/P6 /2016

Lampiran : -

Perihal : Pra Riset

Kepada : Yth. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan Pra Riset / Survey bagi mahasiswa:

Nama : Mega Yana Puspita

Alamat : Jalan Slamet Riyadi Gg. Sadewa No 11 Kota Probolinggo

NIM : 125030107111049

Program Studi: Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Sinergitas *Stakeholders* dalam Inovasi Daerah "Pengelolaan Sampah" di Kota Probolinggo

Lokasi : Badan Lingkungan Hidup di Kota Probolinggo

Lamanya : 15 (lima belas) hari / 25 Januari 2016 – 8 Februari 2016

Peserta : 1 (Satu) Orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Malang, 20 Januari 2016

a.n. Dekan

Ketua Prodi Administrasi Publik



(Sd) Lely Indah Mindarti, M. Si

(NIP. 196905240 200212 002

Lampiran 4 SURAT REKOMENDASI PRA RISET



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Mawar No. 39 Telp./Fax. (0335) 426 436
 PROBOLINGGO 67219

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 072/083 /425.206/2016

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014;
 4. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo;

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 - b. bahwa sesuai Surat dari Ketua Prodi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Nomor : 1014/UN.10.3/PG/2016 Tanggal 20 Januari 2016 Perihal Pra Riset;
 - c. bahwa sesuai huruf a, b, dan c serta hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Walikota Probolinggo, Memberikan Rekomendasi kepada:

- a. Nama/ NIM : **MEGA YANA PUSPITA / 125030107111049**
- b. Alamat : **Jl. Slamet Riyadi gg. Sadewa No.11 RT/RW 009/007 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo**
- c. Pekerjaan/Jabatan : **Mahasiswa**
- d. Instansi/Civitas/ Organisasi : **Universitas Brawijaya**
- e. Kebangsaan : **Indonesia**

Untuk mengadakan penelitian/Survey/research dengan:

- a. Judul : **Sinergitas Stakeholders dalam Inovasi Daerah "Pengelolaan Sampah di Kota Probolinggo" (Studi pada TPST dan BLH Kota Probolinggo)**
- b. Bidang Penelitian : **Sosial**
- c. Tujuan : **Mencari Data dan Penelitian**
- d. Status Peneliti : **Mandiri**
- e. Tanggal (Waktu) : **2 (dua) Minggu 27 s/d 10 Februari 2016**
- f. Tempat : **1. Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo
2. UPT Pengolahan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo**

- Dengan Ketentuan :
1. Peneliti wajib melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian Sektor setempat dalam waktu 1 x 24 jam;
 2. Wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam daerah setempat serta menghindari hal – hal yang dapat melukai / menyinggung dan menghina martabat, agama, etnis seseorang atau golongan;
 3. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan lain diluar tujuan penelitian;

Lampiran 5 SURAT PENGAJUAN RISET**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI****UNIVERSITAS BRAWIJAYA****FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 5620 /UN.10.3/ PG/2016

Lampiran : -

Perihal : Riset /Survey

Kepada : Yth. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo

Jl. Anggrek 15

Probolinggo

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan Riset/ Survey bagi mahasiswa:

Nama : Mega Yana Puspita

Alamat : Jl. Slamet Riyadi Gg. Sadewa No. 11, Probolinggo

NIM : 125030107111049

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Tema : Sinergitas *Stakeholders* dalam Pengelolaan Sampah di Kota Probolinggo
(Studi pada BLH Kota Probolinggo dan UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo)

Lamanya : 2 (dua) bulan / 20 April 2016- 20 Juni 2016

Peserta : 1 (Satu) Orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Malang, 12 April 2016

a.n. Dekan

Ketua Prodi Administrasi Publik



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si

NIP. 19690524 200212 2 002.

Lampiran 6 SURAT REKOMENDASI RISET



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
 DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Mawar No. 39 Telp./Fax. (0335) 426 436
 PROBOLINGGO 67219

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 072/ 308 /425.206/2016

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014;
 4. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo;

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 - b. bahwa sesuai Surat dari Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Nomor : 5620/UN.10.3/PG/2016 Tanggal 12 April 2016 Perihal Riset/Survey ;
 - c. bahwa sesuai huruf a, b, dan c serta hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Walikota Probolinggo, Memberikan Rekomendasi kepada:

- a. Nama/ NIM : **MEGA YANA PUSPITA / 125030107111049**
- b. Alamat : **Jl. Slamet Riyadi Gg Sadewa No. 11 RT/RW 009/007 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo**
- c. Pekerjaan/Jabatan : **Mahasiswa**
- d. Instansi/Civitas/ Organisasi : **Universitas Brawijaya**
- e. Kebangsaan : **Indonesia**

Untuk mengadakan penelitian/Survey/research dengan:

- a. Judul : **Sinergitas *STAKEHOLDERS* Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Probolinggo (Studi pada BLH Kota Probolinggo dan UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo)**
- b. Bidang Penelitian : **Lingkungan**
- c. Tujuan : **Mencari Data dan Penelitian**
- d. Status Peneliti : **Mandiri**
- e. Tanggal (Waktu) : **2 (dua) bulan 20 April s/d 20 Juni 2016**
- f. Tempat : **1. Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo
2. UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah Kota Probolinggo**

- Dengan Ketentuan :
1. Peneliti wajib melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian Sektor setempat dalam waktu 1 x 24 jam;
 2. Wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam daerah setempat serta menghindari hal – hal yang dapat melukai / menyinggung dan menghina martabat, agama, etnis seseorang atau golongan;
 3. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan lain diluar tujuan penelitian;